



TAHUN  
2020

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

 Jl. Soekarno-Hatta 714 Bandung

 (022)7810365

 surat.ptajawabarat@gmail.com

 www.pta-bandung.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan secara deskriptif analitis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2020 yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan serta bidang pembinaan dan pengawasan. Pada akhir laporan dimuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pimpinan Mahkamah Agung RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih banyak kekurangan baik isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu saran dan kritik sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga kerja keras kita selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara di bidang hukum.

Bandung, Januari 2020  
Ketua,



Drs. M. Taufiq, HZ., M.H.I.  
NIP. 19550219.198302.1.001

## DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
C. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat .....	6
BAB II : KEADAAN PERKARA .....	9
A. Keadaan Perkara Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat .....	9
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	9
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	12
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	15
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	17
B. Penyelesaian Perkara .....	18
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus Pada Tingkat Pertama .....	18
2. Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus Pada Tingkat Banding .....	21
3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Tingkat Pertama .....	22
4. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Tingkat Banding .....	24
5. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK.....	26
6. Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi .....	29
C. Penataan Arsip Perkara .....	31
D. Layanan Bantuan Hukum .....	35
1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) .....	35



	2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan / Pelayanan Terpadu .....	37
	3. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) .....	39
BAB III	: Sumber Daya Manusia .....	41
	Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan .....	41
	A. Mutasi .....	55
	B. Promosi .....	70
	C. Pensiun .....	82
	D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	86
BAB IV	: Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi .....	93
	A. Pengelolaan Keuangan .....	93
	B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana .....	108
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	138
	- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama ..	138
	- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama .....	141
BAB V	: Peningkatan Pelayanan Publik .....	144
	- Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) .....	144
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	150
	- Inovasi Pelayanan Publik .....	155
Bab VI	: Pengawasan Internal .....	177
	A. Internal .....	177
	B. Evaluasi .....	189
Bab VII	: Penutup .....	191
	A. Kesimpulan .....	191
	B. Rekomendasi .....	197

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan pelaksanaan kegiatan tahunan atau lebih dikenal dengan istilah laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib disajikan oleh setiap lembaga pemerintahan tak terkecuali lembaga Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam kurun waktu satu tahun berjalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun. Laporan tahunan berfungsi disamping sebagai pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung sebagai eselon I juga berfungsi sebagai transparansi informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan evaluasi/feedback bagi PTA Jawa Barat sendiri untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **A. Gambaran Umum**

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hoof Voor Islamietische Zaken*". Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, Penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa Barat. Keluarnya keputusan tersebut merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkedudukan di Bandung semula berpusat dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.119 Bandung dengan bentuk gedung permanent dan bertingkat 2 (dua), berstatus Milik Negara (Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan seluas 716 m<sup>2</sup> terdiri dari lantai satu seluas 358 m<sup>2</sup> dan lantai dua seluas 358 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 1110 m<sup>2</sup>. Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tanggal 28 September 1998, namun pasca tanggal 20 Februari 2007 Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjadi berkedudukan di Kantor Utamanya yakni di Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Bandung berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 1950 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga lantai, masing-masing lantai seluas 800 m<sup>2</sup> ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 20 unit kendaraan roda empat dan 30 unit kendaraan roda dua.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk administrasi umum berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sedangkan untuk administrasi yustisial/perkara tetap menggunakan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang efektif sejak bulan Maret tahun 2016.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 26 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 26 Daerah Kabupaten dan Kota, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut :

**TABEL 1.3**  
**WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

<b>NO.</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>KABUPATEN / KOTA</b>
1.	Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A	Kota Bandung
2.	Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I.A	Kota Cimahi
3.	Pengadilan Agama Cibinong Kelas I.A	Kabupaten Cibinong
4.	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A	Kabupaten Tasikmalaya
5.	Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A	Kabupaten Majalengka
6.	Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A	Kabupaten Ciamis
7.	Pengadilan Agama Sumber Kelas I.A	Kabupaten Cirebon
8.	Pengadilan Agama Sumedang Kelas I.A	Kabupaten Sumedang
9.	Pengadilan Agama Garut Kelas I.A	Kabupaten Garut
10.	Pengadilan Agama Bekasi Kelas I.A	Kabupaten Bekasi
11.	Pengadilan Agama Bogor Kelas I.A	Kabupaten Bogor
12.	Pengadilan Agama Kuningan Kelas I.A	Kabupaten Kuningan
13.	Pengadilan Agama Indramayu Kelas I.A	Kabupaten Indramayu
14.	Pengadilan Agama Depok Kelas I.A	Kota Depok
15.	Pengadilan Agama Karawang Kelas I.A	Kabupaten Karawang
16.	Pengadilan Agama Subang Kelas I.A	Kabupaten Subang
17.	Pengadilan Agama Cirebon Kelas I.B	Kota Cirebon
18.	Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I.B	Kota Sukabumi
19.	Pengadilan Agama Cianjur Kelas I.B	Kabupaten Cianjur
20.	Pengadilan Agama Cibadak Kelas I.B	Kabupaten Sukabumi
21.	Pengadilan Agama Cikarang Kelas I.B	Kabupaten Bekasi
22.	Pengadilan Agama Purwakarta Kelas I.B	Kabupaten Purwakarta
23.	Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II	Kota Banjar
24.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II	Kota Tasikmalaya
25.	Pengadilan Agama Soreang Kelas II	Kabupaten Bandung
26.	Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II	Kabupaten Bandung Barat



Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Operasional Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Panitera, Panitera Muda Panitera Pengganti dan Pegawai dengan formasi sebagai berikut :

NO	J A B A T A N	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim Tinggi	18



4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	2
7.	Panitera Pengganti	15
8.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1
9.	Kepala bagian Umum dan Keuangan	1
10.	Kasubag TU dan Rumah Tangga	1
11.	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	1
12.	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	1
13.	Kasubag Kepegawaian dan IT	1
14.	Pelaksana	13
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat merupakan salah satu Lembaga Peradilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan tingkat pertama di tingkat banding di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan tingkat Banding mempunyai fungsi :

1. Fungsi Mengadili (*Judisial Power*) yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antar pengadilan di wilayah hukumnya;
2. Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk terhadap jajaran Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum, perlegkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti JS/JSP di daerah hukumnya serta fungsi pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat pertama agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan;
4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan lain sebagainya.

### **C. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam setiap fase/periode Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat harus memiliki arah kebijakan dan program kerja yang dapat mendorong tercapainya kinerja dan pelayanan masyarakat yang optimal. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam menentukan arah kebijakan dan program kerjanya merujuk pada arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung serta arah kebijakan dan program kerja Badan Peradilan Agama.

Arah kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Proses berperkara yang sederhana dan mudah;
3. Penguatan akses peradilan (Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum);
4. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
5. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
6. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
7. Hak Uji Materiil;
8. Penguatan lembaga eksekusi;
9. Keberlanjutan e-Court;
10. SPPT TI;
11. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
12. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan yang optimal;
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
14. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Berdasarkan arah kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menetapkan arah kebijakan yang sesuai dengan Tupoksi Pengadilan Tinggi Agama, antara lain :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Proses berperkara yang sederhana dan mudah;



3. Penguatan akses peradilan (Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum);
4. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
5. Keberlanjutan e-Court;
6. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
7. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan yang optimal;
8. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka mengejawantahkan arah kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat didukung dengan 3 (tiga) program dan penganggaran antara lain :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, yang meliputi :
  - a. Layanan dukungan manajemen satker;
  - b. Layanan perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung meliputi : Layanan Sarana dan Prasarana Internal
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, meliputi :
  - a. Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu;
  - b. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan;
  - c. Bimbingan Tekhnis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim

**BAB II**  
**KEADAAN PERKARA**

**A. KEADAAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT.**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai beban perkara sebanyak 131.292 perkara, jumlah tersebut terdiri dari:

1. Sisa tahun 2019	: 11.005 perkara
2. Terima tahun 2020	: 120.287 Perkara +
Jumlah	: 131.292 Perkara

Perkara yang berhasil diputus sebanyak 123.025 Perkara, sisa 8.267 Perkara. Rincian Keadaan perkara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI DATA KEADAAN PERKARA**  
**TINGKAT PERTAMA**

NO	SATKER	KEADAAN PERKARA				
		SISA TAHUN 2019	TERIMA	BEBAN TAHUN 2020	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7
1	PA Bandung	868	7241	8109	7357	752
2	PA Indramayu	1005	9365	10370	9471	899
3	PA Majalengka	336	4937	5273	5015	258
4	PA Sumber	763	8043	8806	8315	491
5	PA Ciamis	250	6517	6767	6638	129
6	PA Tasikmalaya	224	5802	6026	5916	110
7	PA Karawang	428	4712	5140	4849	291
8	PA Kota Cimahi	139	1612	1751	1533	218
9	PA Subang	531	5017	5548	5249	299
10	PA Sumedang	291	5033	5324	5014	310
11	Purwakarta	252	2911	3163	2959	204

12	Sukabumi	62	921	983	938	45
13	Cianjur	310	5741	6051	5639	412
14	Kuningan	234	3374	3608	3441	167
15	Cibadak	289	3245	3534	3283	251
16	Cirebon	142	1131	1273	1238	35
17	Garut	630	6424	7054	6628	426
18	Bogor	146	1962	2108	1960	148
19	Bekasi	438	4591	5029	4493	536
20	Cibinong	968	6890	7858	7177	681
21	Cikarang	396	3922	4318	3929	389
22	Depok	461	4073	4534	4341	193
23	Kota Tasikmalaya	42	2757	2799	2761	38
24	Kota Banjar	75	1001	1076	1024	52
25	Soreang	1364	9119	10483	9743	740
26	Ngamprah	361	3946	4307	4114	193
<b>JUMLAH</b>		<b>11.005</b>	<b>120.287</b>	<b>131.292</b>	<b>123.025</b>	<b>8.267</b>

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018 s.d 2020), secara umum Penerimaan perkara maupun penyelesaian perkara di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengalami kenaikan, data tersebut dapat dilihat dari Tabel **perbandingan keadaan perkara** di bawah ini :

**TABEL 2.2**  
**REKAPITULASI PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT**

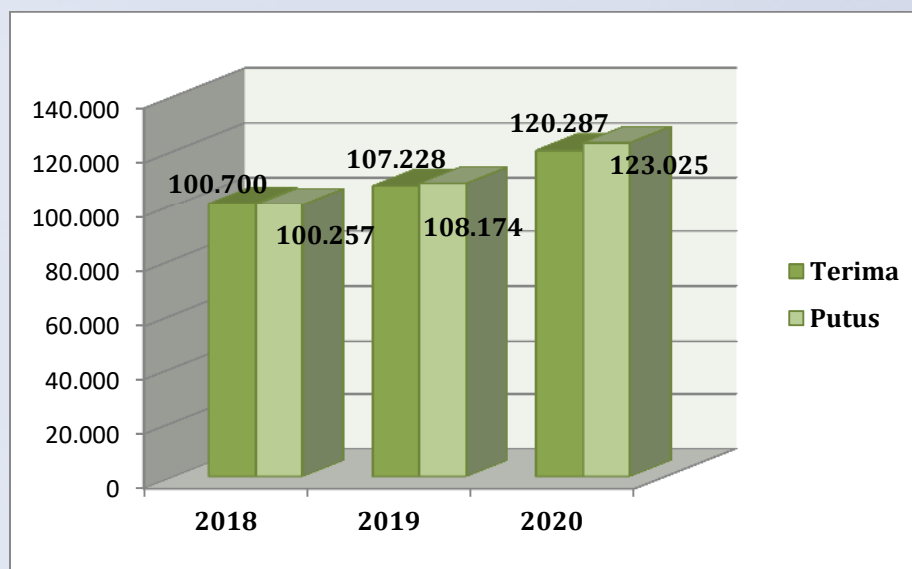
NO	SATKER	DITERIMA			DIPUTUS		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA Bandung	6.569	7.061	7.241	6.573	7.254	7.357
2	PA Indramayu	9.232	9.822	9.365	9.039	9.730	9.471
3	PA Majalengka	4.578	4.562	4.937	4.651	4.229	5.015
4	PA Sumber	7.874	8.709	8.043	8.358	8.598	8.315
5	PA Ciamis	5.105	5.961	6.517	5.461	6.091	6.638



6	PA Tasikmalaya	4.318	5,249	5.802	4.358	5.389	5.916
7	PA Karawang	3.987	4771	4.712	3.946	4.766	4.849
8	PA Kota Cimahi	11.254	1.501	1.612	12.442	2.148	1.533
9	PA Subang	4.811	5.334	5.017	4.817	5.267	5.249
10	PA Sumedang	4.611	4.881	5.033	4.797	4.909	5.014
11	PA Purwakarta	2.163	2.537	2.911	2.124	2.587	2.959
12	PA Sukabumi	736	911	921	718	956	938
13	PA Cianjur	5.081	5.973	5.741	5.145	6.025	5.639
14	PA Kuningan	2.851	3.141	3.374	2.851	3.323	3.441
15	PA Cibadak	1.980	2.632	3.245	1.858	2.681	3.283
16	PA Cirebon	1.066	1.091	1.131	1.051	1.110	1.238
17	PA Garut	4.792	6.045	6.424	4.628	6.033	6.628
18	PA Bogor	2.058	2.027	1.962	2.183	2.077	1.960
19	PA Bekasi	4.438	5.154	4.591	4.603	5.174	4.493
20	PA Cibinong	7.174	8.246	6.890	7.119	8.371	7.177
21	PA Cikarang	3.147	3.841	3.922	3.231	3.468	3.929
22	PA Depok	4.593	4.920	4.073	4.794	4.881	4.341
23	PA Kota Tasikmalaya	2.113	2.336	2.757	2.256	2.513	2.761
24	PA Kota Banjar	1.000	987	1.001	1.001	1.022	1.024
25	PA Soreang	1.234	9.006	9.119	155	8.681	9.743
26	PA Ngamprah	463	3.656	3.946	15	3.603	4.114
<b>JUMLAH</b>		<b>100.700</b>	<b>107.228</b>	<b>120.287</b>	<b>100.257</b>	<b>108.174</b>	<b>123.025</b>

Komposisi perbandingan keadaan perkara dari tahun 2018 s.d. 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

**GRAFIK 2.1**  
**PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA**  
**TAHUN 2018 – 2020**



## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai beban perkara sebanyak 321 perkara, jumlah tersebut terdiri dari :

1. Sisa tahun 2019 : 11 perkara
2. Terima tahun 2020 : 310 perkara +
- Jumlah : 321 Perkara

Perkara yang berhasil diputus sebanyak 316 Perkara, sisa 5 perkara. Rincian Keadaan perkara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 2.3**  
**REKAPITULASI DATA KEADAAN PERKARA**  
**TINGKAT BANDING**

NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	TERIMA THN 2020	BEBAN PERKARA TAHUN 2020	PUTUS
1	2	3	4	5	6
1	PA Bandung	1	47	48	47
2	PA Indramayu	1	12	13	13
3	PA Majalengka	0	5	5	5
4	PA Sumber	0	10	10	10

5	PA Ciamis	0	7	7	7
6	PA Tasikmalaya	0	5	5	5
7	PA Karawang	0	16	16	16
8	PA Kota Cimahi	0	9	9	9
9	PA Subang	0	9	9	9
10	PA Sumedang	0	4	4	4
11	PA Purwakarta	0	5	5	5
12	PA Sukabumi	0	2	2	2
13	PA Cianjur	2	11	13	13
14	PA Kuningan	0	3	3	3
15	PA Cibadak	0	9	9	9
16	PA Cirebon	2	4	6	6
17	PA Garut	0	10	10	10
18	PA Bogor	1	16	17	16
19	PA Bekasi	1	34	35	35
20	PA Cibinong	1	22	23	23
21	PA Cikarang	0	16	16	16
22	PA Depok	0	23	23	21
23	PA Kota Tasikmalaya	0	7	7	7
24	PA Kota Banjar	0	3	3	3
25	PA Soreang	1	13	14	13
26	PA Ngamprah	1	8	9	9
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>310</b>	<b>321</b>	<b>316</b>

Dibandingkan dengan Penerimaan perkara tahun 2019, penerimaan perkara tahun 2020 turun sebanyak 27 perkara (8.01%) dan dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2018 penerimaan perkara turun sebanyak 16 perkara (4,91%).

Dibawah ini perbandingan keadaan perkara banding tiga tahun terakhir (2018 s.d 2020).

**TABEL 2.4**  
**REKAPITULASI PERBANDINGAN KEADAAN**  
**PERKARA BANDING**



NO	SATKER	DITERIMA			DIPUTUS		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA Bandung	42	43	47	43	42	47
2	PA Indramayu	12	4	12	12	4	13
3	PA Majalengka	2	5	5	2	5	5
4	PA Sumber	12	7	10	14	7	10
5	PA Ciamis	5	2	7	4	3	7
6	PA Tasikmalaya	7	3	5	7	3	5
7	PA Karawang	16	9	16	17	9	16
8	PA Kota Cimahi	26	23	9	27	23	9
9	PA Subang	11	7	9	11	7	9
10	PA Sumedang	5	10	4	7	10	4
11	PA Purwakarta	5	9	5	6	9	5
12	PA Sukabumi	5	4	2	5	4	2
13	PA Cianjur	16	10	11	17	9	13
14	PA Kuningan	4	5	3	5	5	3
15	PA Cibadak	6	3	9	6	3	9
16	PA Cirebon	6	10	4	6	8	6
17	PA Garut	9	9	10	9	9	10
18	PA Bogor	13	19	16	12	19	16
19	PA Bekasi	24	43	34	26	43	35
20	PA Cibinong	32	39	22	35	38	23
21	PA Cikarang	25	17	16	26	17	16
22	PA Depok	35	30	23	39	30	21
23	PA Kota Tasikmalaya	5	10	7	6	10	7
24	PA Kota Banjar	3	4	3	3	4	3
25	PA Soreang	0	8	13	43	7	13
26	PA Ngamprah	0	4	8	12	3	9
<b>JUMLAH</b>		<b>326</b>	<b>337</b>	<b>310</b>	<b>345</b>	<b>331</b>	<b>316</b>

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pihak yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 126 perkara, data permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.5**  
**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA**  
**TINGKAT KASASI**

NO	SATKER	JUMLAH PERMOHONAN KASASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PA Bandung	19	
2	PA Indramayu	2	
3	PA Majalengka	2	
4	PA Sumber	1	
5	PA Ciamis	3	
6	PA Tasikmalaya	3	
7	PA Karawang	7	
8	PA Kota Cimahi	3	
9	PA Subang	4	
10	PA Sumedang	3	
11	PA Purwakarta	5	
12	PA Sukabumi	0	
13	PA Cianjur	5	
14	PA Kuningan	0	
15	PA Cibadak	4	
16	PA Cirebon	2	
17	PA Garut	1	
18	PA Bogor	6	
19	PA Bekasi	20	
20	PA Cibinong	12	
21	PA Cikarang	5	
22	PA Depok	6	

23	PA Kota Tasikmalaya	3	
24	PA Kota Banjar	0	
25	PA Soreang	5	
26	PA Ngamprah	5	
JUMLAH		126	

Dari 126 permohonan kasasi yang diajukan tahun 2020 sebanyak 103 perkara permohonan kasasi adalah permohonan kasasi terhadap putusan banding tahun 2020 (89.75 %), selebihnya yaitu 23 perkara (18,25 %) permohonan kasasi terhadap putusan banding tahun 2019 dan Permohonan Kasasi terhadap perkara voluntair, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 2.6**  
**PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BANDING**  
**SELAIN PUTUSAN TAHUN 2020 DAN TERHADAP PERKARA VOLUNTAIR**

NO	NOMOR PERKARA		TANGGAL PERMOHONAN KASASI
	TINGKAT PERTAMA	TINGKAT BANDING	
1	851/Pdt.G/2019/PA.Badg	295/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	02 Jan 2020
2	5009/Pdt.G/2018/PA.Badg	306/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	10 Jan 2020
3	2100/Pdt.G/2019/PA.Badg	312/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	21 Jan 2020
4	565/Pdt.P/2020/PA.Badg	-	01 Oct 2020
5	3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg	291/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	21 Jan 2020
6	480/Pdt.G/2019/PA.Pwk	318/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	02 Jan 2020
7	3455/Pdt.G/2018/PA.CJR	286/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	20 Jan 2020
8	0373/Pdt.G/2018/PA.Bgr	77/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	17 Jan 2020
9	0171/Pdt.G/2019/PA.Bgr	230/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	10 Aug 2020
10	2065/Pdt.G/2018/PA.Bks	60/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	03 Jan 2020
11	0014/Pdt.G/2019/PA.Bks	202/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	09 Jan 2020
12	0080/Pdt.G/2019/PA.Bks	23/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	28 Jan 2020
13	1058/Pdt.G/2019/PA.Bks	328/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	20 Feb 2020
14	5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn	276/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	10 Jan 2020

15	1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn	292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	13 Jan 2020
16	1213/Pdt.G/2019/PA.Cbn	269/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	13 Jan 2020
17	1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn	311/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	27 Jan 2020
18	6/Pdt.P/2020/PA.Ckr	-	11 Feb 2020
19	4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk	252/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	03 Feb 2020
20	0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk	321/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	08 Jun 2020
21	0511/Pdt.G/2018/PA.Sor	298/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	10 Jan 2020
22	2929/Pdt.G/2019/PA.Sor	33/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	22 Jan 2020
23	0340/Pdt.G/2018/PA.Nph	309/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	<b>28 eb 2020</b>

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pihak yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 sebanyak 12 perkara, data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.7**  
**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA**  
**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>JUMLAH PERMOHONAN PK</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PA Bandung	1	
2	PA Indramayu	0	
3	PA Majalengka	0	
4	PA Sumber	0	
5	PA Ciamis	1	
6	PA Tasikmalaya	0	
7	PA Karawang	0	
8	PA Kota Cimahi	0	
9	PA Subang	1	
10	PA Sumedang	0	
11	PA Purwakarta	1	
12	PA Sukabumi	0	



13	PA Cianjur	0	
14	PA Kuningan	0	
15	PA Cibadak	1	
16	PA Cirebon	0	
17	PA Garut	1	
18	PA Bogor	1	
19	PA Bekasi	0	
20	PA Cibinong	1	
21	PA Cikarang	3	
22	PA Depok	1	
23	PA Kota Tasikmalaya	0	
24	PA Kota Banjar	0	
25	PA Soreang	0	
26	PA Ngamprah	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	

## B. PENYELESAIAN PERKARA.

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Pada Tingkat Pertama.

Jumlah sisa perkara tahun 2019 di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebanyak **11.005** perkara, dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak .11.004 perkara.

1. Sisa perkara tahun 2019 : 11.005 perkara
2. Diselesaikan pada tahun 2020 : 11.004 perkara -  
sisa :           1 perkara

Maka dengan demikian persentase penyelesaian sisa perkara tahun 2019 dan perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 mencapai (99,99 %).

Perhitungan Persentase Penyelesaian :

$$\text{Persentase} : \frac{11.004}{11.005} \times 100 = 99,99 \%$$

Adapun rincian sisa perkara tahun 2019 yang tidak dapat dilesaikan tahun 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**TABEL 2.8**  
**SISA PERKARA TAHUN 2019 YANG BELUM PUTUS**  
**TAHUN 220**

SATKER	NO PERKARA	TGL PENERIMAAN	JENIS PERKARA
PA. Bogor	1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr	21-10-2019	Kewarisan

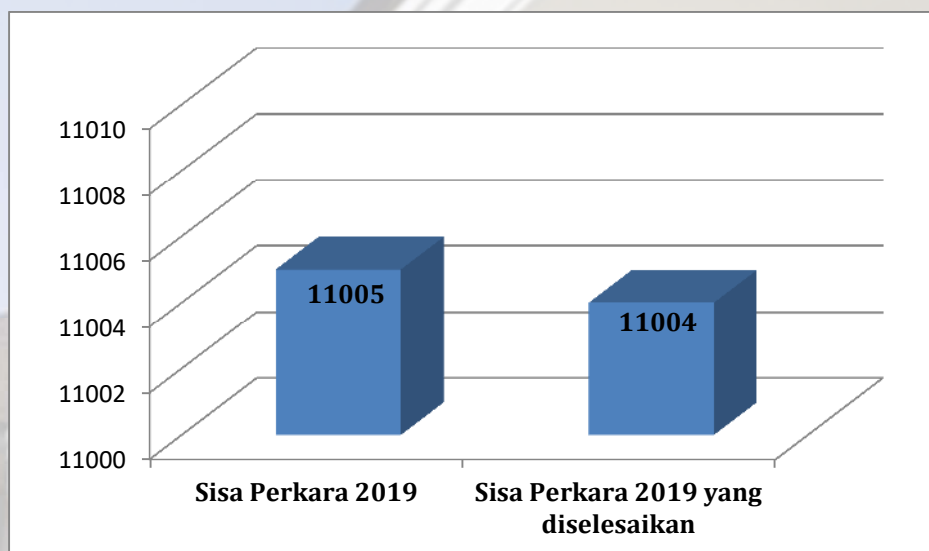
Dibawah ini tabel rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 :

**TABEL 2.9**  
**REKAPITULASI JUMLAH SISA PERKARA**  
**TAHUN 2019 YANG DI SELESAIKAN TAHUN 2020**

NO	SATKER	KEADAAN PERKARA			PERSENTASE PENYELESAIAN (%)
		SISA 2019	PUTUS 2020	SISA	
1	2	3	4	5	6
1	PA Bandung	868	868	0	100
2	PA Indramayu	1005	1005	0	100
3	PA Majalengka	336	336	0	100
4	PA Sumber	763	763	0	100
5	PA Ciamis	250	250	0	100
6	PA Tasikmalaya	224	224	0	100
7	PA Karawang	428	428	0	100
8	PA Kota Cimahi	139	139	0	100
9	PA Subang	531	531	0	100
10	PA Sumedang	291	291	0	100
11	PA Purwakarta	252	252	0	100
12	PA Sukabumi	62	62	0	100

13	PA Cianjur	310	310	0	100
14	PA Kuningan	234	234	0	100
15	PA Cibadak	289	289	0	100
16	PA Cirebon	142	142	0	100
17	PA Garut	630	630	0	100
18	PA Bogor	146	145	1	99,32
19	PA Bekasi	438	438	0	100
20	PA Cibinong	968	968	0	100
21	PA Cikarang	396	396	0	100
22	PA Depok	461	461	0	100
23	PA Kota Tasikmalaya	42	42	0	100
24	PA Kota Banjar	75	75	0	100
25	PA Soreang	1364	1364	0	100
26	PA Ngamprah	361	361	0	100
<b>JUMLAH</b>		<b>11.005</b>	<b>11.004</b>	<b>1</b>	<b>99,99</b>

**GRAFIK 2.2**  
**PENYELESAIAN SISA PERKARA PADA TK PERTAMA**



## 2. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Pada Tingkat Banding.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 226 perkara, dari jumlah yang diterima tersebut sebanyak 215 perkara dapat diselesaikan pada tahun berjalan, dengan demikian terdapat sisa perkara tahun 2019 sebanyak 11 perkara yang akan diselesaikan tahun 2020, dari jumlah sisa perkara tersebut semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2020.

1. Sisa perkara tahun 2019 : 11 perkara
2. Diselesaikan pada tahun 2020 : 11 perkara -  
sisa : 0 perkara

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, target penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 11 perkara dapat tercapai, dengan persentase penyelesaian mencapai 100 %.

Perhitungan Persentase Penyelesaian Sisa perkara:

$$\text{Persentase} : \frac{11}{11} \times 100 = 100 \%$$

**TABEL 2.10**  
**DATA PENYELESAIAN SISA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

N O M O R		T A N G G A L	
URUT	PERKARA	REGISTER	PUTUS
1	117/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	29-4-2019	15-1-2020
2	217/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	27-8-2019	12-8-2020
3	249/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	01-10-2019	22-1-2020
4	270/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	23-10-2019	17-3-2020
5	275/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	04-11-2019	26-3-2020
6	313/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	06-12-2019	09-1-2020
7	314/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	06-12- 2019	30-1-2020



8	324/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	11-12-2019	09-1-2020
9	332/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	19-12-2019	09-1-2020
10	333/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	1912-2019	08-1-2020
11	337/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	26-12-2019	30-1-2020

### 3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Tingkat Pertama

Sesuai dengan ketentuan SEMA No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa Penyelesaian perkara Pada Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berhasil menyelesaikan perkara sebanyak **123.025** perkara, dari Jumlah perkara yang diselesaikan tersebut sebanyak **120.944** berhasil diselesaikan tepat waktu dengan persentase 98,31%, sedangkan sisanya sebanyak **2.081** perkara, diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan.

Perhitungan persentase Perkara yang diputus tepat waktu :

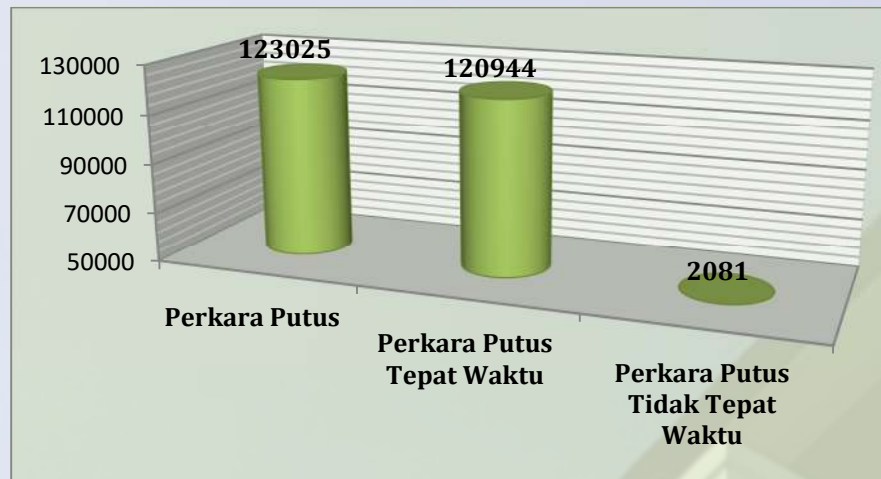
$$\text{Persentase} : \frac{120.944}{123.025} \times 100 = 98,31 \%$$

TABEL 2.11  
REKAPITULASI DATA PERKARA YANG DIPUTUS  
TEPAT WAKTU

NO	SATKER	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	PA Bandung	7.357	7.157	97,28
2	PA Indramayu	9.471	9.417	99,43
3	PA Majalengka	5.015	5.006	99,82

4	PA Sumber	8.315	8.246	99,17
5	PA Ciamis	6.638	6.612	99,61
6	PA Tasikmalaya	5.916	5.897	99,68
7	PA Karawang	4.849	4.825	99,51
8	PA Kota Cimahi	1.533	1.499	97,78
9	PA Subang	5.249	5.199	99,05
10	PA Sumedang	5.014	4.948	98,68
11	PA Purwakarta	2.959	2.944	99,49
12	PA Sukabumi	938	936	99,79
13	PA Cianjur	5.639	5.610	99,49
14	PA Kuningan	3.441	3.409	99,07
15	PA Cibadak	3.283	3.247	98,90
16	PA Cirebon	1.238	1.228	99,19
17	PA Garut	6.628	6.546	98,76
18	PA Bogor	1.960	1.847	94,23
19	PA Bekasi	4.493	4.390	97,71
20	PA Cibinong	7.177	6.806	94,83
21	PA Cikarang	3.929	3.846	97,89
22	PA Depok	4.341	4.163	95,90
23	PA Kota Tasikmalaya	2.761	2.750	99,60
24	PA Kota Banjar	1.024	1.023	99,90
25	PA Soreang	9.743	9.401	96,49
26	PA Ngamprah	4.114	3.992	97,03
<b>JUMLAH</b>		<b>123.025</b>	<b>120.944</b>	<b>98,31</b>

**GRAFIK 2.3  
PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU  
PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT**



#### 4. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Tingkat Banding

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutus perkara sebanyak 305 perkara (98,39 %) dari perkara yang diterima sebanyak 310 perkara, sisa 5 perkara (91.61 %).

Dari perkara yang diputus tersebut sebanyak 302 perkara (99,02 %) diputus tepat waktu sesuai dengan ketentuan SEMA No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa Penyelesaian perkara Pada Tingkat banding paling lama dalam waktu 3 (bulan) bulan, maka dengan demikian Target penyelesaian perkara tepat waktu seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 96 % dapat tercapai.

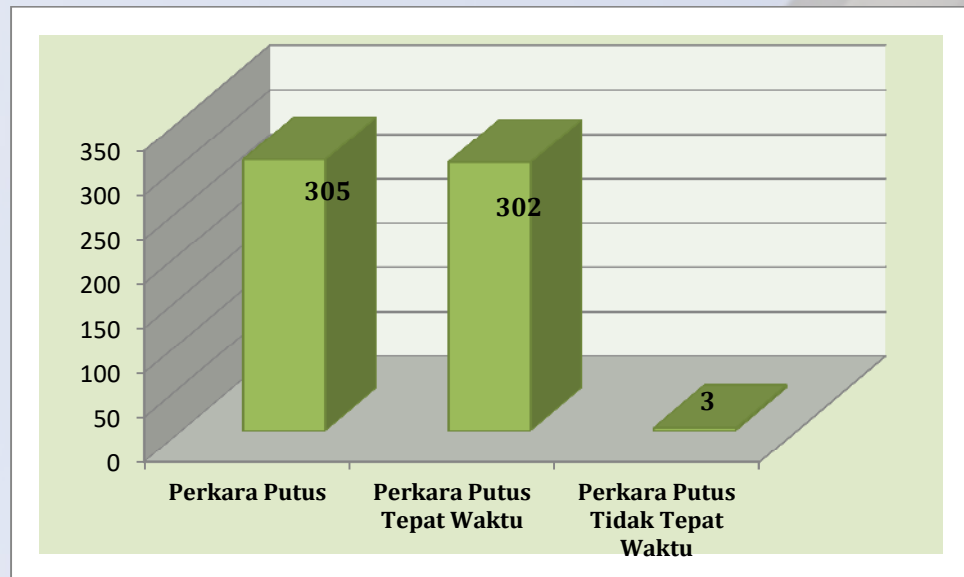
Perhitungan persentase Perkara yang diputus tepat waktu :

$$\text{Persentase} : \frac{302}{305} \times 100 = 99,02 \%$$

**TABEL 2.12**  
**REKAPITULASI JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

<b>JUMLAH PUTUS</b>	<b>JUMLAH PUTUS &lt; 3 BULAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
<b>305</b>	<b>302</b>	<b>99,02</b>

**GRAFIK 2.4**  
**PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**



Adapun 3 (tiga) perkara yang diputus tidak tepat waktu disebabkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk membuka kembali sidang, adapun tiga perkara tersebut sebagaimana tabel di bawah in :



**TABEL 2.13  
PERKARA YANG DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU**

NOMOR		TANGGAL		
URUT	PERKARA	REGISTER	PUTUSAN SELA	PUTUSAN AKHIR
1	50/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	10-02-2020	18-03-2020	10-12-2020
2	173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	15-06-2020	08-07-2020	30-09-2020
3	190/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	13-07-2020	19-8-2020	3-12-2020

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pada tahun 2020 ada 5 (lima) perkara yang belum diputus, rincian perkara yang belum putus tersebut sebagaimana tabel dibawah ini :

**TABEL 2.14  
SISA PERKARA BANDING TAHUN 2020**

NOMOR		TANGGAL REGISTER
URUT	PERKARA	
1	307/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	15-12-2020
2	309/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	15-12-2020
3	305/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	15-12-2020
4	284/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	24-11-2020
5	264/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	27-10-2020

**5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk Tingkat Pertama**

Pengadilan tingkat pertama se - wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2020 memutus perkara sebanyak **123.025** perkara dan dari jumlah perkara yang putus tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

1. Banding : 122.715 perkara
2. Kasasi : 122.899 perkara

3. PK : 123.009 perkara

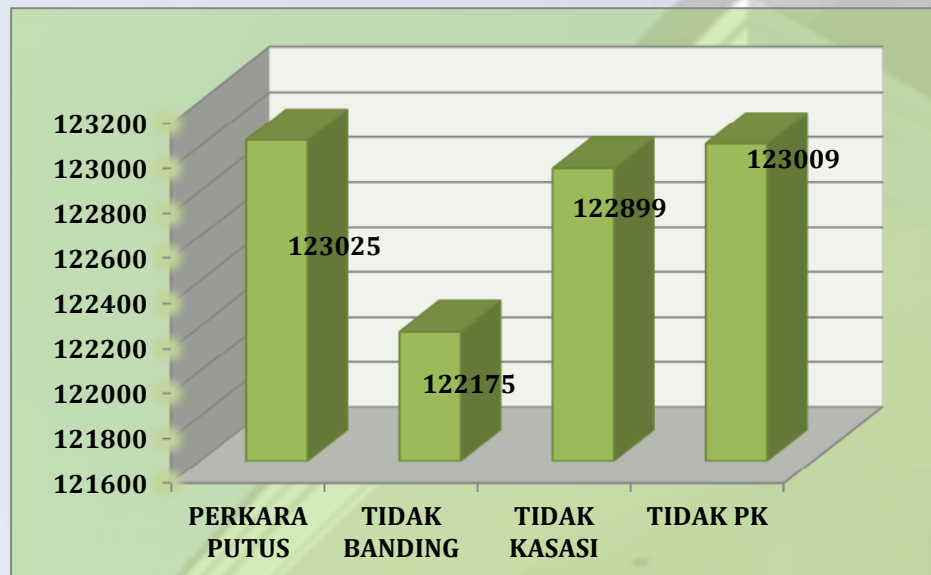
Rincian data perkara tersebut tersebut tertuang dalam tabel dibawah ini

**TABEL 2.15**  
**JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING,**  
**KASASI DAN PK PADA PENGADILAN AGAMA**  
**SE - WILAYAH JAWA BARAT**

NO	SATKER	PUTUS	TIDAK BANDING		TIDAK KASASI		TIDAK PK	
			JML	%	JML	%	JML	%
1	PA Bandung	7357	7310	99,36	7338	99,98	7356	99,99
2	PA Indramayu	9471	9459	99,87	9469	99,96	9471	100,00
3	PA Majalengka	5015	5010	99,90	5013	99,99	5015	100,00
4	PA Sumber	8315	8305	99,88	8314	99,95	8315	100,00
5	PA Ciamis	6638	6631	99,89	6635	99,95	6637	99,98
6	PA Tasikmalaya	5916	5911	99,92	5913	99,86	5916	100,00
7	PA Karawang	4849	4833	99,67	4842	99,80	4849	100,00
8	PA Kota Cimahi	1533	1524	99,41	1530	99,92	1532	99,93
9	PA Subang	5249	5240	99,83	5245	99,94	5248	99,98
10	PA Sumedang	5014	5010	99,92	5011	99,83	5014	100,00
11	PA Purwakarta	2959	2954	99,83	2954	100,00	2957	99,93
12	PA Sukabumi	938	936	99,79	938	99,91	937	99,89
13	PA Cianjur	5639	5628	99,80	5634	100,00	5639	100,00
14	PA Kuningan	3441	3438	99,91	3441	99,88	3441	100,00
15	PA Cibadak	3283	3274	99,73	3279	99,84	3282	99,97
16	PA Cirebon	1238	1234	99,68	1236	99,98	1238	100,00
17	PA Garut	6628	6618	99,85	6627	99,69	6627	99,98
18	PA Bogor	1960	1944	99,18	1954	99,55	1958	99,90
19	PA Bekasi	4493	4459	99,24	4473	99,83	4493	100,00
20	PA Cibinong	7177	7155	99,69	7165	99,87	7176	99,99
21	PA Cikarang	3929	3913	99,59	3924	99,86	3926	99,92
22	PA Depok	4341	4318	99,47	4335	99,89	4340	99,98

23	PA Kota Tasikmalaya	2761	2754	99,75	2758	100,00	2761	100,00
24	PA Kota Banjar	1024	1021	99,71	1024	99,95	1024	100,00
25	PA Soreang	9743	9730	99,87	9738	99,88	9743	100,00
26	PA Ngamprah	4114	4106	99,81	4109	99,98	4114	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>123.025</b>	<b>122.175</b>	<b>99,81</b>	<b>122.899</b>	<b>99,90</b>	<b>123.009</b>	<b>99,99</b>

**GRAFIK 2.5**  
**JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN**  
**UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK**  
**PENGADILAN AGAMA SE - JAWA BARAT**



**Tingkat Banding.**

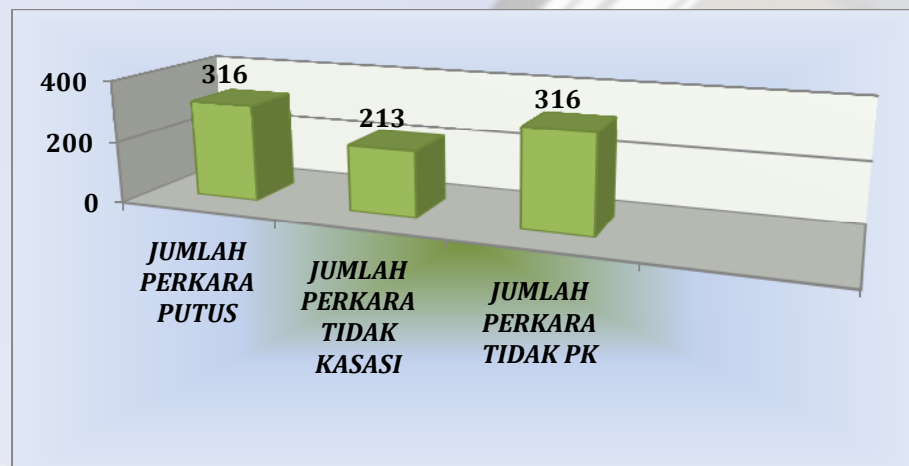
Pada tahun 2020 perkara banding yang diputus sebanyak 316 perkara dan dari jumlah perkara yang putus tersebut, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 213 perkara (67,41 %) dan yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 316 perkara (100 %).

Rincian jumlah perkara banding yang putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK tersebut diatas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**TABEL 2.16**  
**JUMLAH PERKARA BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN**  
**UPAYA HUKUM KASASI DAN PK**

JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA TIDAK KASASI	PERSENTASE %	JUMLAH PERKARA TIDAK PK	PERSENTASE %
316	213	67,41	316	100

**GRAFIK 2.6**  
**JUMLAH PERKARA BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN**  
**UPAYA HUKUM KASASI DAN PK**



#### 6. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi

Bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 120.287 perkara, dari jumlah perkara yang yang diterima tersebut sebanyak 7.895 perkara diproses melalui mediasi dan mediasi yang berhasil sebanyak 1.668 perkara atau sebesar 21,13 %



Perhitungan Persentase :

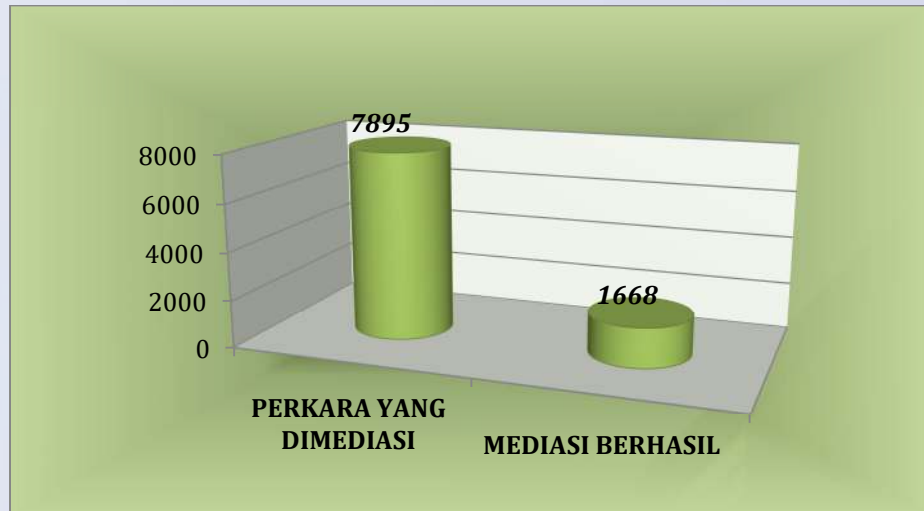
$$\text{Persentase} : \frac{1668}{7895} \times 100 = 21,13 \%$$

Adapun jumlah tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 2.17**  
**JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT**

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA		PERSENTASE %
		DIMEDIASI	BERHASIL DIMEDIASI	
1	PA BANDUNG	609	111	18,23
2	PA INDRAMAYU	412	97	23,54
3	PA MAJALENGKA	239	58	24,27
4	PA SUMBER	439	60	13,67
5	PA CIAMIS	175	42	24,00
6	PA TASIKMALAYA	91	22	24,18
7	PA KARAWANG	227	52	22,91
8	PA KOTA CIMAHI	162	38	23,46
9	PA SUBANG	247	48	19,43
10	PA SUMEDANG	118	23	19,49
11	PA PURWAKARTA	176	33	18,75
12	PA SUKABUMI	111	25	22,52
13	PA CIANJUR	381	46	12,07
14	PA KUNINGAN	169	34	20,12
15	PA CIBADAK	192	36	18,75
16	PA CIREBON	137	32	23,36
17	PA GARUT	300	48	16,00
18	PA BOGOR	238	86	36,13
19	PA BEKASI	661	230	34,80
20	PA CIBINONG	503	122	24,25
21	PA CIKARANG	577	86	14,90
22	PA DEPOK	836	113	13,52
23	PA KOTA TASIKMALAYA	173	65	37,57
24	PA KOTA BANJAR	62	20	32,26
25	PA SOREANG	473	97	20,51
26	PA NGAMPRAH	187	44	23,53
<b>JUMLAH</b>		<b>7.895</b>	<b>1.668</b>	<b>21,13</b>

**GRAFIK 2.7**  
**PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT**



### **C. PENATAAN ARSIP PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA.**

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 383 HIR dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kersipan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama serta makin meningkatnya permintaan informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik maka diperlukan adanya pengelolaan informasi secara efektif dan efisien yang salah satu sumber informasi terpentingnya adalah Arsip.

Kondisi arsip perkara terutama arsip perkara dari mulai berdirinya Pengadilan Agama sampai dengan arsip tahun 2009 di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada umumnya tidak tertata dengan baik, sehingga perlu dikelola dan ditata secara sistematis, efektif dan efisien, sehingga penemuan kembali arsip dapat dilakukan secara cepat dan mudah apabila

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan dan pihak-pihak berkepentingan, sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan kegiatan penataan arsip perkara pada Pengadilan Agama secara sistematis, efektif dan efisien. Selain itu, penataan arsip perkara tersebut dimaksudkan juga untuk menghemat biaya dan tempat penyimpanan, memantapkan pemeliharaan arsip yang bernilai permanen dan bernilai guna serta memudahkan penemuan kembali (temu balik) arsip.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membuat Surat Edaran Nomor W10-A/1676/OT/01.2/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Retensi Arsip Perkara. Pada tahun 2020 seluruh pengadilan agama se – wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah melakukan penataan arsip perkara kecuali 4 (empat) Pengadilan Agama yang baru yaitu :

1. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Pengadilan Agama Soreang dan
4. Pengadilan Agama Ngamprah.

Arsip yang ditata adalah arsip perkara dari mulai berdirinya Pengadilan Agama sampai dengan arsip tahun 2009. Adapun kegiatan penataan arsip perkara dilakukan dengan cara bertahap, tahapan retensi arsip sebagai berikut :

1. Menetapkan target dokumentasi/berkas yang akan diretensi dan menyusun jadwal pelaksanaan retensi;
2. Menemukan dan mengumpulkan dokumen/berkas yang akan diretensi berupa :
  - Buku Induk Register perkara;
  - Berkas dokumen/berkas (sejak berdirinya Pengadilan Agama yang bersangkutan).
3. Mengelompokkan dokumen/berkas yang telah ditemukan berdasarkan tahun dan jenis perkara (Volunter dan Contentius);

4. Mensortir dan memilah dengan cermat kemudian mengambil berkas perkara dari bundel, berupa:
  - Asli atau Salinan Putusan/Penetapan;
  - Akta Cerai (AC) atau Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3);
5. Menyusun dan mengelompokkan Putusan/Penetapan (Asli atau Salinan), AC dan SKT3 berdasarkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkan;
6. Memasukkan (input) data perkara ke dalam komputer dengan format yang bersumber dari Putusan/Penetapan (Asli atau Salinan), AC, SKT3 atau dari Buku Induk Register Perkara.
8. Membuat duplikat Putusan/Penetapan, AC, SKT3 dalam bentuk file digital (apabila sarana memungkinkan);
10. Menyusun Putusan/Penetapan (Asli atau Salinan), AC, SKT3 yang datanya telah diinput ke dalam komputer dengan cara dijilid atau dibukukan berdasarkan tahun dengan ketentuan :
  - Isi setiap jilid/buku paling sedikit 25 (dua puluh lima) set dan paling banyak 50 (lima puluh) set;
  - Setiap jilid/buku dibuat daftar isi berkas;
  - Setiap jilid/buku diberi nomor urut dan nomor perkara.
11. Menyusun dan menyimpan berkas yang sudah dijilid/dibukukan pada rak arsip;
12. Membuat berita acara jenis dokumen/berkas perkara yang telah diretensi (format terlampir);
13. Memusnahkan berkas perkara yang tidak mempunyai nilai guna yang telah disortir dengan cara dihancurkan dengan mesin pemotong/penghancur kertas;

Dibawah ini tabel hasil penataan arsip perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.



**TABEL 2.18**  
**REKAP RETENSI ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**

NO	SATKER	TAHUN	JUMLAH BERKAS				
			SUDAH DI DIPILAH	SUDAH DI JILID		BELUM DI JILID	
				PERKARA	BUKU		
1	PA BANDUNG	1994-2009	38987 PERKARA	28474	569	10513	PERKARA
2	PA INDRAMAYU	1990-2009	65334 PERKARA	30234	605	35010	PERKARA
3	PA MAJALENGKA	1997-2010	35847 PERKARA	32333	620	3514	PERKARA
4	PA SUMBER	1990-2009	41925 PERKARA	35100	702	6825	PERKARA
5	PA CIAMIS	1994-2011	24085 PERKARA	54200	1084	40525	PERKARA
6	PA TASIKMALAYA	1981-2009	55070 PERKARA	36250	725	44396	PERKARA
7	PA KARAWANG	1955-1992	11471 PERKARA	11471	229	0	PERKARA
8	PA KOTA CIMAHI	1980-2020	64774 PERKARA	64174	1283	600	PERKARA
9	PA SUBANG	2001-2009	14713 PERKARA	14550	291	0	PERKARA
10	PA SUMEDANG	1982-2011	18045 PERKARA	36085	722	3047	PERKARA
11	PA PURWAKARTA	1979-1988	10000 PERKARA	10000	200	0	PERKARA
12	PA SUKABUMI	1967-2009	7783 PERKARA	7784	156	0	PERKARA
13	PA CIANJUR	1994-2009	2877 PERKARA	2878		0	PERKARA
14	PA KUNINGAN	1980-2004	23153 PERKARA	23153	463	0	PERKARA
15	PA CIBADAK	1987-2009	3250 PERKARA	3250	65	0	PERKARA
16	PA CIREBON	1990-2009	10100 PERKARA	10100	202	0	PERKARA
17	PA GARUT	1956-2009	15100 PERKARA	9450	189	5650	PERKARA



18	PA BOGOR	1932-2020	58662 PERKARA	45968	919	12694	PERKARA
19	PA BEKASI	1951-2011	23152 PERKARA	10651	213	12501	PERKARA
20	PA CIBINONG	1997-2009	12350 PERKARA	12350	247	0	PERKARA
21	PA CIKARANG	1999-2015	13707 PERKARA	4969	100	8738	PERKARA
22	PA DEPOK	Sampai 2020	6365 PERKARA	4000	80	900	PERKARA
<b>JUMLAH</b>			<b>556750 PERKARA</b>	<b>487.424</b>	<b>9.664</b>	<b>184.913</b>	<b>PERKARA</b>

#### **D. LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Salah satu program pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan merupakan kegiatan prioritas nasional dan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang meliputi :

##### **1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)**

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau masyarakat pencari keadilan golongan tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dan berlaku pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat Kasasi dan tingkat PK.

Untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat layanan pembebasan biaya perkara diberikan kepada seluruh Pengadilan Agama dengan Pagu anggaran yang bervariasi. Dalam pelaksanaan anggaran layanan pembebasan biaya

perkara (prodeo) selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 2.18**  
**REALISASI ANGGARAN PRODEO**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SE - WILAYAH JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA
1	PA BANDUNG	43.750.000	43.750.000	-
2	PA SUMEDANG	39.000.000	38.660.000	340.000
3	PA KOTA CIMAHI	153.000.000	152.830.000	170.000
4	PA CIAMIS	37.200.000	37.200.000	
5	PA TASIKMALAYA	33.000.000	33.000.000	-
6	PA GARUT	39.000.000	38.192.000	808.000
7	PA BOGOR	7.500.000	7.500.000	-
8	PA SUKABUMI	7.650.000	7.650.000	-
9	PA CIANJUR	80.100.000	79.970.000	130.000
10	PA CIREBON	9.800.000	9.800.000	-
11	PA INDRAMAYU	10.500.000	10.188.000	312.000
12	PA MAJALENGKA	10.500.000	10.500.000	-
13	PA KUNINGAN	30.420.000	30.420.000	-
14	PA BEKASI	4.590.000	4.590.000	-
15	PA KARAWANG	138.960.000	134.710.000	4.250.000
16	PA PURWAKARTA	12.950.000	12.950.000	-
17	PA SUBANG	21.000.000	20.906.000	94.000
18	PA CIBADAK	42.600.000	42.428.000	172.000
19	PA SUMBER	17.370.000	17.305.000	65.000
20	PA CIBINONG	15.000.000	14.828.000	172.000
21	PA CIKARANG	9.250.000	9.250.000	-
22	PA DEPOK	35.100.000	35.087.000	13.000
23	PA KOTA TASIKMALAYA	21.000.000	21.000.000	-
24	PA KOTA BANJAR	19.800.000	19.800.000	-
25	PA SOREANG	61.200.000	61.057.000	143.000

26	PA NGAMPRAH	39.474.000	39.474.000	-
<b>JUMLAH</b>		<b>939.714.000</b>	<b>933.045.000</b>	<b>6.669.000</b>

## 2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan / Sidang Terpadu

Sidang Di Luar Gedung Pengadilan / Sidang Terpadu adalah Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu - waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dan berlaku hanya di Pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, keterbatasan fisik atau kendala geografis, sehingga Mahkamah Agung RI menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan demi tercapainya azas “Perkara sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat anggaran sidang di luar gedung pengadilan diberikan kepada 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama kecuali Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Kota Banjar, dikarena cakupan wilayahnya relatif mudah dijangkau, sedangkan untuk kegiatan sidang terpadu hanya diberikan kepada 3 (tiga) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Subang dan Pengadilan Agama Cikarang.

Dalam pelaksanaan anggaran sidang di luar gedung pengadilan dan sidang terpadu, serapan anggaran selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.19  
REALISASI ANGGARAN SIDANG KELILING  
PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA SUMEDANG	29.750.000	29.590.000	160.000	302 Perkara
2	PA CIAMIS	126.000.000	126.000.000	-	1.008 Perkara
3	PA TASIKMALAYA	141.980.000	141.980.000	-	2.200 Perkara
4	PA GARUT	51.970.000	51.970.000	-	335 Perkara
5	PA CIANJUR	47.000.000	44.250.000	2.750.000	353 Perkara
6	PA INDRAMAYU	42.960.000	40.500.000	2.460.000	386 Perkara
7	PA MAJALENGKA	37.166.000	37.152.000		225 Perkara
8	PA KUNINGAN	20.620.000	20.620.000	-	50 Perkara
9	PA KARAWANG	34.000.000	31.300.000	2.700.000	345 Perkara
10	PA PURWAKARTA	18.400.000	17.960.000	-	336 Perkara
11	PA SUBANG	35.000.000	35.000.000	-	120 Perkara
12	PA CIBADAK	52.200.000	52.175.000	25.000	325 Perkara
13	PA SUMBER	35.000.000	35.000.000	-	- Perkara
14	PA CIBINONG	45.000.000	44.245.000	755.000	50 Perkara
15	PA CIKARANG	29.250.000	28.928.000	322.000	93 Perkara
16	PA SOREANG	16.490.000	16.340.000	150.000	182 Perkara
17	PA NGAMPRAH	10.500.000	10.500.000	-	140 Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>773.286.000</b>	<b>763.510.000</b>	<b>9.322.000</b>	<b>6.712 Perkara</b>

**TABEL 2.20  
REALISASI ANGGARAN SIDANG TERPADU  
PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA SUBANG	13.000.000	11.130.000	1.870.000	80 Perkara
2	PA SUBANG	13.000.000	11.130.000	1.870.000	80 Perkara
3	PA CIKARANG	27.000.000	24.667.000	2.333.000	40 Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>70.000.000</b>	<b>58.597.000</b>	<b>11.403.000</b>	<b>170 Perkara</b>



### 3. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Layanan Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada tahun anggaran 2020 seluruh satuan kerja dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mendapat anggaran Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.21**  
**REALISASI ANGGARAN POSBAKUM**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA BANDUNG	80.000.000	80.000.000	-	800 Jam Layanan
2	PA SUMEDANG	30.000.000	30.000.000	-	300 Jam Layanan
3	PA KOTA CIMAHI	60.000.000	60.000.000	-	600 Jam Layanan
4	PA CIAMIS	78.800.000	78.800.000	-	800 Jam Layanan
5	PA TASIKMALAYA	47.000.000	47.000.000	-	500 Jam Layanan
6	PA GARUT	40.000.000	40.000.000	-	400 Jam Layanan
7	PA BOGOR	40.000.000	40.000.000	-	400 Jam Layanan
8	PA SUKABUMI	35.000.000	35.000.000	-	350 Jam Layanan
9	PA CIANJUR	70.000.000	69.999.600	400	700 Jam Layanan
10	PA CIREBON	30.000.000	30.000.000	-	300 Jam Layanan



11	PA INDRAMAYU	70.000.000	70.000.000	-	700	Jam Layanan
12	PA MAJALENGKA	50.000.000	50.000.000	-	500	Jam Layanan
13	PA KUNINGAN	40.000.000	40.000.000	-	400	Jam Layanan
14	PA BEKASI	38.400.000	38.400.000	-	384	Jam Layanan
15	PA KARAWANG	64.500.000	64.500.000	-	645	Jam Layanan
16	PA PURWAKARTA	30.000.000	30.000.000	-	300	Jam Layanan
17	PA SUBANG	45.000.000	45.000.000	-	450	Jam Layanan
18	PA CIBADAK	40.000.000	39.996.000	4.000	400	Jam Layanan
19	PA SUMBER	80.000.000	80.000.000	-	800	Jam Layanan
20	PA CIBINONG	49.800.000	49.800.000	-	498	Jam Layanan
21	PA CIKARANG	47.800.000	47.800.000	-	478	Jam Layanan
22	PA DEPOK	48.000.000	48.000.000	-	600	Jam Layanan
23	PA KOTA TASIKMALAYA	24.000.000	23.449.500	550.500	243	Jam Layanan
24	PA KOTA BANJAR	24.000.000	23.935.500	64.500	243	Jam Layanan
25	PA SOREANG	60.000.000	60.000.000	-	600	Jam Layanan
26	PA NGAMPRAH	50.000.000	50.000.000	-	500	Jam Layanan
<b>JUMLAH</b>		<b>1.272.300.000</b>	<b>1.271.680.600</b>	<b>619.400</b>	<b>12.891</b>	<b>Jam Layanan</b>

### **BAB III**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN.**

Kedudukan dan peranan SDM adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di Lingkungan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.

Dibidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di tingkat Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan terjawantahkan dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*) demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja aparatur peradilan agama serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Secara umum Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Agama yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Barat Per 31 Desember 2020 sebanyak 967 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO	UNIT KERJA	KLS	JUMLAH PERSONIL			KET
			TOTAL	L	P	
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	-	58	20	38	
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	IA	55	35	20	
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	IA	45	35	10	
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	IA	35	26	9	
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	IA	48	35	13	
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	IA	42	30	12	
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	IA	37	27	10	
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	IA	32	21	11	
9	PENGADILAN AGAMA CIMAHI	IA	23	13	10	
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	IA	32	18	14	
11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	IA	34	28	6	
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	IA	31	22	9	
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	IA	38	31	7	
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	IA	37	18	19	
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	IA	45	24	21	
16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	IA	52	33	19	
17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	IA	54	30	24	
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	IB	28	18	10	
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	IB	17	14	3	
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	IB	34	24	10	
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	IB	21	18	3	
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	IB	23	15	8	
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	IB	33	21	12	
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	II	17	12	5	
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	II	23	15	8	
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	II	47	36	11	
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	II	26	19	7	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>967</b>	<b>657</b>	<b>310</b>	

Dari jumlah tenaga yang ada peta kekuatan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama se wilayah Jawa Barat dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan diproses di masing-masing satker sebagai beban kerja yang harus dipertanggungjawabkan masih dirasakan sangat kurang memadai dan belum berimbang antara satker yang satu dengan yang lainnya. Pada bagian selanjutnya akan kami laporkan jumlah pegawai yang ada berdasarkan komposisi yang sudah tersebar di masing-masing satker.

Salah satu kondisi yang dapat mendukung tercapainya manajemen SDM yang efektif dan efisien antara lain adanya komposisi pegawai yang profesional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan komposisi SDM yang seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa beban kerja yang ada, maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan tujuan lembaga bisa diarahkan dan dicapai dengan maksimal, demikian sebaliknya apabila komposisi tenaga SDM yang tidak seimbang akan menjadi preseden buruk dalam pencapaian visi dan misi lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut kami laporkan komposisi SDM Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dari beberapa aspek, sehingga dapat tergambar kondisi SDM yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

Tenaga Teknis Yustisial adalah sumber daya manusia pada Peradilan yang memiliki peranan yang sangat strategis yang bertugas melaksanakan semua tugas teknis yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, antara lain Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Berikut kami sampaikan Tenaga Teknis pada Peradilan di lingkungan PTA Jawa Barat.



**TABEL 3.2**  
**KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS**  
**PADA PTA DAN PA DI WILAYAH JAWA BARAT**

**1. Formasi Ketua, Wakil Ketua, dan Pejabat Kepaniteraan**

No	Satuan Kerja	Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Wapan	Panmud
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	1	1	1	-	2
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	1	0	1	-	3
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	1	1	1	-	3
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	1	0	1	-	3
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	1	0	1	-	3
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	1	0	1	-	3
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	1	1	1	-	3
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	1	1	1	-	3
9	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	1	1	1	-	3
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	1	1	1	-	3
11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	1	1	1	-	3
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	1	1	1	-	3
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	1	1	1	-	3
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	1	1	1	-	3
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	1	1	1	-	3
16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	1	1	1	-	3
17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	1	1	1	-	3
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	1	1	1	-	3
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	1	1	1	-	3
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	1	1	1	-	3
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	1	1	1	-	3
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	1	1	1	-	3
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	1	1	1	-	3
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	1	1	1	-	3
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	1	1	1	-	3
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	1	1	1	-	3
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	1	1	1	-	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>80</b>



## 2. Komposisi Jumlah Hakim, PP dan JS/JSP

No	Satuan Kerja	Kls	Tenaga Teknis Yustisial		
			Hakim	PP	JS/JSP
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	-	18	15	-
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	I A	20	15	7
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	I A	16	9	8
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	I A	10	8	5
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	I A	12	10	12
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	I A	13	7	11
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	I A	11	8	5
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	I A	11	4	5
9	PENGADILAN AGAMA CIMAHI	I A	4	6	1
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	I A	9	7	3
11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	I A	8	7	8
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	I A	7	6	5
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	I A	13	7	6
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	I A	14	6	4
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	I A	12	9	11
16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	I A	19	13	8
17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	I A	18	10	9
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	I B	7	8	2
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	I B	4	2	1
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	I B	8	10	3
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	I B	3	6	2
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	I B	3	6	3
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	I B	8	8	6
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	II	3	2	1
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	II	6	5	2
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	II	17	11	5
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	II	7	5	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>263</b>	<b>211</b>	<b>135</b>

Berdasarkan komposisi jumlah tenaga Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dia atas jika dikaitkan dengan jumlah tenaga teknis yang ideal berdasarkan SK KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan masih sangat jauh kekurangannya dan belum profesional perbandingan jumlahnya;

Selain tenaga teknis, SDM peradilan juga mencakup SDM Non Teknis yang meliputi Pejabat Struktural dan Pelaksana. Berikut kami laporkan kondisi SDM Non Teknis pada Peradilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat :

**TABEL 3.3**  
**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUSTISIAL**  
**SE WILAYAH PTA JAWA BARAT**

No	Satuan Kerja	Kls	Sekretaris	Kabag	Kasubag	Pelaksana
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	-	1	2	4	13
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	IA	1	-	3	4
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	IA	1	-	3	2
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	IA	1	-	3	3
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	IA	1	-	3	5
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	IA	1	-	3	2
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	IA	1	-	3	3
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	IA	1	-	3	2
9	PENGADILAN AGAMA CIMAHI	IA	1	-	3	2
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	IA	1	-	3	3
11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	IA	1	-	3	1
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	IA	1	-	3	2
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	IA	1	-	3	3
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	IA	1	-	3	3
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	IA	1	-	3	3
16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	IA	1	-	3	2

17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	IA	1	-	3	7
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	IB	1	-	3	1
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	IB	1	-	3	0
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	IB	1	-	3	3
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	IB	1	-	3	0
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	IB	1	-	2	2
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	IB	1	-	3	1
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	II	1	-	3	1
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	II	1	-	3	0
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	II	1	-	3	4
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	II	1	-	3	3
<b>JUMLAH</b>			<b>27</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>75</b>

Dari daftar di atas menunjukkan bahwa jabatan Non Teknis terutama jabatan struktural terdapat satu Pengadilan Agama yang belum lengkap yaitu Pengadilan Agama Cirebon. Sedangkan jumlah tenaga pelaksana di atas sebanyak 75 orang

Kepangkatan dan kompetensi pegawai menjadi syarat untuk menempuh jenjang karier secara bertahap. Kompetensi pegawai bisa didapat dari latar belakang pendidikan formal maupun diklat fungsional maupun diklat teknis saat telah menjadi pegawai.

A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan;

Pangkat dan Golongan merupakan bagian penting dari sebuah prestasi Pegawai Negeri Sipil, karena pada hakekatnya Pangkat dan Golongan merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi baik dan telah memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya. Kenaikan Pangkat dan Golongan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

untuk PNS dan PP Nomor 41 Tahun 2002 untuk Kenaikan Pangkat Hakim.

Pangkat dan Golongan juga menjadi syarat untuk menduduki satu jenjang jabatan di lingkungan Peradilan baik struktural maupun jabatan teknis, di samping memiliki kompetensi sebagai bagian dari merit sistem dalam pengembangan karier pegawai sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Berdasarkan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Jawa Barat yang berjumlah 990 pegawai, yang terdiri dari Hakim dan PNS, kami sajikan komposisi SDM berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagaimana daftar di bawah ini :

**TABEL 3.4**  
**KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG**  
**PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN / RUANG				JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	-	2	25	31	58
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	-	4	27	24	55
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	-	1	24	20	45
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	-	2	20	13	35
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	-	3	29	16	48
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	-	5	21	16	42
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	-	3	16	18	37
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	-	1	14	17	32
9	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	-	2	13	8	23
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	-	1	18	13	32

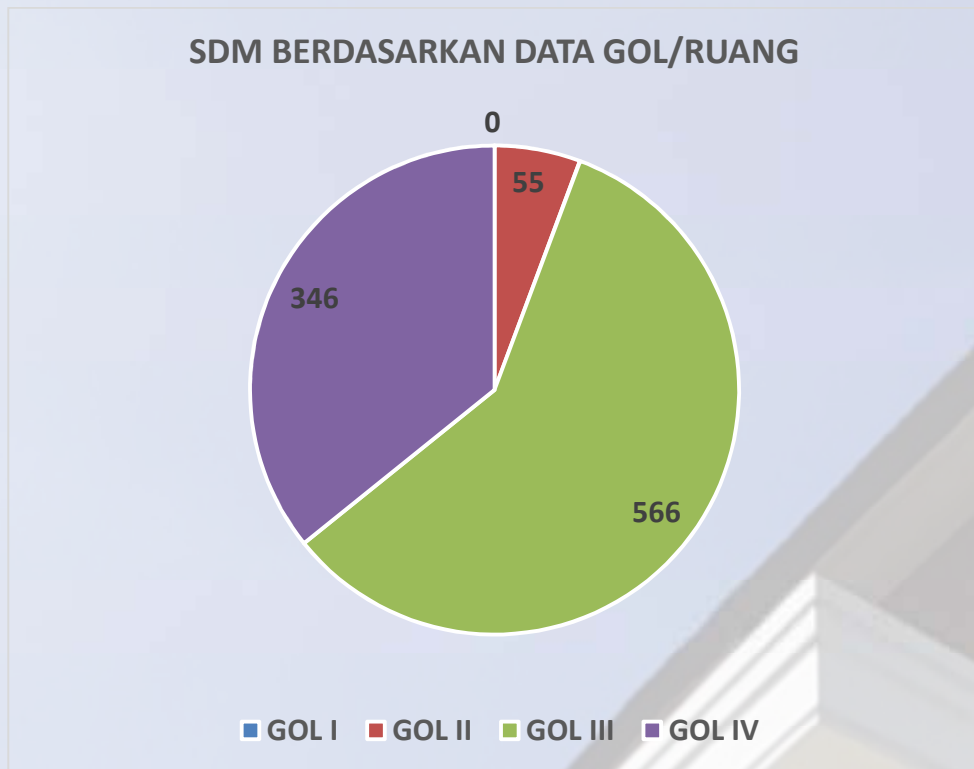


11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	-	3	18	13	34
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	-	0	20	11	31
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	-	4	17	17	38
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	-	2	17	18	37
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	-	5	23	17	45
16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	-	4	25	23	52
17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	-	3	29	18	54
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	-	2	21	5	28
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	-	1	9	7	17
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	-	1	23	10	34
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	-	0	14	7	21
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	-	0	17	6	23
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	-	1	26	6	33
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	-	0	15	2	17
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	-	1	20	2	23
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	-	3	42	2	47
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	-	1	23	2	26
<b>J U M L A H</b>		-	<b>55</b>	<b>566</b>	<b>346</b>	<b>967</b>

Dari uraian diatas dapat divisualisasikan dalam grafik berikut :

**GRAFIK 3.1**  
**KOMPOSISI SDM BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**





**B. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.**

Latar belakang pendidikan formal yang dimiliki menjadi identitas seorang pegawai kemana arah jenjang karirnya akan dibina, sehingga pendidikan merupakan bagian yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian bagai kepegawaian dalam pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berdasarkan komposisi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

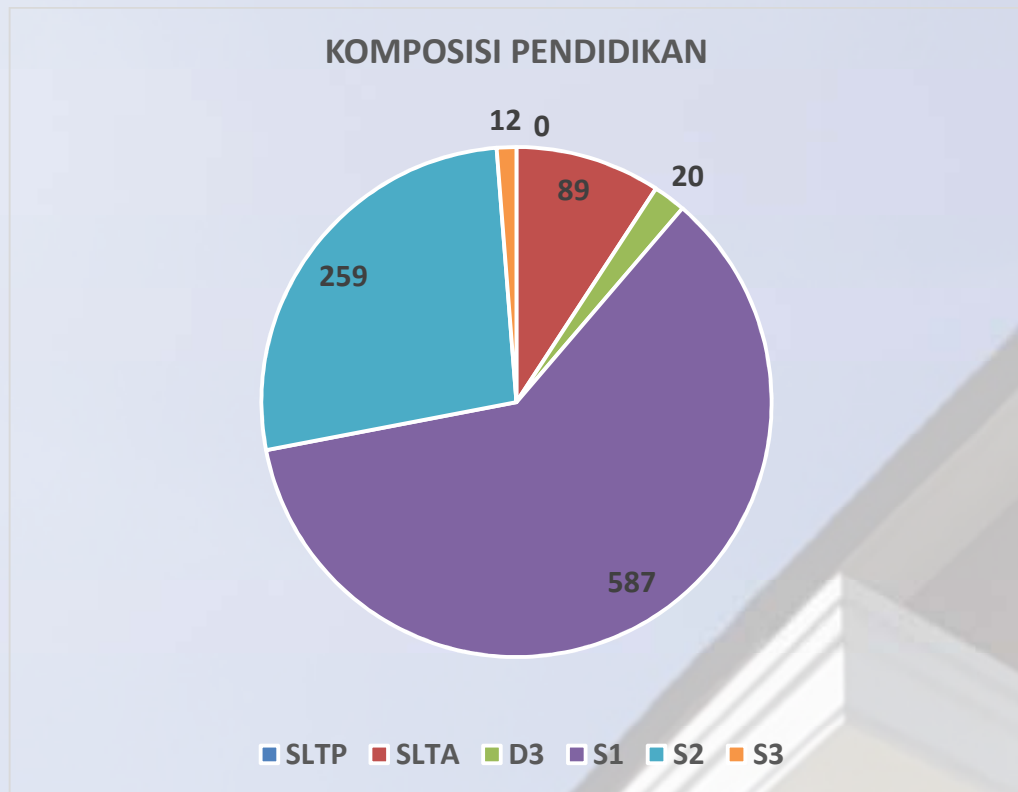
**TABEL 3. 5**  
**KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN**  
**PERADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**

NO	SATUAN KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH PEGAWAI
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	0	0	2	36	18	2	58
2	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	0	5	1	31	17	1	55
3	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	0	2	0	31	11	1	45
4	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	0	2	0	25	7	1	35
5	PENGADILAN AGAMA SUMBER	0	9	0	29	10	0	48
6	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	0	6	0	30	6	0	42
7	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	0	4	0	20	13	0	37
8	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	0	1	0	20	10	1	32
9	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	0	0	1	18	4	0	23
10	PENGADILAN AGAMA SUBANG	0	2	0	21	9	0	32
11	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	0	8	1	13	12	0	34
12	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	0	3	0	25	3	0	31
13	PENGADILAN AGAMA GARUT	0	7	0	19	11	1	38
14	PENGADILAN AGAMA BOGOR	0	1	3	37	16	0	37
15	PENGADILAN AGAMA BEKASI	0	8	2	23	11	1	45

16	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	0	5	0	28	19	0	52
17	PENGADILAN AGAMA DEPOK	0	5	1	31	16	1	54
18	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	0	3	0	16	7	2	28
19	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	0	0	2	11	4	0	17
20	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	0	4	1	17	12	0	34
21	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	0	1	0	17	3	0	21
22	PENGADILAN AGAMA CIREBON	0	3	0	16	4	0	23
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	0	5	2	15	11	0	33
24	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	0	0	1	12	4	0	17
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	0	1	0	17	5	0	23
26	PENGADILAN AGAMA SOREANG	0	3	1	31	11	1	47
27	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	0	0	1	20	5	0	26
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>89</b>	<b>20</b>	<b>587</b>	<b>259</b>	<b>12</b>	<b>967</b>

Dari uraian diatas dapat divisualisasikan dalam grafik berikut :

**GRAFIK 3.2**  
**KOMPOSISI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN**



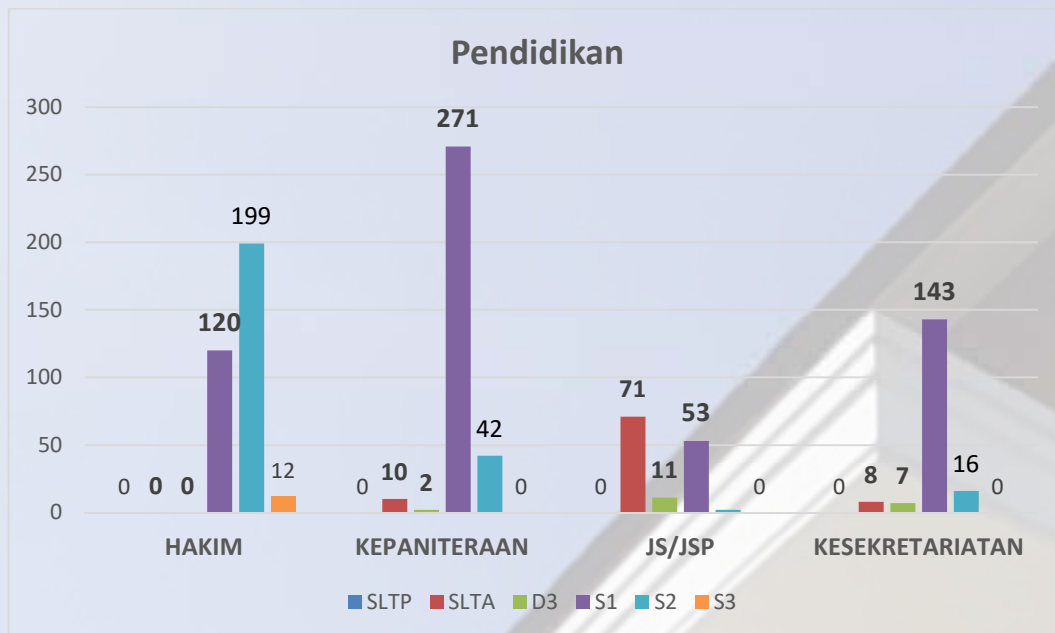
**TABEL 3.6**  
**KOMPOSISI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JABATAN**  
**PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH JAWA BARAT**

NO	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN					
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	HAKIM	-	-	-	120	199	12
2	KEPANITERAAN	-	10	2	271	42	-
3	JS/JSP	-	71	11	53	2	-
4	KESEKRETARIATAN	-	8	7	143	16	-
	JUMLAH	0	89	20	587	259	12



Gambar Grafik Pendidikan pada setiap rumpun jabatan :

**GRAFIK 3.3**  
**KOMPOSISI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JABATAN**  
**PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH JAWA BARAT**



Komposisi SDM yang sudah ada di setiap satker sebagaimana tertuang di atas merupakan kondisi terakhir per 31 Desember 2020, setelah mengalami beberapa perubahan jumlah yang disebabkan adanya promosi dan mutasi, baik promosi mutasi keluar maupun masuk.

Promosi dan mutasi sudah menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, sehingga seorang pegawai mau tidak mau, suka tidak suka apabila lembaga memerintahkan untuk mutasi maka harus dilaksanakan.

Promosi dan mutasi yang terjadi selama rentang waktu tahun 2020 tersebut untuk tenaga teknis kepaniteraan dan pejabat di Kesekretariatan lebih dominan disebabkan adanya usulan dari PTA Jawa Barat berdasarkan rekomendasi Baperjakat, dengan pertimbangan karena adanya kekosongan jabatan atau berdasarkan kebutuhan lembaga perlu dilakukan mutasi ataupun rotasi jabatan. Sedangkan promosi dan mutasi

Hakim merupakan kewenangan dan hasil TPM Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI.

Berikut ini kami sampaikan perubahan SDM berdasarkan adanya mutasi, promosi maupun rotasi, baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

#### A. Mutasi.

Perpindahan pegawai dari satker Pengadilan Agama yang satu ke Pengadilan Agama yang lain (Mutasi) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat kami klasifikasikan menjadi 2 katagori, antara lain Mutasi Keluar (yaitu mutasi/perpindahan dari Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat ke Pengadilan Agama di wilayah luar Jawa Barat) dan Mutasi Masuk yaitu sebaliknya dari luar PTA Jawa Barat ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

##### 1. Mutasi Keluar

Mutasi keluar yaitu mutasi pegawai dari lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ke luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Berikut rincian mutasi masuk pegawai se wilayah PTA Jawa Barat pada tahun 2020 :

**TABEL 3.7**  
**DATA PEGAWAI MUTASI KELUAR**  
**WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I. NIP. 19571231.198103.1.068	PTA Jawa Barat	PTA Manado
2	Drs. H. MOHAMMAD NOR HUDLRIEN, S.H., M.H. NIP. 19560614.198503.1.002	PTA Jawa Barat	PTA Semarang
3	Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H NIP. 19590704.198802.1.001	PTA Jawa Barat	PTA Jakarta

4	Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.S.I NIP. 19570208.198503.1.003	PTA Jawa Barat	PTA Yogyakarta
5	Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H. NIP. 19640113.199003.1.002	PTA Jawa Barat	PTA Mataram
6	Drs. H. ABD AZIS, M.H. NIP. 19571231.198703.1.013	PTA Jawa Barat	PTA Makassar
7	Hj. SITTI HABRIANI SOFJAN, S.E. NIP. 19661005.199401.2.001	PTA Jawa Barat	PTA Manado
8	Drs. H. ACH JUFRI, S.H., M.H. NIP. 19680318.199303.1.002	PTA Jawa Barat	BADILMILTUN
9	Drs. MOHAMMAD TAUFIK, M.H. NIP. 19640113.199003.1.002	PTA Jawa Barat	PTA Jakarta
10	Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. NIP. 19580329.198603.1.003	PTA Jawa Barat	Mahkamah Agung
11	SEKEN, S. Ag. M.H. NIP. 19700515.199703.1.002	PA. Ngamprah Kls II	PA Karanganyar Kelas I.B
12	H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I, M.H. NIP. 19790502.200704.1.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Telukkuantan Kls. II
13	TAUFIK, S.H.I, M.A. NIP. 19811106.200704.1.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Maninjau Kelas II
14	ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, M.H. NIP. 19841004.200805.2.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Mungkid Kls I.B
15	AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H NIP. 19830107.200704.1.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Tabanan Kls II
16	APRILIA CANDRA, S.Sy. NIP. 19900403.201712.2.003	PA. Ngamprah Kls II	PA Sukadana
17	ISMATUL MAULA, S.H.I. NIP. 19921110.201712.2.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Kota Bumi
18	NADIA RUFAIDAH, S.H. NIP. 19900607.201712.2.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Kota Bumi
19	RIFQIYATUNNISA, S.H.I. NIP. 19860626.201712.2.001	PA. Ngamprah Kls II	PA Sukadana
20	RIZKA ARSITA AMALIA, S.H. NIP. 19940906.201712.2.003	PA. Ngamprah Kls II	PA Tanjung
21	Drs. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum. NIP. 19650125.199103.1.003	PA. Bandung	Mahkamah Syar'iyah Aceh

22	Drs. H. JOKO YUWONO, M.H. NIP. 19560320.198503.1.003	PA. Bandung	PA. Surakarta
23	Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H. NIP. 19661231.199303.2.015	PA. Bandung	PA. Jakarta Pusat
24	Drs. SARNOTO, M.H. NIP. 19671225.199403.1.005	PA. Bandung	PA. Jakarta Utara
25	Drs. H. UJANG SOLEH, S.H. NIP. 19570302.198603.1.004	PA. Bandung	PA. Jakarta Selatan
26	Hj. HALWAN NAZAH, S.E., S.H., M.M. NIP. 19651122.198603.2.001	PA. Bandung	PTA Jakarta
27	DR. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. NIP. 19640205.199203.1.005	PA. Bandung	PTA Mataram
28	Dra. HJ. BIVA YUSMIARTI, M.A. NIP. 19620802.198803.2.001	PA. Bandung	PTA Maluku Utara
29	DR. HERUDDIN, M.H. NIP. 19660207.199303.1.003	PA. Bandung	PA. Jakarta Pusat
30	Drs. H. CECEP MAKMUN, S.H., M.H. NIP. 19590204.198703.1.003	PA. Bandung	PA. Jakarta Selatan
31	IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. NIP. 19810129.200704.1.001	PA. Cianjur	PA. Nanga Bulik Kelas II
32	HARIS LUTHFI, S.H.I., M.A. NIP. 19820425.200904.1.004	PA. Cianjur	PA. Muara Labuh
33	PA.NJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I., M.H. NIP. 19780315.200502.1.003	PA. Cianjur	PA. Tanjung Balai
34	M. IQBAL, S.H. NIP. 19910719.201503.1.002	PA. Cianjur	PA. Pangkalan Balai
35	MELI YONDA, S.H., M.H. NIP. 19870521.200604.2.001	PA. Cianjur	PA. Jakarta Barat
36	Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H. NIP. 19660915.199303.2.003	PA. Sukabumi	PA. Tigaraksa
37	A. DJUDAIRI RAWIYAN, S.H. NIP. 19600604.198603.1.009	PA. Sukabumi	PTA Jakarta
38	Dra..Hj. SAHRIYAH, SH., MSI NIP. 19680812.199403.2.009	PA. Cikarang	PA. Jakarta Barat
39	MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI NIP. 19770428.200312.1.005	PA. Cikarang	PA. Simalungun



40	AHYAR SIDDIQ, S.E.I., M.H.I. NIP. 19810726.200704.1.002	PA. Cikarang	PA. Cilegon
41	DARDA ARISTO, S.H.I. NIP. 19790201.200704.1.001	PA. Cikarang	PA. Muaradua
42	ENDAH DWI WAHYUNI, S.Pd., S.H., M.Pd. NIP. 19760907.200903.2.005	PA. Cikarang	PA. Tangerang
43	DIKA ANDRIAN, S.KOM, S.H NIP. 19870126.200604.1.002	PA. Cikarang	PA. Jakarta Pusat
44	Dra. HJ. AI JAMILAH, M.H. NIP. 19600906.198803.2.003	PA. Garut	PA. Serang
45	Drs. AFTABUDIN SHOFARI NIP. 19640614.199203.1.003	PA. Garut	PA. Slawi
46	SRI RIZKI DWI PUTRI, S.H., M.H. NIP. 19841212.200704.2.001	PA. Purwakarta Kelas I.B	PA Kuala Tungkal Kls II
47	MARDHA ARETA, S.H. NIP. 19840304.200704.2.001	PA Purwakarta Kls I.B	PA Bukittinggi Kls I.b
48	Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H.,M.H NIP. 19611231.198303.2.017	PA Bekasi	PTA Makassar
49	Drs. H. KAMSIN, S.H.,M.H NIP. 19620209.199103.1.002	PA Bekasi	PA Jakarta Selatan
50	Hj. IRA PUSPITA SARI, S.H.,M.H NIP. 19720106.200112.2.002	PA Bekasi	PA Jakarta Timur
51	Drs. JAZILIN, M.H NIP. 19650105.199303.1.002	PA Bekasi	PA Semarang
52	DR. H. HASANUDDIN, S.H.,M.H NIP. 19610316.198903.1.003	PA Bekasi	PTA Manado
53	ZAINAL RIDHO, S.Ag.,M.H NIP. 19770331.200112.1.003	PA Bekasi	PA Jakarta Selatan
54	JAJANG KOSTALANI, S.Ag NIP. 19700204.200003.1.002	PA Bekasi	PA Tangerang
55	Drs. AMRI, S.H., M.H. NIP. 19680517.199303.1.004	PA. Sumedang	PA. Jakarta Utara
56	Drs. ARIF MUKHSININ.,S.H.,M.H NIP. 19660606.199203.1.008	PA. Cibadak	PA Jakarta Timur
57	Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H., M.H. NIP. 19660712.199203.2.003	PA Cibadak	PA Kalianda

58	Dra. ELFINA FITRIANI NIP. 19620115.199203.2.001	PA. Karawang	PA. Tanjungkarang
59	Drs. H. DUDUNG, S.H., M.H. NIP. 19661130.199203.1.003	PA. Kota Cimahi	PTA Kupang
60	SENA SITI ARAFAH, S.SY. NIP. 19910429.201712.2.001	PA. Kota Cimahi	PA. Sukadana
61	DESI RATNASARI, S.SY. NIP. 19921231.201712.2.005	PA. Kota Cimahi	PA. Pringsewu
62	DEVINA MAHMUDAH, S.H. NIP. 19941218.201712.2.001	PA. Kota Cimahi	PA. Pringsewu
63	NOVA SRI WAHYUNING TYAS, S.H.I. NIP. 19901124.201712.2.002	PA. Kota Cimahi	PA. Negara
64	RIANA ELFRIYANI, S.H. NIP. 19871022.201712.2.001	PA. Kota Cimahi	PA. Sukadana
65	Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. NIP. 19630718.199303.1.002	PA. Cirebon	PA. Batang
66	Drs. H. M. ABDUL AZIS, M.H. NIP. 19670825.199303.1.005	PA. Cirebon	PA. Kendal
67	AHMAD SATIRI, S.AG., M.H. NIP. 19770511.200704.1.001	PA. Cirebon	PA. Sukamara
68	BUDI HARI PROSETIA, S.H.I. NIP. 19780817.200704.1.001	PA. Cirebon	PA. Muko Muko
69	FAKHRURAZI, S.AG., M.HI NIP. 19741127.199903.1.002	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Boyolali Kelas IB
70	ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag NIP. 19711010.200502.1.001	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Pandan Kelas II
71	SITI ALOSH FARCHATY, S.HI NIP. 19820406.200604.2.004	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Bangli Kelas II
72	H. ACHMAD FAUSI, S.HI NIP. 19810803.200704.1.001	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Penajam Kelas II
73	FAKHRIYA HAKIM, S.H.I. NIP. 19900301.201212.1.002	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Pringsewu
74	INTAN MIFTAHURRAHMI, LC. NIP. 19940813.201712.2.002	PA. Kota Banjar Kelas II	PA. Sukadana
75	Drs. AHMAD NASOHAH NIP. 19650805.199303.1.004	PA. Kuningan	PA. Semarang

76	MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag. NIP. 19770101.199803.1.003	PA Soreang	PA Sibuhuan
77	ARIF IRHAMI, S.H.I., M.Sy. NIP. 19810324.200704.1.002	PA Soreang	PA Sawah Lunto
78	DIAN SITI KUSUMAWARDANI, S.Ag., S.H. NIP. 19751226.200604.2.002	PA Soreang	PA Sei RamPA.h
79	MAYA GUNARSIH, S.H.I. NIP. 19830717.200704.2.001	PA Soreang	PA Marabahan
80	H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19770310.200704.1.001	PA Soreang	PA Muara Teweh
81	ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. NIP. 19791108.200704.1.001	PA Soreang	MS. Idi
82	M. SAIFUDDIN, S.H.I. NIP. 19800516.200704.1.001	PA Soreang	PA Sibuhuan
83	ARDHI BARKAH APANDI, S.H. NIP. 19940718.201712.1.008	PA Soreang	PA. Kota Bumi
84	GHIFAR AFGHANY, S.Sy. NIP. 19940706.201712.1.005	PA Soreang	Msy. Sabang
85	MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. NIP. 19790528.200704.1.001	PA Soreang	PA Serui
86	MOHAMAD SHOLAHUDDIN, S.H.I., M.H. NIP. 19790102.200704.1.001	PA Soreang	PA Manna
87	MAYA GUNARSIH, S.H.I. NIP. 19830717.200704.2.001	PA Soreang	PA Marabahan
88	WIDYA ALIA, S.H.I. NIP. 19880130.201712.2.001	PA Soreang	PA Gedong Tataan
89	MUHAMMAD AULIA RAMDAN DAENURI, S.Sy. NIP. 19890406.201712.1.002	PA Soreang	Msy. IDI
90	DR. H. M. MUNAWAN, S.H., M.HUM. NIP. 19650610.199003.1.009	PA Sumber	PA Blitar
91	DR. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H. NIP. 19661028.199203.1.003	PA Sumber	PTA Mataram
92	Drs. FAIZAL KAMIL, S.H. M.H. NIP. 19640904.198503.1.003	PA Sumber	PA Jakarta Utara

93	Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H. NIP. 19560912.198511.1.001	PA Sumber	PA Jakarta Timur
94	H. NAHISON DASA BRATA, S.H., M.Hum. NIP. 19661121.199203.1.003	PA. Cibinong Kelas IA	PTA Bangka Belitung
95	Drs. H. M. ROSYID YA'KUB, M.H. NIP. 19630311.199103.1.007	PA. Cibinong Kelas IA	PTA Mataram
96	Drs. H.HARYADI HASAN,M.H. NIP. 19610404.1992031..003	PA. Cibinong Kelas IA	PA. Jakarta Selatan Kelas IA
97	Drs. KUSWANTO, S.H., M.H. NIP. 19610404.199203.1.003	PA. Cibinong Kelas IA	PA. Pekalongan Kelas IA
98	MUHAMAD WAKHID,SE.,SH.,M.M., M.H. NIP. 19771213.200901.1.003	PA. Cibinong Kelas IA	Ditjen Badilum
99	HARMINI, S.E. NIP. 19870722.201903.2.006	PA. Cibinong Kelas IA	BUA MARI
100	Dra. SUKAR SIGIT HANDOTO NIP. 19640231.199403.1.002	PA Tasikmalaya	PA Kebumen
101	Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. NIP. 19631214.198903.2.003	PA Tasikmalaya	PTA. Palangkaraya
102	Dra. SALMAH, ZR NIP. 19570219.198503.2.001	PA Bogor	PA Sungguminasa
103	Dra. SULKHA HARWIYANTI, SH. NIP. 19680915.199403.2.004	PA Bogor	PA Tigaraksa
104	IKA MULIANITA, S.E., S.H. NIP. 19850105.200604.2.001	PA Bogor	PA Jambi
105	DR. HJ. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	PA. Kota Tasikmalaya	PA. Mojokerto
106	FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H. NIP. 19770922.200604.2.004	PA. Kota Tasikmalaya	PA. Pangkalan Kerinci
107	SEPTIANAH, SHI, M.H. NIP. 19790902.200704.2.001	PA. Kota Tasikmalaya	PA. Martapura
108	SAMSUDIN DJAKI, SH. NIP. 19800429.200704.1.001	PA. Kota Tasikmalaya	PA. Tual
109	SITTI SURIYANI TUAHUNS, A.MA. NIP. 19811117.200801.2.012	PA. Kota Tasikmalaya	PTA Ambon



110	DARU HALLEILA, S.H. NIP. 19860412.201712.2.001	PA. Kota Tasikmalaya	PA Penajam
111	Drs. H. KAHARUDDIN, S.H., M.H. NIP. 19581231.198703.1.031	PA. Subang	PA. Brebes
112	H. M. ARIEF, S.H., M.H. NIP. 19640627.199203.1.000	PA. Depok Klas IA	PA. Jakarta Pusat Klas IA
113	Drs. H. MOHAMAD YAMIN, S.H., M.H. NIP. 19651231.199203.1.067	PA. Depok Klas IA	PA. Jakarta Barat Klas IA
114	Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. NIP. 19670826.199303.1.000	PA. Depok Klas IA	PA. Metro Klas IA
115	Drs. H. SARMIN, M.H. NIP. 19600614.198903.1.000	PA. Depok Klas IA	PTA Kendari
116	AWAY AWALUDIN, S.AG., M.HUM. NIP. 19730310.199903.1.000	PA. Depok Klas IA	PA. Jakarta Selatan Klas IA
117	Drs. H. MUHIDDIN, S.H., M.H. NIP. 19631030.198903.1.005	PA. Indramayu	PTA Bengkulu
118	SULAIMAN TAMI, S.H. NIP. 19560312.197903.1.006	PA. Indramayu	PA. Bengkulu
119	Dra. ZAINIDAR NIP. 19570902.198803.2.001	PA. Indramayu	PA. Pontianak
120	Drs. UDIN BHRUDIN NIP. 19650313.199303.1.002	PA. Indramayu	PA. Majalengka
121	DR. H. MAMAT RUHIMAT, S.H., M.H. NIP. 19660811.199203.1.008	PA. Indramayu	PTA Pontianak
122	Drs. MUCHAMMADUN NIP. 19670302.199403.1.009	PA. Indramayu	PA. Jakarta Utara
123	Drs. H. AYEP SAEPUL MIFTAH, S.H., M.H. NIP. 19650506.199103.1.003	PA. Majalengka	PTA Kendari
124	Drs. H. ANANG P., S.H., M.H. NIP. 19670306.199203.1.002	PA Ciamis	PTA Mataram
125	Drs. RAHMAT, S.H. NIP. 19670602.199403.1.002	PA Ciamis	PA Tigaraksa
126	H. MUHAMMAD ALI SYARIFUDDIN MAS'UD, Lc., S.H., M.Ag NIP. 19630720.199103.1.002	PA Ciamis	PA Jakarta Barat
127	Drs. AMRI, S.H., M.H. NIP. 19680517.199303.1.004	PA Sumedang	PA Jakarta Utara

## 2. Mutasi Masuk

Mutasi masuk yaitu mutasi pegawai dari luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat masuk ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Berikut rincian mutasi masuk pegawai se wilayah PTA Jawa Barat pada tahun 2020 :

**TABEL 3.8**  
**DAFTAR MUTASI MASUK PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Drs. SUTARDI NIP. 19551226.198303.1.002	HT PTA Banten	HT PTA Jawa Barat
2	Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. NIP. 19551209.198203.1.008	HT PTA Semarang	HT PTA Jawa Barat
3	Drs. H. MA'MUR, M.H. NIP. 19560617.198511.1.001	HT PTA Banten	HT PTA Jawa Barat
4	Dra. Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN. NIP. 19570115.198303.2.002	HT PTA Bengkulu	HT PTA Jawa Barat
5	Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H. NIP. 19550505.198203.1.023	HT PTA Bengkulu	HT PTA Jawa Barat
6	Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H. NIP. 19600519.198903.1.001	HT PTA Kupang	HT PTA Jawa Barat
7	Drs. MUJAHIDIN, M.H. NIP. 19590407.198703.1.005	HT PTA Palu	HT PTA Jawa Barat
8	Dra. HJ. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H. NIP. 19620402.198802.2.001	HT PTA Gorontalo	HT PTA Jawa Barat
9	H. IMAM AHFASY, S.H. NIP. 19560122.197603.1.002	HT PTA Jakarta	HT PTA Jawa Barat
10	Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. NIP. 19570111.198512.1.001	HT PTA Surabaya	HT PTA Jawa Barat
11	Drs. ENAS NASAI, S.H. NIP. 19560804.198403.1.001	HT PTA Bandar Lampung	HT PTA Jawa Barat

12	Drs. H. DADANG SUDRAJAT NIP. 19640203.199303.1.001	Sekretaris PTA Banten	Sekretaris PTA Jawa Barat
13	MEILA AULIA, S.H. NIP. 19901124.201402.2.001	Pelaksana Komisi Yudisial RI	Pelaksana PTA Jawa Barat
14	WULAN YULIANI, A.Md. NIP. 19930704.201503.2.001	Fungsional Umum Balitbangdiklatkumdil	Pelaksana PTA Jawa Barat
15	MULYADI, SHI NIP. 19800112.200912.1.001	PA Dataran Hunipopu Kelas II	PA Ngamprah Kelas II
16	AGUS SOPYAN, S.H.I. NIP. 19820908.200904.1.006	Hakim MS. Blangkajeren	Hakim PA Ngamprah Kelas II
17	LIZA ROIHANAH, S.H.I., M.H. NIP. 19830312.200912.2.005	Hakim PA Sukadana II	Hakim PA Ngamprah Kelas II
18	SUBHI PANTONI, S.H.I. NIP. 19830529.201101.1.004	Hakim PA Siak Sriindrapura Kelas II	Hakim PA Ngamprah Kelas II
19	NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I NIP. 19811219.201101.1.009	Hakim PA Boroko Kls II	Hakim PA Ngamprah Kelas II
20	MUHAMAD FATUROHMAN, S.H., M.H. NIP. 19890102.201403.1.001	Panmud Hukum PA Wameina Kelas II	PP PA Ngamprah Kelas II
21	Dra. Hj. N. SITI SUWAEBAH, M.H. NIP. 19681008.199303.2.004	Wakil Ketua PA Sumbawa Besar Kls II	Ketua PA Purwakarta Kelas I.B
22	H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. NIP. 19731013.199803.1.001	Ketua PA Kabanjahe Kelas II	Wakil Ketua PA Purwakarta Kelas I.B
23	Drs. SUYUTI, S.H., M.H. NIP. 19661208.199403.1.004	Hakim PA Jakarta Pusat Kelas I.A	Hakim PA Purwakarta Kelas I.B
24	IRFAN FIRDAUS, S.H., S.HI., M.H. NIP. 19820206.200704.1.001	Hakim PA Padang Sidempuan Kls II	Hakim PA Purwakarta Kelas I.B
25	RATU AYU RAHMI, S.HI., M.H. NIP. 19810826.200805.2.001	Hakim PA Rangkasbitung kls II	Hakim PA Purwakarta Kelas I.B
26	SITI ERLANIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 19890501.201403.2.001	Kasubag PTIP PA Labuhan Bajo Kls II	Pelaksana PA Purwakarta Kelas I.B
27	Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H. NIP. 19890501.201403.2.001	Wakil Ketua PA Semarang	Ketua PA Bandung
28	Drs. H. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 19630714.199003.1.002	Hakim Utama Muda PA Jakarta Selatan	Hakim Madya Utama PA Bandung

29	Drs. H. ILHAM SUHROWARDI, S.H., M.H. NIP. 19630614.199103.1.005	Hakim Utama Muda PA Jakarta Selatan	Hakim Madya Utama PA Bandung
30	ST. NUR RAHMAN, B.SC. NIP. 19640207.199030.2.005	Pengadministrasi Persuratan PTA Semarang	Pranata Kearsipan PA Bandung
31	Drs. ASEP HIDAYAT, S.H. NIP. 19590511.198703.1.003	Hakim PA Jakarta Timur	Hakim PA Sukabumi
32	DJULIA HERJANARA, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19700701.199803.1.001	Ketua PA Mesuji	Wakil Ketua PA Sukabumi
33	H. MOHAMAD RUSLI, S.H NIP. 19710619.199203.1.002	PP PA. Jakarta Utara	PP PA Bekasi
34	EVA ZULVA WARDIYANTI, S.H.I.,M.H NIP. 19750903.200805.2.00	Panmud Hukum PA. Suwawa	PP PA Bekasi
35	Drs. M. DANIL, M.A NIP. 19650525.199403.1.00	Wakil Ketua PA. Surakarta	Wakil Ketua PA. Bekasi
36	Hj. SUSILAWATI, S.E.I NIP. 19760601.200312.2.003	Wakil Ketua PA. Kuala Pembuang	Hakim PA. Bekasi
37	SURYADI, S.AG., S.H., M.H. NIP. 19740612.199802.1.001	Ketua PA Prabumulih	Wakil Ketua PA Cikarang
38	ALVI SYAFIATIN, S.Ag. NIP. 19780618.200904.2.001	Hakim PA Cilegon	Hakim PA Cikarang
39	DENDI ABDURROSYID, S.H.I., M.H. NIP. 19641106.199203.1.003	Hakim PA Ketapang	Hakim PA Cikarang
40	FITRAWATI, A. Md. NIP. 19850624.200912.2.003	Jurusita PA Tais	Jurusita PA Cikarang
41	Drs. H. SYAMSUL FALAH, M.H. NIP. 19661021.199403.1.001	Hakim PA Pekalongan	Hakim PA Sumedang
42	HERI WIDI ASTANTO.,S.SOS., S.H., M.H NIP. 19760603.200604.1.004	PP PA Sleman	PP PA Cibadak
43	Drs. HENDI RUSTANDI, S.H. NIP. 19670313.199403.1.002	Wakil Ketua PA Banyumas	Ketua PA Cibadak kls.IB
44	A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. NIP. 19700806.199703.1.002	Ketua PA Msy Meureudu	Wakil Ketua PA Cibadak kls.IB



45	DR. M. BASIR, M.H. NIP. 19650702.199203.1.005	Wakil Ketua PA Watampone	Ketua PA Karawang
46	DR. Dra. NURWATHON, S.H., M.H. NIP. 19661211.199403.2.003	Ketua PA Klaten	Wakil Ketua PA Karawang
47	Drs. H. ABU AEMAN, S.H., M.H. NIP. 19600816.198803.1.007	Hakim PA Yogyakarta	Hakim PA Karawang
48	Dra. SITI MUNAWAROH, S.H. NIP. 19670813.199203.2.001	Hakim PA Surabaya	Hakim PA Karawang
49	Drs. H. SYARIFUDIN, M.H. NIP. 19700206.199403.1.004	Hakim PA Wonosobo	Hakim PA Karawang
50	Drs. H. A. SYUYUTI, M.Sy. NIP. 19690103.199503.1.001	Hakim PA Tigaraksa	Hakim PA Karawang
51	Drs. KAUSAR ANHAR, S.H. NIP. 19570705.198603.1.004	Ketua PA Mataram	Ketua PA Kota Cimahi
52	Dra. ORBA SUSILAWATI, M.H.I. NIP. 19570705.198603.1.004	Ketua PA Bukit Tinggi	Wakil Ketua PA Kota Cimahi
53	Drs. MAHSUN NIP. 19630519.199403.1.001	Hakim PA Jepara	Hakim PA Cirebon
54	BUDI HARI PROSETIA, S.H.I. NIP. 19780817.200704.1.001	Hakim PA Sidikalang	Hakim PA Cirebon
55	ALI MAUNGGA, S.H. NIP. 19900919.201212.1.00	Panmud Permohonan PA Pulang Pisau	PP PA Cirebon
56	Drs. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. NIP. 19641016.199303.1.001	Ketua PA Mungkid	Ketua PA Cianjur Kls.IB
57	H. THAMRIN, S.Ag., M.H. NIP. 19700612.199803.1.00	Ketua PA Mukomuko	Wakil Ketua PA Cianjur Kls.IB
58	NUR HIDAYAT, S.Ag., M.A. NIP. 19770630.200904.1.004	Hakim PA Kalianda	Hakim PA Cianjur Kls.IB
59	Drs. SUGIYANTO, M.H. NIP. 19660506.199403.1.004	Hakim PA Jepara	Hakim PA Cianjur Kls.IB
60	Dra. SRI SANGADATUN, M.H. NIP. 19660910.199403.2.002	Hakim PA Klaten	Hakim PA Cianjur Kls.IB
61	ZULFIKRI, S.H.I., M.H. NIP. 19840201.200904.1.004	Hakim PA Msy Bireuen	Hakim PA Cianjur Kls.IB
62	FAJAR HERNAWAN, S.H.I., M.E.I. NIP. 19800116.200904.1.003	Hakim PA Sambas	Hakim PA Cianjur Kls.IB

63	MUHAMMAD IQBAL, S.HI., M.A NIP. 19811023.200704.1.001	Wakil Ketua PA Tebing Tinggi	Ketua PA Kota Banjar
64	SARDIANTO,S.HI NIP. 19830512.200904.1.004	Hakim PA Labuha	Hakim PA Kota Banjar
65	MOH LUTFI AMIN, S.HI NIP. 19790815.200904.1.003	Hakim PA Kangean	Hakim PA Kota Banjar
66	GUNAWAN, S.HI NIP. 19840817.201101.1.012	Hakim PA Sendawar	Hakim PA Kota Banjar
67	WAKHIDAH, S.H., S.H.I., M.H NIP. 19790101.200704.2.001	Hakim PA Kodya Madiun	Wakil Ketua PA Kota Banjar
68	LINA NURAENI, S.Ag NIP. 19760115.200901.2.004	Kementrian Agama	Pelaksana PA Kota Banjar
69	H. MAHRUS, LC., M.H. NIP. 19710104.200502.1.001	Wakil Ketua PA Tahuna	Ketua PA Soreang
70	ERFANI, S.H.I., M.E.Sy. NIP. 19851020.200912.1.005	Hakim PA Kasongan	Hakim PA Soreang
71	FAISAL AMRI, S.H.I., M.H. NIP. 19841023.200912.1.003	Hakim PA Pringsewu	Hakim PA Soreang
72	SUKAHATA WAKANO, S.H.I., S.H. NIP. 19810817.200912.1.005	Hakim PA Bolaang Uki	Hakim PA Soreang
73	NOOR FAIZ, S.H.I., M.H. NIP. 19850108.200912.1.005	Hakim PA Tutuyan	Hakim PA Soreang
74	DR. MAHMUD HADI RIYANTO, S.H.I., M.H.I. NIP. 19860516.201101.1.014	Hakim PA Bajawa	Hakim PA Soreang
75	HASAN ASHARI, S.H.I. NIP. 19811103.201101.1.005	Hakim PA Manokwari	Hakim PA Soreang
76	ABDUL GANI SYAFII, S.H.I., M.H. NIP. 19811103.201101.1.005	Hakim PA Sukadana	Hakim PA Soreang
77	HARY CANDRA, S.H.I. NIP. 19850103.201101.1.011	Hakim PA Manokwari	Hakim PA Soreang
78	AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. NIP. 19800801.200805.1.001	Hakim PA Gianyar	Hakim PA Soreang
79	MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. NIP. 19801210.200805.1.001	Hakim PA Bengkalis	Hakim PA Soreang

80	H. ANWAR, Lc. NIP. 19761002.200805.1.001	Hakim PA Raha	Hakim PA Soreang
81	H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., M.A. NIP. 19781110.200904.1.007	Hakim PA Giri Menang	Hakim PA Soreang
82	Drs. FAIZAL KAMIL, S.H. M.H. NIP. 19640904.198503.1.003	Wakil Ketua PA Jakarta Selatan	Wakil Ketua PA Sumber
83	Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. NIP. 19571027.198102.1.002	Hakim PA Pemalang	Hakim PA Sumber
84	Drs. H. SHONHAJI, M.H. NIP. 19650106.199203.1.005	Ketua PA Kendari Kelas IA	Ketua PA Cibinong Kelas IA
85	H. AKHMAD JUNAEDI, S.H NIP. 19671210.199303.1.0	Ketua PA Sumbawa Besar	Wakil Ketua PA Cibinong Kelas IA
86	Drs. RAHMAT FARID, M.H. NIP. 19651005.199103.1.00	Hakim PA Wonosobo	Hakim PA Cibinong Kelas IA
87	Drs. H. AMIRUDDIN, S.H.,M.H NIP. 19590803.198703.1.004	Hakim PA Palu	Hakim PA Cibinong Kelas IA
88	Drs. H. KHABIB SOLEH, S.H., M.H. NIP. 19681010.199203.1.003	Hakim PA Purwodadi	Hakim PA Cibinong Kelas IA
89	Drs. SURAJI, M.H. NIP. 19640516.199303.1.002	Hakim PA Purwodadi	Hakim PA Cibinong Kelas IA
90	Drs. H. ABD. SALAM NIP. 19570314.199403.1.001	Hakim PA Pemalang	Hakim PA Cibinong Kelas IA
91	Drs. H. DADANG KARIM, M.H. NIP. 19570314.199403.1.001	Hakim PA Pemalang	Hakim PA Cibinong Kelas IA
92	ABDUL BASIR, S. Ag., SH. NIP. 19640129.199303.1.0	Hakim PA Slawi	Hakim PA Cibinong Kelas IA
93	UU LUKMANUL HAKIM, S.Ag.,SH NIP. 19640129.199303.1.0	Wakil Ketua PA Sintang	Hakim PA Cibinong Kelas IA
94	ROHILI, S.H., M.H. NIP. 19630706.198603.1.007	Pelaksana Subbag TU Badan Pengawasan MA	PP PA Cibinong
95	Drs. NASRUL, M.A. NIP. 19660201.199403.1.005	KPA. Wates	WKPA. Bogor
96	Drs. HERMAN KURNIADI, S.H., M.SI. NIP. 19620507.198203.1.001	Staf PA. Karanganyar	PP PA. Bogor

97	Drs. ARIFIN NIP. 19660411.199303.1.004	Hakim PA Wonosobo	Hakim PA Subang
98	Drs. H. HUMAIDI NIP. 19601111.199203.1.002	Hakim PA Sragen	Hakim PA Subang
99	Drs. SUHARDI, S.H. NIP. 19651231.199403.1.042	Ketua PA Sragen	Ketua PA Subang
100	Drs. H. SARMIN, M.H. NIP. 19600614.198903.1.000	Ketua PA Kendal	Ketua PA Depok
101	Dra. HJ. ST. MASYHADIAH D., M.H. NIP. 19670105.199203.2.000	Ketua PA Martapura	Wakil Ketua PA Depok
102	Dra. HJ. ST. HASMAH, M.H. NIP. 19620523.199003.2.000	Hakim PA Donggala	Hakim PA Depok
103	WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. NIP. 19840727.200604.2.000	PP PA Tangerang	PP PA Depok
104	Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM. NIP. 19600305.198803.1.000	Hakim PA Tangerang	Hakim PA Depok
105	Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H. NIP. 19690930.199403.1.000	Ketua PA Rantau Prapat	Wakil Ketua PA Depok
106	Drs. DUDIH MULYADI NIP. 19570515.198303.1.006	Hakim PA Serang	Hakim PA Garut
107	Drs. NANDANG NURDIN, MH. NIP. 19661213.199203.1.002	Hakim PA Surabaya	Hakim PA Garut
108	Drs. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, MH NIP. 19681003.199403.1.003	Ketua PA Boyolali	Wakil Ketua PA Garut
109	Drs. H. SYAIFUDDIN ZUHRY, S.H., M.H. NIP. 19561002.198803.1.002	Wakil Ketua PA Slawi	Ketua PA Indramayu Kls.IA
110	Dr. Drs. H. SURYADI Hs, S.H., M.H. NIP. 19670707.199303.1.007	Hakim PA Jakarta Pusat	Wakil Ketua PA Indramayu Kls.IA
111	Drs. SUHAEB NIP. 19680325.199403.1.008	Hakim PA Banjarnegara	Hakim PA Indramayu Kls.IA
112	Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H. NIP. 19670428.199303.1.006	Hakim PA Cilacap	Hakim PA Indramayu Kls.IA
113	Drs. NOER ROHMAN NIP. 19601029.198703.1.001	Hakim PA Cilacap	Hakim PA Indramayu Kls.IA



114	Drs. MASWADI NIP. 19651204.199303.1.001	Hakim PA Kebumen	Hakim PA Indramayu Kls.IA
115	Drs. MUHYIDIN NIP. 19640312.199403.1.001	Hakim PA Wonosobo	Hakim PA Indramayu Kls.IA
116	Drs. ASEP MUJTAHID, M.H. NIP. 19670410.199403.1.006	Wakil Ketua PA Pontianak	Ketua PA Ciamis Kls.IA
117	Drs. DAMANHURI ALY. M.H. NIP. 19591227.199003.1.002	Hakim PA Brebes	Hakim PA Ciamis Kls.IA
118	Drs. H. I. NURUL WASIK, S.H., M.H. NIP. 19670830.199303.1.002	Hakim PA Boyolali	Hakim PA Tasikmalaya
119	TAUFIQURRAHMAN, S.H.I. NIP. 19840728.200904.1.004	Hakim PA Sinjai	Hakim PA Kota Tasikmalaya
120	AHMAD MUDLOFAR, S.H.I. NIP. 19791112.200904.1.002	Hakim PA Bajawa	Hakim PA Kota Tasikmalaya
121	MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag. NIP. 19750819.200912.1.002	Hakim PA Wangi Wangi	Hakim PA Kota Tasikmalaya
122	NURHASAN, S.H.I., M.E. NIP. 19830308.200912.1.004	Hakim PA Sungai Raya	Hakim PA Kota Tasikmalaya
123	AHMAD MUFID BISRI, S.H.I. NIP. 19860915.201101.1.010	Hakim PA Dataran Hunipopu	Hakim PA Kota Tasikmalaya
124	Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H., M.H. NIP. 19660512.199303.1.003	WKPA Luwuk	Wakil Ketua PA Kuningan
125	Dra. ARNETIS NIP. 19630320.199103.2.002	HPA Sragen	Hakim PA Kuningan
126	TARSUDIN, S.H. NIP. 19580803.198303.1.005	HPA Kebumen	Hakim PA Kuningan

## B. Promosi.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Merit Sistem, yaitu pola karier dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja tanpa membedakan ras, suku bangsa dan agama.



Pada tahun 2020 formasi jabatan pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cukup banyak, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan yang disebabkan oleh karena pejabat lama pensiun, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Maka sesuai dengan merit sistem yang diharapkan oleh Undang Undang, dalam rangka menyisir PNS yang memiliki kompetensi yang tinggi dan menunjukkan adanya persaingan yang sehat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melakukan seleksi terhadap PNS yang berminat untuk menduduki jabatan baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan yang kosong tersebut dan direkomendasikan oleh Baperjakat PTA Jawa Barat.

Promosi yang sudah terealisasi pada tahun 2020 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, baik melalui usulan PTA Jawa Barat maupun langsung berdasarkan hasil TPM Badilag ataupun Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

#### 1. Promosi dan Rotasi Bagian Kepaniteraan.

Promosi di Kepaniteraan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui alur Rapat Baperjakat dan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Proses selanjutnya diajukan ke Dirjen Badan Peradilan Agama sebagai pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan menerbitkan SK Jabatan Teknis Kepaniteraan

**TABEL 3. 9**  
**DAFTAR PROMOSI JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	KOSMARA, S.H. NIP. 19701201.199402.1.001	Panitera Pengganti PTA Jawa Barat	Panitera PA Ciamis Kelas IA
2	Drs. MOCHAMAD JALALUDIN NIP. 19650110.199203.1.004	Panitera PA Cimahi Kelas IA	Panitera PA Cimahi Kelas IA

3	ADAM ISKANDAR, S.Ag. NIP. 19740928.199903.1.002	Panitera PA Kota Soreang Kela II	Panitera PA. Purwakarta Kelas IB
4	Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA NIP. 19671217.199403.1.004	Paniera Muda Permohonan PA Sumedang Kelas IA	Panitera PA Cirebon Kelas IB
5	DIDIN JAMALUDIN, S.H., M.H. NIP. 19700306.200312.1.003	Panitera Muda Gugatan PA Bekasi Kelas IA	Panitera PA Kota Tasikmalaya Kelas II
6	MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H. NIP. 19740504.199803.1.008	Panitera Muda Gugatan PA Kuningan Kelas IA	Panitera PA Kota Soreang Kela II
7	FURQON RIFAI, S.H. NIP. 19790214.200805.1.001	Panitera Penggati PA Tasikmalaya Kelas IA	Panmud Permohonan PA Bandung Kelas IA
8	SUBAI, S.H. NIP. 19760214.200912.1.003	Panitera Penggati PA Bandung Kelas IA	Panmud Hukum PA Bandung Kelas IA
9	ERIKA ANGGRAEINI YULISTIANINGSIH, S.H. NIP. 19790712.200604.2.001	Panitera Penggati PA Indramayu Kelas IA	Panmud Hukum PA Indramayu Kelas IA
10	Drs. UDIN BAHRUDIN NIP. 19650313.199303.1.002	Panmud Hukum PA Indramayu Kelas IA	Panmud Hukum PA Majalengka Kelas IA
11	ENTIS SUTISNA, S.Ag., M.H. NIP. 19630802.198503.1.006	Panmud Gugatan PA Sumber Kelas IA	Panmud Permohonan PA Majalengka Kelas IA
12	H. ISKANDAR, S.Ag. NIP. 19660927.199203.1.004	Panmud Gugatan PA Sumber Kelas IA	Panmud Hukum PA Karawang Kelas IA
13	YUYU YULIANI, S.Ag., M.H. NIP. 19621105.198303.2.004	Panmud Permohonan PA Karawang Kelas IA	Panmud Gugatan PA Karawang Kelas IA
14	ASNALI, S.Ag. NIP. 19621105.198303.2.004	Panmud Gugatan PA Karawang Kelas IA	Panmud Permohonan PA Karawang Kelas IA
15	MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag. NIP. 19701126.199903.1.001	Panitera Pengganti PA Garut Kelas IA	Panmud Gugatan PA Cimahi Kelas IA
16	TAUFIK AHMAD, S.H. NIP. 19700425.200312.1.002	Panmud Hukum PA Bandung Kelas IA	Panmud Hukum PA Cimahi Kelas IA
17	JUJU HERLINA, S.H. NIP. 19670414.199403.2.002	Panmud Hukum PA Sumedang Kelas IA	Panmud Gugatan PA Sumedang Kelas IA
18	AHMAD MUJAHIDIN, S.Ag. NIP. 19720416.199603.1.001	Panmud Gugatan PA Sumedang Kelas IA	Panmud Hukum PA Sumedang Kelas IA

19	Drs. HARUN NUR RASYID NIP. 19650703.198503.1.003	Panmud Permohonan PA Bandung Kelas IA	Panmud Permohonan PA Sumedang Kelas IA
20	AGUS NURYADIN, S.H. NIP. 19800216.201101.1.005	Panitera Pengganti PA Kuningan Kelas IA	Panmud Hukum PA Kuningan Kelas IA
21	SUANDI, S.H. NIP. 19690828.199003.1.005	Panmud Permohonan PA Majalengka Kelas IA	Panmud Gugatan PA Kuningan Kelas IA
22	IRFAN FITRIADI AKBAR, S.H., M.H. NIP. 19820722.201101.1.005	Panitera Pengganti PA Ciamis Kelas IA	Panmud Gugatan PA Bekasi Kelas IA
23	Dra. SITTI MARYAM ADAM NIP. 19690420.199603.2.001	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA	Panmud Gugatan PA Cibinong Kelas IA
24	HIDAYAH, S.Ag. NIP. 19730102.200003.2.001	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA	Panmud Hukum PA Cibinong Kelas IA
25	ASEP HUSNI, S.H. NIP. 19781228.200912.1.002	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA	Panmud Gugatan PA Sukabumi Kelas IB
26	USMAN BAEHAQI, S.H. NIP. 19630823.199103.1.004	Panmud Gugatan PA Garut Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jawa Barat
27	H. ABDUL MUKIT, S.H. NIP. 19620911.198703.1.002	Panmud Permohonan PA Indramayu Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jawa Barat
28	TITIEK INDRIATY, S.H. NIP. 19610910.198503.2.002	Panitera Pengganti PA Bandung	Panitera Pengganti PTA Jawa Barat
29	ACHMAD SADIKIN, S.H. NIP. 19671225.198803.1.001	Panmud Gugatan PA Soreang Kelas II	Panitera Pengganti PA Bandung Kelas IA
30	MUZAKIR WALAD, S.H.I. NIP. 19750619.199803.1.001	Panitera Pengganti PA Kota Cimahi Kelas IA	Panitera Pengganti PA Bandung Kelas IA
31	AGUS NASRULLAH, S.H. NIP. 19750611.200805.1.001	Panitera Pengganti PA Sumber Kelas IA	Panitera Pengganti PA Indramayu Kelas IA
32	KHAERU SOLEH, S.Sy. NIP. 19790511.201405.1.001	Panitera Pengganti PA Cirebon Kelas IB	Panitera Pengganti PA Indramayu Kelas IA
33	ANDRIANA, S.Sy. NIP. 19781023.201405.1.001	Panitera Pengganti PA Cirebon Kelas IB	Panitera Pengganti PA Indramayu Kelas IA

34	DEDI SUPRIADI, S.Sy., NIP. 19780818.200604.1.026	Panitera Pengganti PA Sumber Kelas IA	Panitera Pengganti PA Majalengka Kelas IA
35	RICHAH LAILI SIFA, S.H. NIP. 19740706.200003.2.001	Panmud Permohonan PA Singaraja Kelas II	Panitera Pengganti PA Ciamis Kelas IA
36	ERVINA OKTRIANI, S.H. NIP. 19851011.200604.2.001	Panitera Pengganti PA Sumber Kelas IA	Panitera Pengganti PA Tasikmalaya Kelas IA
37	TEDY HENDRISMAN, S.H., M.H. NIP. 19610724.199203.1.002	Panmud Hukum PA Kuningan Kelas IA	Panitera Pengganti PA Tasikmalaya Kelas IA
38	GUN GUN GUNAWAN, S.H. NIP. 19671201.199403.1.004	Panitera Pengganti PA Bandung Kelas IA	Panitera Pengganti PA Kota Cimahi Kelas IA
39	ASEP ABDUL AZIS, S.H.I. NIP. 19840721.200704.1.001	Panitera Pengganti PA Garut Kelas IA	Panitera Pengganti PA Kota Cimahi Kelas IA
40	ENENG SITI ROHMAH, S.H. NIP. 19800201.201405.2.001	Panitera Pengganti PA Sukabumi Kelas IB	Panitera Pengganti PA Garut Kelas IA
41	NIA KURNIAWATI, S.H. NIP. 19830201.201405.2.001	Panitera Pengganti PA Cirebon Kelas IB	Panitera Pengganti PA Kuningan Kelas IA
42	HERMAN KURNIADI, S.H., M.Si. NIP. 19620507.198203.1.001	Fungsional Umum Pengadilan Agama Karanganyar Kelas IB	Panitera Pengganti PA Bogor Kelas IA
43	DHINA SARI ANGGRAENI, S.H., M.H. NIP. 19761028.200805.2.001	Panitera Pengganti PA Majalengka Kelas IA	Panitera Pengganti PA Bekasi Kelas IA
44	H. MOHAMAD RUSLI, S.H. NIP. 19710619.199203.1.002	Panitera Pengganti PA Jakarta Utara Kelas IA	Panitera Pengganti PA Bekasi Kelas IA
45	EVA ZULVA WARDIYANTI, S.H.I. NIP. 19750903.200805.2.001	Panmud Hukum PA Suwawa Kelas II	Panitera Pengganti PA Bekasi Kelas IA
46	FADHLAH LATUCONSINA, S.H. NIP. 19620310.198503.2.003	Panitera Pengganti PA Depok Kelas IA	Panitera Pengganti PA Bekasi Kelas IA
47	NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H NIP. 19900824.201403.2.003	Panitera Pengganti PA Cikarang Kelas IB	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA
48	DINI TRIANA, S.Sos, M.H. NIP. 19810621.200904.2.003	Panitera Pengganti PA Cianjur Kelas IB	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA



49	ROHILI, S.H., M.H. NIP. 19630706.198603.1.007	Kasubbag TU Bawas MARI	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA
50	ZIKRI MULIANSYAH, S.H. NIP. 19920601.201503.1.004	Panitera Pengganti PA Purwakarta Kelas IB	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA
51	WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. NIP. 19840727.200604.2.001	Panitera Pengganti PA Tangerang Kelas IA	Panitera Pengganti PA Depok Kelas IA
52	USHWATUN KHASANAH, S.H.I. NIP. 19830807.200912.2.004	Panitera Pengganti PA Bekasi Kelas IA	Panitera Pengganti PA Purwakarta Kelas IB
53	Hj. WAHIDAH, S.Ag NIP. 19710904.199803.2.001	Panitera Pengganti PA Cibinong Kelas IA	Panitera Pengganti PA Cianjur Kelas IB
54	TAUFIK MAULANI, S.H.I NIP. 19830318.201408.1.001	Panitera Pengganti PA Cibadak Kelas IB	Panitera Pengganti PA Cianjur Kelas IB
55	HERI WIDI ASTANTO, S.Sos. NIP. 19760603.200604.1.004	Panitera Pengganti PA Sleman Kelas IA	Panitera Pengganti PA Cibadak Kelas IB
56	EMON KUSMAN, S.H. NIP. 19720424.199203.1.002	Panitera Pengganti PA Purwakarta Kelas IB	Panitera Pengganti PA Cirebon Kelas IB
57	MUMU MUHIBIN, S.Sy. NIP. 19850824.201403.1.001	Fungsional Umum PA Kota Banjar Kelas II	Panitera Pengganti PA Kota Banjar Kelas II
58	ENDANG KANAWIJAYA, S.H. NIP. 19640709.199003.1.004	Fungsional Umum PA Bandung Kelas IA	Panitera Pengganti PA Soreang Kelas II
59	HIKMATULLOH, S.H.I. NIP. 19841012.201101.1.015	Panitera Pengganti PA Cilegon Kelas II	Panitera Pengganti PA Soreang Kelas II
60	IWAN SETIAWAN NIP. 19770202.200604.1.005	Fungsional Umum PA Bandung Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Bandung Kelas IA
61	ENDI SUPRIADI NIP. 19790515.201212.1.003	Fungsional Umum PA Bandung Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Bandung Kelas IA
62	ASEP LATIFUDIN NIP. 19681227.201408.1.001	Jurusita Pengganti PA Majalengka Kelas IA	Jurusita PA Majalengka Kelas IA
63	RADIKA, S.Kom. NIP. 19811230.201101.1.004	Jurusita Pengganti PA Sumber Kelas IA	Jurusita PA Sumber Kelas IA
64	KARLIYA NIP. 19811214.201405.1.001	Fungsional Umum PA Sumber Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Sumber Kelas IA

65	KURDEDI NIP. 19650612.201405.1.001	Fungsional Umum PA Sumber Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Sumber Kelas IA
66	AHMAD LADUNI NIP. 19660711.200604.1.002	Jurusita PA Cikarang Kelas IB	Jurusita PA Karawang Kelas IA
67	AA AHMAD SATIBI, S.H.I. NIP. 19791010.201408.1.003	Jurusita Pengganti PA Garut Kelas IA	Jurusita PA Garut Kelas IA
68	SUNARSO NIP. 19660306.198801.1.001	Jurusita Pengganti PA Kuningan Kelas IA	Jurusita PA Kuningan Kelas IA
69	RADEN RORO DEWI YULIKASARI, S.H. NIP. 19850716.201212.2.003	Fungsional Umum PA Kuningan Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Kuningan Kelas IA
70	SITI FATIMAH SUGIRAN, A.Md NIP. 19890320.201503.2.001	Bendahara PA Bogor Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Bogor Kelas IA
71	HERMINIDA FITRI ASTUTI, A.Md. NIP. 19930410.201503.2.002	Fungsional Umum PA Bogor Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Bogor Kelas IA
72	KOMARUDIN, S.H. NIP. 19781013.200604.1.008	Jurusita Pengganti PA Bekasi Kelas IA	Jurusita PA Bekasi Kelas IA
73	AZHARI NASUTION NIP. 19731211.200604.1.002	Jurusita PA Cirebon Kelas IB	Jurusita PA Cibinong Kelas IA
74	AAT KURNIATI, S.H. NIP. 19720706.201405.2.001	Fungsional Umum PA Depok Kelas IA	Jurusita Pengganti PA Depok Kelas IA
75	AAS SADIH NIP. 19660506.199103.2.014	Jurusita Pengganti PA Cianjur Kelas IB	Jurusita PA Cianjur Kelas IB
76	JAYANTI RACHMAWATI, S.Ap. NIP. 19940119.201903.2.008	Fungsional Umum PA Cibadak Kelas IB	Jurusita Pengganti PA Cibadak Kelas IB
77	JAJA RAHARJA NIP. 19770311.200312.1.006	Jurusita Pengganti PA Cikarang Kelas IB	Jurusita PA Cikarang Kelas IB
78	NINING ATIQOH, S.Ag. NIP. 19771206.200212.2.003	Jurusita Pengganti PA Cikarang Kelas IB	Jurusita PA Cikarang Kelas IB
79	DANG AGUSTAV H.S., S.H, M.M. NIP. 19640822.200312.1.001	Fungsional Umum PA Soreang	Jurusita PA Soreang Kelas II

## 2. Promosi dan Rotasi Bagian Kesekretariatan.

**TABEL 3.10**  
**DAFTAR PROMOSI JABATAN KESEKRETARIATAN**  
**DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Drs. H. DADANG SUDRAJAT NIP. 19640203.199303.1.001	Sekretaris PTA Banten	Sekretaris PTA Jawa Barat
2	NURUL HAKIM, S.Ag. NIP. 19761108.200312.1.002	Sekretaris PA Ciamis	Sekretaris PA Indramayu
3	MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag. NIP. 19720505.199402.1.002	Sekretaris PA Indramayu	Sekretaris PA Ciamis
4	LIA ROSLIANI, S.H.I., M.H. NIP. 19800827.200604.2.018	Sekretaris PA Kota Banjar Kelas II	Sekretaris PA Sukabumi Kelas I B
5	OFIQ TAOFIQURAHMAN, S.E. NIP. 19790530.200912.1.002	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan PTA Jawa Barat	Sekretaris PA Kota Banjar Kelas II
6	FARIDL MUZAKY, S.Kom. NIP. 19851228.201101.1.009	Kasubbag Umum dan Keuangan PA Depok Kelas I A	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PTA Jawa Barat
7	WIDIAWATY, S.E.,M.H. NIP. 19870222.200912.2.001	Bendahara Pengeluaran PTA Jawa Barat	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan PTA Jawa Barat
8	ASEP ROCHWARDIANTO, S.H.I NIP. 19761230.200701.1.002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Cirebon	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Majalengka
9	NUZULA KAUTSAR EDWAR, S.T., S.Sy NIP. 19760911.200604.1.002	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Majalengka	Kasubbag Umum & Keuangan PA Majalengka
10	EUIS MUHLISOH, S.H.I. NIP. 19700714.199403.2.002	Kasubbag Umum & Keuangan PA Majalengka	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Majalengka
11	AAH NURJANAH, S.E. NIP. 19681004.198803.2.003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Kuningan	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kuningan

12	EVAN SOFIAN, S.E.I. NIP. 19801201.200904.1.007	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kuningan	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Kuningan
13	SITI MAIMUNAH, S.H.I. NIP. 19810910.200604.2.027	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Bekasi	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Bekasi
14	NANI SUWARNI, S.Kom., M.S.I. NIP. 19821018.201101.2.013	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Bekasi	Kasubbag Umum & Keuangan PA Bekasi
15	DEWI INDAH KURNIAWATY, S.H. NIP. 19801015.200704.2.001	Kasubbag Umum & Keuangan PA Bekasi	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Bekasi
16	ANGGIE SATRIA WIRAGUNA, S.E., M.S.Ak. NIP. 19840927.200912.1.004	Jurusita Pengganti PA Cibinong Kelas I A	Kasubag Umum & Keuangan PA Cibinong Kelas I A
17	DICKY MULYAWAN, A.Md. NIP. 19840122.200604.1.002	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Sukabumi Kelas I B	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Sukabumi Kelas I B
18	HADIANSYAH, S.Kom. NIP. 19850126.200912.1.003	Kasubbag Umum & Keuangan PA Sukabumi Kelas I B	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Sukabumi Kelas I B
19	ARIF WIJI HASTOMO, S.H. NIP. 19850128.200904.1.002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Sukabumi Kelas I B	Kasubbag Umum & Keuangan PA Sukabumi Kelas I B
20	DODI PALS, S.H. NIP. 19810808.201212.1.005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Ngamprah Kelas II	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Cibadak Kelas I B
21	HAFIES YUDHA KUSUMA, S.Kom, S.H. NIP. 19860606.201101.1.009	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Cirebon Kelas I B	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Cirebon Kelas I B
22	ELIN MARTINI, S.H. NIP. 19810220.200312.2.004	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kota Tasikmalaya Kelas I A	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Kota Tasikmalaya Kelas II



23	CUCU SUCIATI, S.Sy. NIP. 19710921.200312.2.001	Kasubbag Umum & Keuangan PA Kota Tasikmalaya Kelas I A	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kota Tasikmalaya Kelas II
24	SHOFIYUDDIN MIFTAH FARID, S.Ag. NIP. 19740312.201405.1.001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Kota Tasikmalaya Kelas I A	Kasubbag Umum & Keuangan PA Kota Tasikmalaya Kelas II
25	AJAT AHMAD JAELANI, S.Ag. NIP. 19740906.201405.1.001	Jurusita Pengganti PA Garut Kelas I A	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana PA Ngamprah Kelas II
26	NELFIA KUSUMA, S.T. NIP. 19811126.201101.2.012	Fungsional Umum PTA Jawa Barat	Analisis Tatalaksana PTA Jawa Barat
27	ANDI SUNDARI, S.H. NIP. 19630127.199203.2.002	Fungsional Umum PTA Jawa Barat	Analisis Protokol PTA Jawa Barat
28	PUTTY WULANDARI APRIANI, S.I.Kom. NIP. 19910407.201503.2.001	Fungsional Umum PTA Jawa Barat	Penyusun Rencana dan Program PTA Jawa Barat
29	SITI LISNA WATI, A.Md. NIP. 19910816.201503.2.002	Fungsional Umum PTA Jawa Barat	Bendahara PTA Jawa Barat
30	SABRINA VANISSA RIZKI HILAIHI, S.H. NIP. 19960214.201903.2.005	Analisis Perkara Peradilan PA Kota Cimahi Kelas I A	Penyusun Laporan Keuangan PTA Jabar
31	RAVITA KUMARA, S.A.P. NIP. 19911023.201903.2.008	Analisis SDM Aparatur PA Kota Cimahi Kelas I A	Bendahara PTA Jawa Barat
32	SABRINA NUR AMALINA, S.Psi. NIP. 19930711.201903.2.013	Analisis SDM Aparatur PA Bekasi Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PTA Jawa Barat
33	MOCHAMAD IKSAN SURYANA P, S.T. NIP. 19841213.201903.1.002	Pranata Komputer PA Garut Kelas I A	Pranata Komputer PTA Jawa Barat
34	MURSYID ROBBANI, S.Psi. NIP. 19931208.201903.1.008	Analisis SDM Aparatur PA Majalengka Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PTA Jawa Barat
35	NANDA YOLANDA, S.Kom. NIP. 19870228.201903.1.003	Pranata Komputer PA Kota Cimahi Kelas I A	Pranata Komputer PTA Jawa Barat
36	UBUN SOHIBUL WAFA. S.H.I. NIP. 19720213.199402.1.001	Fungsional Umum PA Majalengka Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Majalengka Kelas I A

37	YULI WITDAYANTI, S.I.P. NIP. 19900709.201903.2.010	Fungsional Umum PA Majalengka Kelas I A	Analisis Kepegawaian Pertama PA Majalengka Kelas I A
38	DESTIARA MEISITA FAFITRASARI, S.H. NIP. 19911223.201903.2.009	Fungsional Umum PA Majalengka Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Majalengka Kelas I A
39	MILA AULIA DEWI, S.E. NIP. 19931106.201903.2.010	Fungsional Umum PA Ciamis Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Ciamis Kelas I A
40	SYARIEF HIDAYAH, S.Kom. NIP. 19950930.201903.1.003	Fungsional Umum PA Ciamis Kelas I A	Pranata Komputer PA Ciamis Kelas I A
41	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. NIP. 19940409.201903.2.015	Fungsional Umum PA Ciamis Kelas I A	Analisis Kepegawaian PA Tasikmalaya Kelas I A
42	AHMAD TAUFIK SENJAYA, S.Sy. NIP. 19900719.201903.1.006	Fungsional Umum PA Ciamis Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Ciamis Kelas I A
43	INTAN MAHARANI, S.I.A. NIP. 19960212.201903.2.014	Fungsional Umum PA Karawang Kelas I A	Analisis Kepegawaian PA Karawang Kelas I A
44	DESYANA RAHMA YUSTINI, S.I.A. NIP. 19961202.201903.2.004	Fungsional Umum PA Karawang Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Karawang Kelas I A
45	PUJI ASTUTI, S.E. NIP. 19850604.201903.2.005	Fungsional Umum PA Karawang Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Cimahi Kelas I A
46	DIAN OKTARIA, S.E., M.M. NIP. 19871031.201403.2.002	Fungsional Umum PA Subang Kelas I A	Bendahara PA Subang Kelas I A
47	SULISTIYANINGSING, S.H. NIP. 19891130.201903.2.005	Fungsional Umum PA Subang Kelas I A	Analisis Kepegawaian PA Subang Kelas I A
48	EVA ANDARI RAMADHINA, S.H. NIP. 19940309.201903.2.005	Fungsional Umum PA Subang Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Subang Kelas I A
49	WINDI PITRASARI, S.A.P. NIP. 19870528.201903.2.005	Fungsional Umum PA Subang Kelas I A	Analisis Kepegawaian PA Sumedang Kelas I A
50	MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS, S.Sy. NIP. 19890505.201903.1.004	Fungsional Umum PA Garut Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Garut Kelas I A
51	LISNA AMALIA, S.Psi. NIP. 19860708.201903.2.004	Fungsional Umum PA Garut Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Garut Kelas I A

52	ANNIZA PURBANINGRUM, S.Sos. NIP. 19911028.201903.2.015	Fungsional Umum PA Garut Kelas I A	Analisis Kepegawaian PA Kuningan Kelas I A
53	SITI KHOIRUNNISA, S.H.I. NIP. 19931103.201903.2.013	Fungsional Umum PA Garut Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Kuningan Kelas I A
54	ELYN PURNAMASARI, S.E. NIP. 19870818.201903.2.008	Fungsional Umum PA Garut Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Kuningan Kelas I A
55	LIA SAFITRI, S.IAN. NIP. 19940507.201903.2.008	Fungsional Umum PA Bogor Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Bogor Kelas I A
56	MAULANA TARMIZI, S.T. NIP. 19890417.201903.1.003	Fungsional Umum PA Bogor Kelas I A	Pranata Komputer PA Bogor Kelas I A
57	LIA AGUSTIN, S.E. NIP. 19901011.201903.2.016	Fungsional Umum PA Bogor Kelas I A	Penyusun Laporan Keuangan PA Bogor Kelas I A
58	AGUNG HERNANTO NIP. 19830520.200604.1.001	Fungsional Umum PA Bekasi Kelas I A	Pengadministrasi Perkara PA Bekasi Kelas I A
59	NURFATHA HARYANI, S.H. NIP. 19910927.201903.2.015	Fungsional Umum PA Bekasi Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Bekasi Kelas I A
60	CUZAINTRA BAROS, S.T. NIP. 19910927.201903.2.015	Fungsional Umum PA Bekasi Kelas I A	Pranata Komputer PA Bekasi Kelas I A
61	DODY FITRIANTO, S.Kom. NIP. 19860609.201903.1.006	Fungsional Umum PA Cibinong Kelas I A	Pranata Komputer PA Cibinong Kelas I A
62	DIAZ RIZKY SEPTIADI, S.Kom. NIP. 19870907.201101.1.009	Fungsional Umum PA Depok Kelas I A	Analisis Tatalaksana PA Depok Kelas I A
63	PUTRI DAMAYANTI, S.H. NIP. 19930306.201903.2.007	Fungsional Umum PA Depok Kelas I A	Analisis Perkara Peradilan PA Depok Kelas I A
64	NUURESA ADHE KAUTSARI, S.Psi. NIP. 19950327.201903.2.018	Fungsional Umum PA Depok Kelas I A	Analisis SDM Aparatur PA Depok Kelas I A
65	AGUS APRIYANTO, S.T. NIP. 19930829.201903.1.007	Fungsional Umum PA Depok Kelas I A	Pranata Komputer PA Depok Kelas I A
66	DADANG MAHDAR NIP. 19750529.201405.1.001	Fungsional Umum PA Depok Kelas I A	Pengadministrasi Persuratan PA Depok Kelas I A
67	H. ABDUL HALIM, S.H.,M.M NIP. 19680606.198903.1.002	Fungsional Umum PA Cianjur Kelas I B	Analisis Perkara Peradilan PA Cianjur Kelas I B
68	NISA IKHLASIAH, S.H. NIP. 19950529.201903.2.012	Fungsional Umum PA Cianjur Kelas I B	Analisis Perkara Peradilan PA Cianjur Kelas I B

69	AMINAH, S.Psi NIP. 19951106.201903.2.005	Fungsional Umum PA Cianjur Kelas I B	Analisis SDM Aparatur PA Cianjur Kelas I B
70	TYAS SANTIKA NINGRUM, S.H. NIP. 19900411.201903.2.008	Fungsional Umum PA Cirebon Kelas I B	Analisis Perkara Peradilan PA Cirebon V Kelas IB
71	HESTINA DWI SARI RUMAHORBO, S.E. NIP. 19960815.201903.2.009	Fungsional Umum PA Cirebon Kelas I B	Analisis SDM Aparatur PA Cirebon Kelas I B
72	SHANNEN ANDJANI, S.A.P. NIP. 19940730.201903.2.015	Fungsional Umum PA Cikarang Kelas I B	Analisis SDM Aparatur PA Cikarang Kelas I B
73	LINA NURAENI, S.Ag NIP. 19760115.200901.2.004	Kementrian Agama	Analisis SDM Aparatur PA Kota Banjar Kelas II
74	BUSTANUL ARIPIIN, S.H.I. NIP. 19800629.200604.1.003	Fungsional Umum PA Soreang Kelas II	Analisis Perkara Peradilan PA Soreang Kelas II
75	RINA ROHIMAH, A.Md.T. NIP. 19960624.201903.2.008	Fungsional Umum PA Soreang Kelas II	Pengelola Sistem dan Jaringan PA Soreang Kelas II
76	DWI NUR'AINI HABIBAH, S.H. NIP. 19950414.201903.2.015	Fungsional Umum PA Soreang Kelas II	Analisis Perkara Peradilan PA Soreang Kelas II
77	NOVI IRAWATY, S.E. NIP. 19841002.201903.2.008	Fungsional Umum PA Soreang Kelas II	Analisis SDM Aparatur PA Soreang Kelas II
78	RIANTIKA PUTRI KUMALA SARI, A.Md. NIP. 19911205.201903.2.008	Fungsional Umum PA Ngamprah Kelas II	Pengelola Sistem dan Jaringan PA Soreang Kelas II
79	MEGA MEIRINA, S.H. NIP. 19920506.201903.2.019	Fungsional Umum PA Ngamprah Kelas II	Analisis Perkara Peradilan PA Ngamprah Kelas II
80	KARINA DIAN AFYANI, S.E. NIP. 19930729.201903.2.005	Fungsional Umum PA Ngamprah Kelas II	Analisis SDM Aparatur PA Ngamprah Kelas II

### C. Pensiun.

Salah satu bagian dari Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan secara teknis diatur dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pegawai Negeri Sipil akan berakhir masa kepegawaiannya disebabkan antara lain :



1. Pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun;
2. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat;
5. Meninggal dunia.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang lajim dilaksanakan dan diproses adalah karena telah mencapai batas usia pensiun dengan hak-hak pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peradilan terdapat perbedaan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, terutama untuk tenaga Teknis yaitu Hakim dan Pejabat Kepaniteraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, batas usia pensiun tenaga Teknis Hakim dan Pejabat Kepaniteraan ditentukan sebagai berikut :

Hakim Tingkat Pertama	: 65 Tahun
Hakim Tingkat Banding	: 67 Tahun
Panitera, Panmud dan PP Tingkat Banding	: 62 Tahun
Panitera, Panmud dan PP Tingkat Pertama	: 60 Tahun.

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah memproses usulan Pensiun karena mencapai batas usia pensiun sebanyak 38 orang pegawai dengan perincian data sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini :

**TABEL 3.11**  
**DAFTAR SDM YANG MEMASUKI USIA Pensiun**  
**DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	Pensiun	
				JNS	TMT
1	Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, S.H. NIP. 19600108.198303.1.003	Panitera Tingkat Pertama	PA Ciamis Kls. IA	BUP	01-02-2020
2	TITI SUWARTI NIP. 19620131.198503.2.001	Juru Sita Pengganti	PA Cirebon Kls. IB	BUP	01-02-2020
3	Drs. ISYAM SAMBAS ROSYI, S.H. NIP. 19550208.198803.1.001	Hakim Tingkat Pertama	PA Garut Kls. IA	BUP	09-03-2020
4	UMI KULSUM, S.H.I. NIP. 19600215.199203.2.001	Panitera Muda Permohonan	PA Sukabumi Kls. IB	BUP	01-03-2020
5	Dra. HJ. MULIAH SIRRY NIP. 19550224.198403.2.001	Hakim Tingkat Pertama	PA Subang Kls. IA	BUP	01-03-2020
6	E.MASTUR TURMUDZI NIP. 19530304.198003.1.014	Hakim Tinggi	PTA Bandung	BUP	01-04-2020
7	SAEPULLOH, S.H.I. NIP. 19620309.198903.1.004	Juru Sita	PA Indramayu Kls. IA	BUP	01-04-2020
8	BURHANUDDIN NIP.19530402.198503.1.002	Hakim Tinggi	PTA Bandung	BUP	01-05-2020
9	M. YAMIN DAULAY NIP.19550402.198303.1.004	Hakim Tingkat Pertama	PA Bandung Kls. IA	BUP	01-05-2020
10	Hj. EUIS KARTIKA NIP.19550403.198103.2.002	Hakim Tingkat Pertama	PA Majalengka Kls. IA	BUP	01-05-2020
11	JUNED, S.H.I. 19620409.198303.1.005	Juru Sita	PA Kuningan Kls. IA	BUP	01-05-2020
12	H. ALIYUDDIN NIP.19550412.197903.1.006	Hakim Tingkat Pertama	PA Sumber Kls. IA	BUP	01-05-2020
13	ADING JAMALUDIN NIP.19620421.201408.1.001	Juru Sita Pengganti	PA Majalengka Kls. IA	BUP	01-05-2020
14	Drs. UJU BADRUDIN NIP.19600425.198803.1.001	Panitera Muda Gugatan	PA Majalengka Kls. IA	BUP	01-05-2020
15	YASYHURI, S.AG. NIP.19550512.197903.1.006	Hakim Tingkat Pertama	PA Sumber Kls. IA	BUP	01-06-2020
16	EDI SOPANDI NIP.19620518.198503.1.003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	PTA Bandung	BUP	01-06-2020

17	Dra. HJ. MIMIN, M.H. NIP.19550525.198303.2.006	Hakim Tingkat Pertama	PA Subang Kls. IA	BUP	01-06-2020
18	A. DJUDAIRI RAWIYAN, S.H. NIP.19600604.198603.1.009	Panitera Tingkat Pertama	PA Sukabumi Kls. IB	BUP	01-07-2020
19	YUNI WINARTI, S.H.I. NIP.19600609.198203.2.002	Panitera Pengganti	PA Bekasi Kls. IA	BUP	01-07-2020
20	SUJANA, BA. NIP.19600610.198903.1.004	Panitera Muda Permohonan	PA Garut Kls. IA	BUP	01-07-2020
21	IING, S.H. NIP.19620611.199203.1.003	Juru Sita	PA Ciamis Kls. IA	BUP	01-07-2020
22	SHOWAN SHOBAR SURIAWAN NIP.19530614.197903.1.003	Hakim Tinggi	PTA Bandung	BUP	01-07-2020
23	YAYA NIP.19620614.199403.1.004	Juru Sita Pengganti	PA Sumedang Kls. IA	BUP	01-07-2020
24	UNDANG EPENDI NIP.19580626.198003.1.006	Panitera Pengganti	PTA Bandung	BUP	01-07-2020
25	Drs. AJIJI ROHIM, M.H. NIP.19550705.199103.1.003	Hakim Tingkat Pertama	PA Sumber Kls. IA	BUP	01-08-2020
26	Drs. H. OSIN MOH.MUHSIN, M.Hum. NIP.19550707.198303.1.005	Ketua Pengadilan	PA Sumber Kls. IA	BUP	01-08-2020
27	ABDILLAH, S.Ag. NIP.19600806.198703.1.018	Panitera Muda Hukum	PA Ngamprah Kls. II	BUP	01-09-2020
28	MOHAMAD GUGUD, S.H.I. NIP.19620822.199402.1.001	Sekretaris	PA Sukabumi Kls. IB	BUP	01-09-2020
29	H. MUSLIH MUNAWAR NIP.19530912.198203.1.002	Hakim Tinggi	PTA Bandung	BUP	01-10-2020
30	Dra. Hj. ADE MARINAH, S.H., M.H. NIP.19551027.199402.2.001	Hakim Tingkat Pertama	PA Majalengka Kls. IA	BUP	01-11-2020
31	LILIS NURLAELA, S.H. NIP.19601103.198603.2.004	Panitera Pengganti	PA Tasikmalaya Kls. IA	BUP	01-12-2020
32	AHYA SYARIPUDIN NIP.19601126.198102.1.003	Panitera Pengganti	PA Karawang Kls. IA	BUP	01-12-2020
33	MULYAHEFNI NIP.19631113.199202.2.002	Panitera Pengganti	PA Bekasi Kls. IA	DD	30-01-2020
34	Drs. H. BURHANUDIN ALI NIP.19671114.199403.1.006	Hakim	PA Indramayu Kls. IA	JD	19-01-2020

35	Dra. TATI SUNENGSIH, S.H., M.H NIP.19640601.198801.2.001	Panmud Hukum	PA Cibinong Kls. IA	DD	05-12-2019
36	MAMAH NIP.19620418.198403.2.001	Pelaksana	PA Depok Kls. IA	BUP	01-05-2020
37	JAELANI, S.A. NIP.19630301.198603.1.002	Panitera Pengganti	PA Indramayu Kls. IA	JD	11-10-2019

#### **D. Diklat Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup lembaga pemerintahan secara umum diselenggarakan melalui Diklat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat di tempat kerja, Loka Karya, Seminar dan lainnya.

Di Lingkungan Mahkamah Agung RI kewenangan penyelenggaraan diklat berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Badan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah mengikutsertakan Hakim dan Pegawai untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, baik itu Diklat Pim maupun Diklat Teknis. Diklat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Diklat Manajemen Resiko
2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Diklat Bendahara penerima;
4. Diklat Bendahara Pengeluaran;
5. Diklat Ekonomi Syariah
6. Diklat Pim III



7. Diklat Pim IV
8. Sisdil
9. Keuangan dan PNBP
10. Diklat Prajabatan/Diklat Sar.

Peserta Diklat dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama tahun 2020 untuk semua katagori berjumlah 104 orang, dengan perincian Diklat yang diikuti sebagaimana daftar tabel di bawah ini.

**TABEL 3.12**  
**DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT**  
**SE – WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	JENIS DIKLAT											Pra jabatan	
				Manajemen Resiko	PBJ	Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran	Ekonomi Syariah	PIM II	PIM III	PIM IV	SESDIL	Keuangan Dan PNPB	Diklat Teknis Lainnya		
1	DRA. HJ. ST. MASYHADIAH D., M.H.	Ketua	PA Depok					√							√	
2	Dra. NURMIWATI, M.H.	Hakim	PA Depok					√								
3	IDAWATI, S.AG., M.H	Hakim	PA Depok					√								
4	GUNAWAN	Jurusita	PA Depok												√	
5	WIJI PININGIT, S.H.	Jurusita Pengganti	PA Depok												√	
6	Drs. DIMYATI, S.H., M.H.	Hakim	PA Sumedang					√							√	
7	Drs. ENDANG SOFWAN, M.H.	Hakim	PA Sumedang												√	
8	Drs. NURYADI SISWANTO, M.H.	Hakim	PA Sumedang												√	
9	Dra. Hj. BUDI PURWANTINI, M.H.	Hakim	PA Sumedang												√	
10	TOHAYUDIN, S.H.I., M.H.I.	Panitera Pengganti	PA Sumedang												√	
11	GILANG KHARISMA NIRWANA, S.Sy.	Panitera Pengganti	PA Sumedang												√	

12	HERIYANA EFENDI, S.T.,S.Sy	KasubagPerencanaan, TI Dan Pelaporan	PA Sumedang											√	
13	DANIA ELFITRIA, S.E.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	PA Sumedang											√	
14	WINDI PITRASARI, S.A.P.	Pelaksana	PA Sumedang											√	
15	DR. M. BASIR, M.H.	Hakim	PA Karawang	√				√							
16	Drs. H. A. SUYUTI, M.Sy	Hakim	PA Karawang					√							
17	ATO SUNARTO, S.Ag	Sekretaris	PA Karawang	√											
18	DWI YUNIANTI, S.H.	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	PA Karawang										√	√	
19	DESYANA RAHMA YUSTINI, S.I.A	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	PA Karawang										√		
20	INTAN MAHARANI, S.I.A	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	PA Karawang										√	√	
21	ANUGRAHENI TITIS APRILIANAWATI, S.I.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	PA Indramayu											√	
22	DR. H. NASICH SALAM SUHARTO LC.,L.L.M	Wakil Ketua	PA. Soreang					√							
23	DR. MAHMUD HADI RIYANTO, S.H.I., M.H.I	Hakim	PA. Soreang											√	
24	SOFIA ANNISWATI	Kasubag PTIP	PA. Soreang											√	

25	DODY FITRIANTO, S.KOM.	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	PA Cibinong												√	
26	Drs. SURAJI, M.H.	Hakim	PA Cibinong					√								
27	H. DEDE SUPRIADI, S.H., M.H.	Panitera	PA Cibinong												√	
28	IRVAN MAULANA, S.H.	Juru Sita	PA Cibinong												√	
29	ANGGIE SATRIA WIRAGUNA, S.E., M.S.AK	Kasubag Umum Dan Keuangan	PA Cibinong												√	
30	ACHMAD SOPIAN HADI, S.KOM.	TKK/Staff Umum Dan Keuangan	PA Cibinong												√	
31	SITI AISAH, S.H.	Sekretaris	PA Cibinong												√	
32	MARWAN HASBIALLOH, S.H.I., M.H.	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	PA Cibinong												√	
33	DIMAS SUJUD RAMADHAN, S.H.	TKK/Staff Kepegawaian	PA Cibinong												√	
34	DINI TRIANA, S.SOS, M.H.	Panitera Pengganti	PA Cibinong												√	
35	ZIKRI MULIANSYAH, SH.	Panitera Pengganti	PA Cibinong												√	
36	FINA AGUSTINA, S.KOM.	Kasubag PTIP	PA Cibinong												√	
37	HJ. HIDAYAH, S.AG.	Panmud Hukum	PA Cibinong												√	
38	IMAM PRATOMO BUDI SANTOSO, S.KOM.	PPNPN/Staff PTIP	PA Cibinong												√	



39	Drs. DUDIH MULYADI	Hakim	PA Garut												√	
40	MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS, S.Sy.	Analisis Perkara	PA Garut													√
41	LISNA AMALIA, S.PSI.	Bendahara Pengeluaran	PA Garut													√
42	JAMADI, LC., M.E.I	Ketua	PA Kota Tasikmalaya												√	
43	Drs. H. ASEP IMADUDIN	Ketua	PA Majalengka												√	
44	EUIS MUHLISOH, S.H.I.	Kasub. Kepegawaian Dan Ortala	PA Majalengka												√	
45	NUZULA KAUTSAR EDWAR, S.T., S.Sy.	Kasubag Umum Dan Keuangan	PA Majalengka												√	
46	ASEP ROCHWARDIANTO, S.H.I.	Kasubag PTIP	PA Majalengka							√					√	
47	YULI WIDAYANTI, S.I.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	PA Majalengka												√	
48	Drs. HASAN BASRI	Kasubag Kepegawaian & Ortala	PA Subang												√	
49	SULISTIYANINGSIH, S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	PA Subang												√	
50	EVA ANDARI RAMADHINA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PA Subang													√
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>					<b>8</b>			<b>1</b>		<b>3</b>	<b>39</b>	<b>3</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Diklat volumenya masih belum memadai dan belum menyentuh semua pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Harapan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat secara bertahap seluruh pejabat dan pegawai dapat diikutsertakan dalam kegiatan Diklat sesuai dengan jabatan dan tupoksinya masing-masing, sehingga kompetensi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat merata dan tujuan lembaga dapat dicapai secara optimal.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. Pengelolaan Keuangan.**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Semenjak tahun anggaran 2011 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing untuk Unit Organisasi Badan Urusan

Administrasi MA-RI dan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya).

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2020 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.308166/2020 tanggal 12 November 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.679.453.000,- (Dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT BUA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TA 2020**

(dalam satuan upiah)

JENIS BELANJA	DIPA 01 BUA TAHUN ANGGARAN 2020			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	18.282.613.000	0,-	3.920.729.000,-	14.361.884.000
Belanja Barang	6.971.840.000	173.388.000,-	641.183.000	6.330.657.000
Belanja Modal	425.000.000	0,-	0,-	425.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>25.679.453.000</b>	<b>173.388.000,-</b>	<b>4.561.912.000</b>	<b>21.117.541.000</b>

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 20.728.608.767 ,- atau sebesar 98,16% dari anggaran senilai Rp. 21.117.541.000. Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**TABEL 4.2**  
**RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

U R A I A N	31 DESEMBER TA 2020		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	14.361.884.000	14.261.583.289	99,30%
Belanja Barang	6.330.657.000	6.049.757.906	95,56%
Belanja Modal	425.000.000	417.267.968	98,18%
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>21.117.541.000</b>	<b>20.728.609.163</b>	<b>98,16%</b>
Pengembalian Belanja	0,-	(396)	
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>21.117.541.00</b>	<b>20.728.608.767</b>	<b>98,16%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

**GRAFIK 4.1**  
**KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2020**  
**DIPA BUA - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

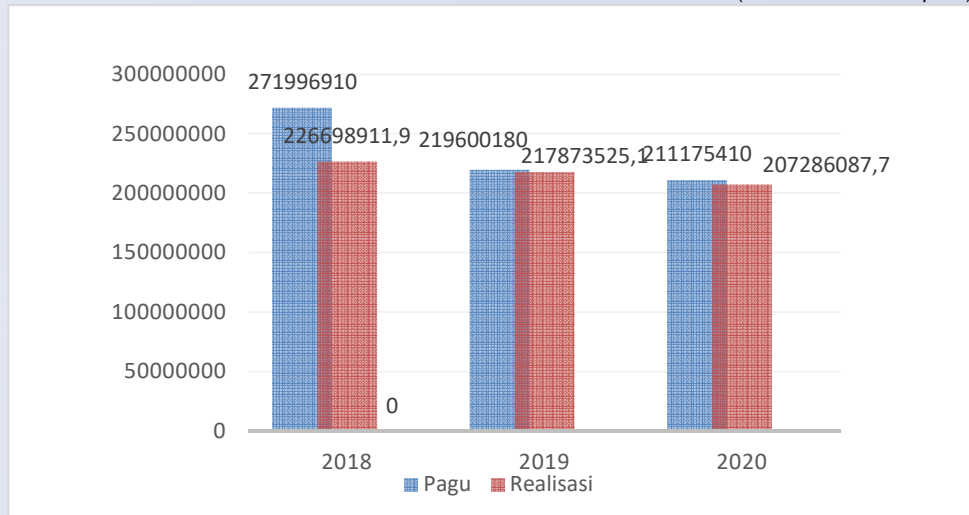
(Dalam Ribuan Rupiah)



**Sumber: Laporan Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)**

**GRAFIK 4.2**  
**PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN DIPA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

(Dalam Ribuan Rupiah)



*Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2018, 2019 dan 2020*

**a. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 14.261.582.893,- atau sebesar 99,30% dari Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.361.884.000,-.

Realisasi belanja pegawai secara total tidak melebihi pagu anggaran tahun 2020 dan penyerapan anggaran belanja pegawai telah maksimal selama tahun anggaran 2020. Sementara Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,64% dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019. Penurunan belanja pegawai ini dikarenakan beberapa mutasi keluar serta pegawai pensiun yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

**TABEL 4.3**  
**PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI TA 2020 DAN 2019**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.352.042.440	3.867.065.300	(515.022.860)	(15,364)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.622	49.095	(12.473)	(34,059)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	272.225.688	327.802.880	(55.577.192)	(20,416)
Belanja Tunj. Anak PNS	55.328.400	56.169.644	(841.244)	(1,520)
Belanja Tunj. Struktural PNS	90.125.000	93.870.000	(3.745.000)	(4,155)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.343.950.000	10.844.540.000	(2.500.590.000)	(29,969)
Belanja Tunj. PPh PNS	1.555.897.659	2.112.086.410	(556.188.751)	(35,747)
Belanja Tunj. Beras PNS	122.679.480	131.080.200	(8.400.720)	(6,848)
Belanja Uang Makan PNS	441.638.000	484.329.000	(42.691.000)	(9,667)
Belanja Tunj. Lain-lain (UDW)		-	-	
Belanja Tunjangan Umum PNS	27.660.000	29.890.000	(2.230.000)	(8,062)
Belanja Uang Lembur		-	-	
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>14.261.583.289</b>	<b>17.946.882.529</b>	<b>(3.685.299.240)</b>	<b>(25,841)</b>
Pengembalian Belanja	-396	(31.794.674)	(31.795.070)	8029058,081
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>14.261.582.893</b>	<b>17.915.087.855</b>	<b>(3.717.094.310)</b>	<b>(26,064)</b>

Realisasi Belanja pegawai seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebesar Rp. 163.232.050.856 atau 96,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 169.043.835.000. Adapun realisasi belanja pegawai untuk Satuan Kerja Pengadilan Agama se Jawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.4**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT DAN PENGADILAN AGAMA**  
**SE-WILAYAH JAWA BARAT TA 2020**

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PTA BANDUNG	14.361.884.000	14.261.582.893	99,30%	100.301.107	0,70%
2	PA BANDUNG	9.039.003.000	9.019.579.468	99,79%	19.423.532	0,21%
3	PA SUMEDANG	6.576.759.000	5.742.790.657	87,32%	833.968.343	12,68%
4	PA KOTA CIMAHI	3.742.347.000	3.373.580.715	90,15%	368.766.285	9,85%
5	PA CIAMIS	7.961.434.000	7.875.984.010	98,93%	85.449.990	1,07%
6	PA TASIKMALAYA	6.374.879.000	6.316.561.378	99,09%	58.317.622	0,91%
7	PA GARUT	7.027.973.000	6.981.402.522	99,34%	46.570.478	0,66%
8	PA BOGOR	7.576.043.000	7.523.143.692	99,30%	52.899.308	0,70%
9	PA SUKABUMI	2.416.276.000	2.368.077.133	98,01%	48.198.867	1,99%
10	PA CIANJUR	5.139.152.000	4.884.063.031	95,04%	255.088.969	4,96%
11	PA CIREBON	2.972.028.000	2.944.310.573	99,07%	27.717.427	0,93%
12	PA INDRAMAYU	9.312.779.000	9.252.658.118	99,35%	60.120.882	0,65%
13	PA MAJALENGKA	6.721.456.000	6.409.980.737	95,37%	311.475.263	4,63%
14	PA KUNINGAN	5.363.860.000	5.008.252.016	93,37%	355.607.984	6,63%
15	PA BEKASI	6.603.230.000	6.497.545.913	98,40%	105.684.087	1,60%



16	<b>PA KARAWANG</b>	5.631.067.000	5.528.859.559	98,18%	102.207.441	1,82%
17	<b>PA PURWAKARTA</b>	4.082.856.000	3.532.097.851	86,51%	550.758.149	13,49%
18	<b>PA SUBANG</b>	6.852.001.000	6.325.062.448	92,31%	526.938.552	7,69%
19	<b>PA CIBADAK</b>	3.488.034.000	2.923.984.461	83,83%	564.049.539	16,17%
20	<b>PA SUMBER</b>	9.452.656.000	9.335.803.861	98,76%	116.852.139	1,24%
21	<b>PA CIBINONG</b>	8.992.393.000	8.894.279.263	98,91%	98.113.737	1,09%
22	<b>PA CIKARANG</b>	4.607.823.000	4.601.385.305	99,86%	6.437.695	0,14%
23	<b>PA DEPOK</b>	10.371.315.000	9.623.664.472	92,79%	747.650.528	7,21%
24	<b>PA KOTA TASIKMALAYA</b>	2.753.288.000	2.680.189.833	97,35%	73.098.167	2,65%
25	<b>PA KOTA BANJAR</b>	2.159.569.000	2.078.736.633	96,26%	80.832.367	3,74%
26	<b>PA SOREANG</b>	5.939.343.000	5.929.808.244	99,84%	9.534.756	0,16%
27	<b>PA NGAMPRAH</b>	3.524.387.000	3.318.666.070	94,16%	205.720.930	5,84%
<b>TOTAL</b>		<b>169.043.835.000</b>	<b>163.232.050.856</b>	<b>96,56%</b>	<b>5.811.784.144</b>	<b>3,44%</b>

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.049.757.906,- dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.785.203.757 ,-. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 naik sebesar Rp. 1.849.153.605,- atau sebesar 34,36% dari tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah nilai anggaran dari beberapa Sub Kelompok Belanja Barang. Kenaikan belanja barang terutama dikarenakan adanya refocusing penanganan pandemi covid-19. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.5**  
**PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG TA 2020 DAN 2019**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2019	NAIK (TURUN)	%
Belanja Barang Operasional	5.381.521.647	3.532.368.042	1.849.153.605	34,36%
Belanja Barang Non Operasional	668.236.259	252.835.715	415.400.544	62,16%
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>6.049.757.906</b>	<b>3.785.203.757</b>	<b>2.264.554.149</b>	<b>37,43%</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>6.049.757.906</b>	<b>3.785.203.757</b>	<b>2.264.554.149</b>	<b>37,43%</b>

Realisasi belanja barang satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 43.176.333.684 ,- atau sebesar 97,46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 44.301.172.000 dengan sisa pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.124.838.316 dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 4.6**  
**REALISASI BELANJA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT TA 2020**

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PTA BANDUNG	6.330.657.000	6.049.757.906	95,56%	280.899.094	4,44%
2	PA BANDUNG	1.965.400.000	1.913.028.966	97,34%	52.371.034	2,66%
3	PA SUMEDANG	1.348.941.000	1.338.037.473	99,19%	10.903.527	0,81%
4	PA KOTA CIMAHI	1.902.946.000	1.900.073.530	99,85%	2.872.470	0,15%
5	PA CIAMIS	1.628.708.000	1.618.765.916	99,39%	9.942.084	0,61%
6	PA TASIKMALAYA	1.659.424.000	1.658.630.715	99,95%	793.285	0,05%

7	PA GARUT	1.358.548.000	1.329.324.410	97,85%	29.223.590	2,15%
8	PA BOGOR	1.800.516.000	1.779.567.965	98,84%	20.948.035	1,16%
9	PA SUKABUMI	945.595.000	925.552.117	97,88%	20.042.883	2,12%
10	PA CIANJUR	1.411.388.000	1.377.144.916	97,57%	34.243.084	2,43%
11	PA CIREBON	1.197.450.000	1.165.109.210	97,30%	32.340.790	2,70%
12	PA INDRAMAYU	1.568.063.000	1.440.930.376	91,89%	127.132.624	8,11%
13	PA MAJALENGKA	1.611.800.000	1.567.721.908	97,27%	44.078.092	2,73%
14	PA KUNINGAN	1.156.172.000	1.143.057.278	98,87%	13.114.722	1,13%
15	PA BEKASI	1.562.600.000	1.555.838.872	99,57%	6.761.128	0,43%
16	PA KARAWANG	1.563.834.000	1.499.818.786	95,91%	64.015.214	4,09%
17	PA PURWAKARTA	1.147.785.000	1.059.983.812	92,35%	87.801.188	7,65%
18	PA SUBANG	1.324.176.000	1.294.423.939	97,75%	29.752.061	2,25%
19	PA CIBADAK	1.508.483.000	1.465.337.991	97,14%	43.145.009	2,86%
20	PA SUMBER	1.612.126.000	1.529.182.386	94,86%	82.943.614	5,14%
21	PA CIBINONG	1.843.288.000	1.841.490.397	99,90%	1.797.603	0,10%
22	PA CIKARANG	1.250.358.000	1.209.076.037	96,70%	41.281.963	3,30%
23	PA DEPOK	1.431.660.000	1.372.011.323	95,83%	59.648.677	4,17%
24	PA KOTA TASIKMALAYA	1.260.878.000	1.251.471.955	99,25%	9.406.045	0,75%
25	PA KOTA BANJAR	1.154.060.000	1.144.648.439	99,18%	9.411.561	0,82%
26	PA SOREANG	1.402.851.000	1.397.618.961	99,63%	5.232.039	0,37%
27	PA NGAMPRAH	1.353.465.000	1.348.728.100	99,65%	4.736.900	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>44.301.172.000</b>	<b>43.176.333.684</b>	<b>97,46%</b>	<b>1.124.838.316</b>	<b>2,54%</b>

Pada Realisasi Belanja Barang satuan kerja se-wilayah PTA Jawa Barat terlihat persentase capaiannya diatas 90%, tingkat persentase realisasi yang terendah adalah Pengadilan Agama Indramayu tingkat persentase realisasi mencapai 91,89% dan yang tertinggi adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan persentase realisasi mencapai 99,95%. Secara keseluruhan peningkatan belanja barang dikarenakan adanya peningkatan untuk belanja penganan pandemi covid-19 baik belanja barang berupa pembelian masker, hand sanitiser, disinsfektan dll, maupun belanja jasa penanganan covid berupa jasa rapid dan swab tes.

c. Belanja Modal (Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung).

Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2020 yaitu Belanja Modal berupa perangkat pengolah data dan komunikasi berupa 2 unit pc komputer dan 1 unit pc touchscreen all in one, serta belanja modal pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa genset, AC, palang parkir otomatis , kursi tamu pimpinan, speaker standing, dan kursi hadap pimpinan.

Realisasi anggaran Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 417.267.968 atau sebesar 98,18% dari pagu anggaran sebesar Rp. 425.000.000. Terdapat kenaikan belanja modal sebesar 79,14% dari belanja modal pada tahun 2019 dikarenakan meningkatkan pagu anggaran belanja modal di tahun 2020. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :



**TABEL 4.7**  
**PERBANDINGAN BELANJA MODAL TA 2019 DAN 2018**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2019	NAIK (TURUN)	%
Belanja Peralatan dan Mesin	417.267.968	87.060.000	330.207.968	79,14%
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>417.267.968</b>	<b>87.060.000</b>	<b>330.207.968</b>	<b>79,14%</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>417.267.968</b>	<b>87.060.000</b>	<b>330.207.968</b>	<b>79,14%</b>

Realisasi anggaran belanja modal satuan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.666.970.524 atau 99,10% dari total pagu. Jumlah pagu anggaran belanja modal satuan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebesar Rp. 3.700.448.000 dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 33.477.476 atau 0,90% dari total pagu. Adapun realisasi belanja modal untuk Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.8**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT DAN PENGADILAN AGAMA**  
**SE-WILAYAH JAWA BARAT TA 2020**

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PTA BANDUNG	425.000.000	417.267.968	98,18%	7.732.032	1,82%
2	PA BANDUNG	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
3	PA SUMEDANG	25.000.000	24.670.000	98,68%	330.000	1,32%
4	PA KOTA CIMAH	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
5	PA CIAMIS	1.096.000.000	1.076.458.300	98,22%	19.541.700	1,78%

6	PA TASIKMALAYA	25.000.000	24.274.000	97,10%	726.000	2,90%
7	PA GARUT	149.327.000	147.565.620	98,82%	1.761.380	1,18%
8	PA BOGOR	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
9	PA SUKABUMI	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
10	PA CIANJUR	325.000.000	324.622.260	99,88%	377.740	0,12%
11	PA CIREBON	425.000.000	424.114.976	99,79%	885.024	0,21%
12	PA INDRAMAYU	25.000.000	24.750.000	99,00%	250.000	1,00%
13	PA MAJALENGKA	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
14	PA KUNINGAN	208.401.000	208.277.000	99,94%	124.000	0,06%
15	PA BEKASI	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
16	PA KARAWANG	102.500.000	102.354.200	99,86%	145.800	0,14%
17	PA PURWAKARTA	112.720.000	112.219.000	99,56%	501.000	0,44%
18	PA SUBANG	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
19	PA CIBADAK	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
20	PA SUMBER	85.000.000	84.750.000	99,71%	250.000	0,29%
21	PA CIBINONG	109.000.000	108.805.300	99,82%	194.700	0,18%
22	PA CIKARANG	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
23	PA DEPOK	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
24	PA KOTA TASIKMALAYA	25.000.000	24.798.400	99,19%	201.600	0,81%
25	PA KOTA BANJAR	25.000.000	25.000.000	100,00%	-	0,00%
26	PA SOREANG	187.500.000	187.123.500	99,80%	376.500	0,20%
27	PA NGAMPRAH	100.000.000	99.920.000	99,92%	80.000	0,08%
<b>TOTAL</b>		<b>3.700.448.000</b>	<b>3.666.970.524</b>	<b>99,10%</b>	<b>33.477.476</b>	<b>0,90%</b>

2. DIPA DITJEN Badan Peradilan Agama (Program Peningkatan Manajemen Peradilan).

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2020 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.309124/2020 tanggal 12 November 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 524.244.000,- (Lima ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

**TABEL 4.9**  
**PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2020**

(dalam satuan upiah)

JENIS BELANJA	DIPA 04 BADILAG TAHUN ANGGARAN 2020			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-	0,-
Belanja Barang	524.244.000,-	0,-	154.000.000,-	370.244.000,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-	0,-
<b>TOTAL</b>	524.244.000,-	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	370.244.000,-

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk DIPA DITJEN BADILAG per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 351.635.843,- atau sebesar 94,97% dari anggaran senilai Rp. 370.244.000,-. Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.10**  
**RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER TA 2020		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0
Belanja Barang	370.244.000,-	351.635.843,-	94,97
Belanja Modal	0,-	0,-	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>370.244.000,-</b>	<b>351.635.843,-</b>	<b>94,97</b>
Pengembalian Belanja	0,-	0,-	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>370.244.000,-</b>	<b>351.635.843,-</b>	<b>94,97</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**GRAFIK 4.3**  
**KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2020**  
**DIPA BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**



Sementara realisasi DIPA Ditjen Badilag tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 132.105.795,- atau 37,57%. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.11**  
**PERBANDINGAN BELANJA BARANG TA 2020 DAN 2019**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2020	TA 2019	PERUBAHAN	
	REALISASI	REALISASI	RP.	%
Belanja Barang	351.635.843	219.530.048	132.105.795	37,57%
Total Belanja Brutto	351.635.843	219.530.048	132.105.795	37,57%
Pengembalian Belanja	-	-	-	
Total Belanja Netto	351.635.843	219.530.048	132.105.795	37,57%

Realisasi belanja DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama ini seluruh satuan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat hanya terdapat belanja barang saja dengan realisasi tahun 2020 seluruh nya sebesar Rp. 3.026.832.600,- atau 99,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.055.300.000,-.

Adapun realisasi belanja barang DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama untuk Satuan Kerja Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.12**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG**  
**PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA TA 2020**

NO	SATKER	JUMLAH PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	PA BANDUNG	123.750.000	123.750.000	100,00	-	-
2	PA SUMEDANG	98.750.000	98.250.000	99,49	500.000	0,51
3	PA KOTA CIMAH	213.000.000	212.830.000	99,92	170.000	0,08
4	PA CIAMIS	242.000.000	242.000.000	100,00	-	-
5	PA TASIKMALAYA	221.980.000	221.980.000	100,00	-	-
6	PA GARUT	130.970.000	130.162.000	99,38	808.000	0,62
7	PA BOGOR	47.500.000	47.500.000	100,00	-	-
8	PA SUKABUMI	42.650.000	42.650.000	100,00	-	-
9	PA CIANJUR	227.100.000	217.019.600	95,56	10.080.400	4,44



10	PA CIREBON	39.800.000	39.800.000	100,00	-	-
11	PA INDRAMAYU	123.460.000	120.688.000	97,75	2.772.000	2,25
12	PA MAJALENGKA	97.666.000	97.652.000	99,99	14.000	0,01
13	PA KUNINGAN	91.040.000	91.040.000	100,00	-	-
14	PA BEKASI	42.990.000	42.990.000	100,00	-	-
15	PA KARAWANG	237.460.000	230.510.000	97,07	6.950.000	2,93
16	PA PURWAKARTA	61.350.000	60.910.000	99,28	440.000	0,72
17	PA SUBANG	114.000.000	112.036.000	98,28	1.964.000	1,72
18	PA CIBADAK	134.800.000	134.599.000	99,85	201.000	0,15
19	PA SUMBER	132.370.000	132.305.000	99,95	65.000	0,05
20	PA CIBINONG	109.800.000	108.873.000	99,16	927.000	0,84
21	PA CIKARANG	113.300.000	110.645.000	97,66	2.655.000	2,34
22	PA DEPOK	83.100.000	83.087.000	99,98	13.000	0,02
23	PA KOTA TASIKMALAYA	45.000.000	44.449.500	98,78	550.500	1,22
24	PA KOTA BANJAR	43.800.000	43.735.500	99,85	64.500	0,15
25	PA SOREANG	137.690.000	137.397.000	99,79	293.000	0,21
26	PA NGAMPRAH	99.974.000	99.974.000	100,00	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>3.055.300.000</b>	<b>3.026.832.600</b>		<b>28.467.400</b>	

## B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI, bahwa secara umum tugas dan fungsi (TUSI) Sub Bagian Umum dan Keungan adalah *“Merencanakan dan melaksanakan urusan ketata-usahaan, persuratan dan kearsipan, perpustakaan, humas, protokoler, pengadaan barang/jasa,*

*perlengkapan rumah tangga, pengelolaan dan inventaris barang milik negara serta teknologi informasi dan mengelola mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan barang/jasa sarana prasarana secara umum pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat akan dipaparkan secara general sebagai berikut :

#### 1. Kendaraan Dinas

Berdasarkan pemutakhiran data per-31 Desember 2020 secara kuantitatif kepemilikan kendaraan dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat (baik yang diperoleh dari hibah atau pengadaan mandiri) adalah 79 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 122 unit kendaraan dinas roda 2 (dua).

Kondisi semula kepemilikan kendaraan dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebanyak 16 unit, terdiri dari 6 unit kendaraan dinas roda empat dan 10 unit kendaraan dinas roda dua. Kemudian pada tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mendapat tambahan kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit, dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebanyak 1 unit dan hibah dari Pemda Provinsi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI masing-masing sebanyak 1 unit. Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat kembali mendapatkan tambahan 2 (dua) unit kendaraan dinas pimpinan berupa Toyota Camry dan Toyota Fortuner yang disewakan oleh Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah melakukan penghapusan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dinas

roda dua, dan pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat kembali mendapatkan tambahan kendaraan sewa berupa HIACE 1 unit dan Kijang Innova 1 unit.

Berdasarkan hasil pendataan per-31 Desember 2020 dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, monografi data kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Tahun 2020 sebagai berikut :

**TABEL 4.13**  
**MONOGRAFI DATA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN RODA DUA**  
**SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA**  
**BARAT TAHUN 2020**

NO.	NAMA SATKER	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			K E T
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	Sedan Camry	2010	✓			D 1457 F
		Sedan Camry	2018	✓			Sewa dari Mahkamah Agung RI
		Sedan Altis	2008	✓			D 1133 F
		Sedan Vios	2008	✓			D 1037 A
		Sedan Altis	2005	✓			D 1109 C
		Fortuner	2018	✓			Sewa dari Mahkamah Agung RI
		Kijang Innova	2009	✓			D 1188 C
		Kijang LGX	2002		✓		D 1061 B
		T. Kijang Innova	2020	✓			B 2461 UOQ
		T. HIACE Commuter MT	2020	✓			D 7112 AT
		Motor Mega Pro	2005		✓		D 4288 C
		Motor Mega Pro	2007	✓			D 5808 D
		Motor Mega Pro	2007	✓			D 6086 D
Motor Mega Pro	2007	✓			D 6087 D		

		Motor Mega Pro	2008	✓			D 6195 D
		Motor Mega Pro	2008	✓			D 6196 D
		Motor Mega Pro	2008	✓			D 6197 D
		Honda Supra X 125	2008	✓			D 6194 D
2.	Pengadilan Agama Bandung	Toyota Altis	2018	✓			Sewa dari Mahkamah Agung RI
		New Vios	2006	✓			
		Corola Altis	2008	✓			
		T. Avanza	2015	✓			
		Honda Mega Pro	2007	✓			D 5809 D
		Honda GLP III Sport	2006	✓			D 4287 C
3.	Pengadilan Agama Sumedang	T. Altis	2006	✓			
		T Kijang Innova	2009	✓			Z 55 A
		T Kijang Innova	2011	✓			Z 66 A
		Mitsubishi FE446	2006	✓			Z 7042 A
		Honda Mega Pro	2006	✓			Z 3994 A
		Honda Mega Pro	2007	✓			Z 3842 A
		Suzuki Thunder 125	2008	✓			Z 3764 A
		Suzuki	2009	✓			Z 3833 A
4.	Pengadilan Agama Kota Cimahi	T. Altis	2006	✓			
		T Kijang Innova	2006	✓			
		Isuzu Panther	2011	✓			
		Suzuki Satria	2001	✓			D 3450 D
		Honda Mega Pro	2005	✓			D 5102 A
		Honda Mega Pro	2007	✓			D 5816
		Honda Vario	2009	✓			D 2547 T
5.	Pengadilan Agama Ciamis	Toyota Altis	2012	✓			
		T Kijang Innova	2007	✓			Z 373 T

		T Kijang Innova	2011	✓			Z 402 T
		T Avansa	2006	✓			B 1899 WU
		T Dyna Short 3.7	2006	✓			B 7062 QK
		Honda Mega Pro	2006	✓			Z 5171 T
		Honda Mega Pro	2007	✓			Z 5172 T
		Honda Mega Pro	2007	✓			Z 4976 T
		Honda Mega Pro	2008	✓			Z 4975 T
		Honda NF 125 TRF	2009	✓			Z 5147 T
6.	Pengadilan Agama Tasikmalaya	T Kijang Innova	2008	✓			Z 234 H
		T Kijang Innova	2011	✓			Z 95 H
		T Avanza	2015	✓			Z 1210 N
		Honda Mega Pro	2007	✓			Z 3183 H
		Honda Win Sport	1993		✓		Z 2538 H
		Yamaha RXS 115	1998		✓		Z 2224 H
		Suzuki RU 120	2000	✓			Z 4093 H
		Honda Mega Pro	2006	✓			Z 3184 H
		Honda Mega Pro	2008	✓			Z 2004 H
		Honda Mega Pro	2008	✓			Z 2005 H
		Honda Supra X	2009	✓			Z 3176 H
7.	Pengadilan Agama Garut	T Kijang Innova	2008	✓			Z 232 E
		T Kijang Innova	2011	✓			Z 271 E
		Yamaha RX Spesial	2002	✓			Z 2220 D
		Honda Mega Pro	2006	✓			Z 5022 D



		Honda Mega Pro	2007	✓		D 5826 D
		Honda Mega Pro	2008	✓		Z 2484 E
		Supra X 125	2008	✓		Z 2483 E
		Honda Vario	2009	✓		Z 2717 E
8.	Pengadilan Agama Bogor	Toyota Altis	2006	✓		B 8134 WU
		T Kijang Innova	2006	✓		F 1455 A
		T Kijang Innova	2011		✓	F 1540 A
		Honda Supra Fit	2004	✓		F 3347 A
		Honda Mega Pro	2006	✓		F 3862 A
		Honda Mega Pro	2007	✓		F 3865 A
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 3894 A
		Honda Mega Pro	2008		✓	F 3805 A
9.	Pengadilan Agama Sukabumi	T Kijang Innova	2008	✓		F 8 S
		Toyota Avanza	2015	✓		F 1060 S
		T Kijang KF 50	1989	✓		F 265 S
		Honda GL 100	1984	✓		F 2134 S
		Suzuki RU 120	2000	✓		F 3501 S
		Honda Mega Pro	2006	✓		F 3119 S
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 3028 S
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 3029 S
10.	Pengadilan Agama Cianjur	T Kijang Innova	2007	✓		F 15 W
		Suzuki APV	2011	✓		D 1563 E
		Suzuki Satria	2001	✓		F 5558 W
		Honda Mega Pro	2006	✓		F 5559 W

		Honda Mega Pro	2007	✓		F 5557 W
		Suzuki Thunder	2008	✓		F 5032 W
		Suzuki Thunder	2008	✓		F 5033 W
		Honda CS12A1RR	2009	✓		F 5556 W
11.	Pengadilan Agama Cirebon	T Kijang Innova	2008	✓		E 10 A
		Toyota Avanza	2014	✓		E 1126 A
		Toyota Avanza	2015	✓		E 1189 A
		Honda Mega Pro	2006	✓		E 3743 A
		Supra Fit	2006	✓		E 3253 A
		Honda Mega Pro	2007	✓		E 3744 A
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 3446 A
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 3447 A
		Supra X 125	2009	✓		E 3731 A
12	Pengadilan Agama Indramayu	Toyota Kijang innova	2008	✓		E 616 P
		Toyota Kijang innova	2011	✓		E 1032 P
		Toyota Avanza	2015	✓		E 1349 P
		Honda Mega Pro	2006	✓		E 4777 P
		Honda Mega Pro	2007	✓		E 4776 P
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 4444 P
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 4443 P
		Honda Supra 125	2009	✓		E 4686 P
13.	Pengadilan Agama Majalengka	T Kijang Innova	2006	✓		E 384 U
		T Kijang Innova	2011	✓		E 77 U

		Daihatsu Terios	2013	✓		E 1103 U
		Honda WIN	2004	✓		E 3457 U
		Honda Mega Pro	2005	✓		E 3965 U
		Honda Mega Pro	2007	✓		E 3964 U
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 3809 U
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 3810 U
		Honda Revo 110	2009	✓		E 3959 U
14.	Pengadilan Agama Kuningan	T Kijang Innova	2008	✓		E 17 Y
		T Kijang Innova	2011	✓		E 487 Y
		Hoda Mega Pro	2006	✓		E 6874 Z
		Hoda Mega Pro	2007	✓		E 6875 Z
		Hoda Mega Pro	2008	✓		E 6766 Z
		Honda Supra X	2008	✓		E 6767 Z
		Honda CS1	2008	✓		E 6866 Z
15.	Pengadilan Agama Bekasi	Corola Altis	2006	✓		B 8151 WU
		Kijang Innova	2006	✓		B 1646 YQ
		Honda Mega Pro	2006	✓		B 6847 KAJ
		Honda Mega Pro	2008	✓		B 6610 KAJ
		Honda NF 125	2008	✓		B 6609 KAJ
16.	Pengadilan Agama Karawang	T Kijang Innova	2006	✓		T 66 F
		Fujico	2000	✓		T 5593 DV
		Honda Megar Pro	2006	✓		T 3268 FF
		Honda Megar Pro	2007	✓		T 3267 FF
		Honda Supra X 125	2008	✓		T 3195 FF

		Honda Megar Pro	2008	✓			T 3194 FF
		Skyweve Ultimatic	2009	✓			T 3340 FF
17.	Pengadilan Agama Purwakarta	Corola Altis	2006	✓			B 8193 WU
		T Kijang Innova	2009	✓			T 1588 A
		Honda GL 100	1984	✓			T 2515 A
		Binter	1980	✓			T 2419 L
		Honda Mega Pro	2006	✓			T 3657 A
		Honda Mega Pro	2007	✓			T 3665 A
		Honda Mega Pro	2008	✓			T 3552 A
		Honda Mega Pro	2008	✓			T 3551 A
		Honda NF 125 TRF	2009	✓			T 3667 A
		Honda Mega Pro	2012	✓			T 5017 A
18.	Pengadilan Agama Subang	T Kijang Innova	2006	✓			T 444 T
		T Kijang Innova	2011	✓			T 99 T
		Honda GL 100	1983	✓			T 2557 T
		Suzuki Satria	2000	✓			T 3133 T
		Honda Mega Pro	2006	✓			T 4871 T
		Honda Mega Pro	2007	✓			T 4872 T
		Honda Supra X	2008	✓			T 4761 T
		Honda Mega Pro	2008	✓			T 4760 T
		Supra X 125	2009	✓			T 4815 T
19.	Pengadilan Agama Cibadak	Toyota Kijang KF 50	1990	✓			F 1828 U
		T Kijang Innova	2013	✓			F 10 U
		T Kijang Innova	2006	✓			F 79 U

		Bis Hyunday	2009	✓		F 7107
		Honda Mega Pro	2006	✓		F 5205 U
		Honda Mega Pro	2007	✓		F 5204 U
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 4489 U
		Supra X 125	2008	✓		F 4488 U
		Honda Mega Pro	2009	✓		F 5203 U
20.	Pengadilan Agama Sumber	T Kijang Super	1997		✓	E 24 H
		T Kijang Innova	2007	✓		E 663 H
		Toyota Avanza	2013	✓		E 1043
		Honda GL Max	1983		✓	E 2159 H
		Honda Mega Pro	2006	✓		E 6302 H
		Honda Mega Pro	2007	✓		E 6301 H
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 5982 H
		Honda Mega Pro	2008	✓		E 5981 H
		Honda Bebek	2008	✓		E 6189 H
21	Pengadilan Agama Cibinong	T Kijang innova	2011	✓		F 1535 F
		T Kijang Innova	2006	✓		F 12 G
		Honda Mega Pro	2006	✓		D 5069 D
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 4723 F
		Honda Mega Pro	2008	✓		F 4722 F
		Honda Mega Pro	2007	✓		D 5829 D
		Suzuki Shogun 125	2009	✓		
22.	Pengadilan Agama Cikarang	Corolla Altis	2007	✓		B 1008 FQA
		T Kijang Innova	2007	✓		B 2352 HU



		Toyota Avanza	2014	✓		B 1398 FQN
		Suzuki Shogun	1999	✓		B 4456 YQ
		Honda Mega Pro	2006	✓		B 6706 FBE
		Honda Mega Pro	2007	✓		B 6705 FBE
		Honda GL 200 R	2008	✓		B 6520 FBE
		Honda NF 125 D	2008	✓		B 6521 FBE
		Honda CS1	2009	✓		B 6704 FBE
23.	Pengadilan Agama Depok	Corolla Altis	2008	✓		B 1048 HQ
		T Kijang Innova	2006	✓		B 7064 UQ
		T Kijang Innova	2011	✓		B 1086 EQN
		T Avansa	2006	✓		B 8178 WU
		Honda Mega Pro	2008	✓		B 3967 UQ
		Honda Mega Pro	2008	✓		B 3968 UQ
24.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Corolla Altis	2008	✓		B 1114 HQ
		T Kijang Innova	2012	✓		Z 1287 H
		Honda Vario	2012	✓		Z 2117 H
		Honda Vario	2012	✓		Z 2116 H
		Suzuki Satria	2001		✓	D 3444 D
		Honda Vario	2013	✓		Z 5228 H
25.	Pengadilan Agama Kota Banjar	Corolla Altis	2005			Z 1205 X
		T Kijang Innova	2012	✓		Z 9 X
		Suzuki Satria	2001	✓		D 3451 D
		Honda Mega Pro	2011	✓		Z 2968 X
		Honda Mega Pro	2012	✓		Z 2966 X
		Honda Blade 125	2015	✓		Z 3356 X
26.	Pengadilan Agama Soreang	Toyota Innova	2018	✓		Sewa dari Mahkamah Agung RI

		Toyota Rush		✓		D 1326 Z
		Suzuki APV		✓		B 2842 VQ
		Yamaha Lexi		✓		D 5906 V
		Yamaha Lexi		✓		D 5907 V
27.	Pengadilan Agama Ngamprah	Toyota Rush		✓		D 1663 U
		Suzuki APV		✓		B 2843 BQ
		Toyota LGX		✓		D 1872 A
		Mega Pro		✓		D 6088 D
		Yamaha Aerox		✓		D 3985 X
		Yamaha Aerox		✓		D 3984 D

## 2. Sarana Prasarana

### a. Tanah dan Bangunan

#### 1) Tanah

Berdasarkan pemutakhiran dan rekapitulasi data Per-31 Desember 2020, Secara umum status kepemilikan tanah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah **milik sendiri** dan ada 2 (dua) PA yang statusnya masih **pinjam pakai**, yaitu :

1. Pengadilan Agama Karawang
2. Pengadilan Agama Sumedang

Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2017 telah menerima hibah tanah dari Pemda Kabupaten Bekasi seluas 2.700 m<sup>2</sup> dan proses hibahnya sudah selesai serta sudah masuk data simak BMN

Kemudian pada tahun 2018 Pengadilan Agama Ciamis melakukan tukar guling tanah kantor Pengadilan Agama Ciamis milik Pemda Ciamis dengan tanah Pengadilan

Agama Ciamis yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran, dan sudah selesai pada akhir tahun 2018 dengan nilai kekurangan nilai tanah sebesar Rp. 135.365.000,- dan telah di bayar pada tanggal 27 Desember 2018 dan Pengadilan Agama Cibinong Pada tahun 2019 mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seluas 1.732 M2 saat ini dalam proses penyelesaian hibahnya.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan satker baru empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang bertempat di Melanguane Talaud Manado, sementara satuan kerja yang baru di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebanyak 2 (dua) satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi Pengadilan Agama Soreang menempati tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama Cimahi, karena Pengadilan Agama Cimahi berada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bandung (Soreang) sehingga satuan kerja yang belum mempunyai tanah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah:

1. Pengadilan Agama Kota Cimahi
2. Pengadilan Agama Ngamprah

2) Bangunan

Bangunan negara yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat hingga 31 Desember 2020 secara keseluruhan status kepemilikan Bangunan/Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah **milik sendiri**, namun ada 3 (tiga) satuan kerja yang bangunannya belum proto type, yaitu :

1. Pengadilan Agama Sumedang
2. Pengadilan Agama Kuningan
3. Pengadilan Agama Sukabumi

Dan 2 (dua) satuan kerja yang gedung/bangunan Kantornya masih kontrak/sewa karena belum memiliki tanah sampai dengan periode Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 ini, yaitu :

1. Pengadilan Agama Kota Cimahi, dan
2. Pengadilan Agama Ngamprah.

Berikut rekapitulasi inventaris tanah dan bangunan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2020, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4.14**  
**REKAPITULASI DATA INVENTARIS TANAH DAN**  
**BANGUNAN 2019**

NO	UNIT KERJA	TANAH		BANGUNAN			KET
		L. (M <sup>2</sup> )	NILAI	JML	L. (M <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	
1	PTA JAWA BARAT	6.858	62.330.150.000	7	3.916	15.513.169.000	Gd Baru
2	PA BANDUNG	5.354	38.696.012.150	3	2.315	6.604.500.000	Gd Baru
3	PA SUMEDANG	3.168	7.128.000.000	3	694	2.070.962.000	Gd Lama
4	PA KOTA CIMAH	-	-	-	-	-	
5	PA CIAMIS	2.539	3.485.514.000	5	3.010	7.589.228.000	Gd Baru
6	PA TASIKMALAYA	4.770	8.544.192.000	4	1.920	6.042.366.000	Gd Baru
7	PA GARUT	4.135	3.857.290.000	4	2.120	11.681.155.000	Gd Baru
8	PA BOGOR	4.029	21.593.215.000	2	2.980	9.717.622.000	Gd Baru
9	PA SUKABUMI	7.906	24.441.816.000	4	421	1.161.458.000	Gd Lama
10	PA CIANJUR	9.812	4.061.296.300	2	1.694	7.088.422.550	Gd Baru
11	PA CIREBON	3.311	30.513.207.000	5	1.985	5.663.400.000	Gd Baru
12	PA INDRAMAYU	6.458	16.232.364.000	3	2.470	7.493.124.000	Gd Baru
13	PA MAJALENGKA	6.790	5.707.742.000	3	2.382	13.576.767.528	Gd Baru
14	PA KUNINGAN	5.400	5.505.600.000	3	1.022	1.634.776.000	Gd Lama
15	PA BEKASI	3.593	17.280.390.000	2	1.522	5.993.003.000	Gd Baru
16	PA KARAWANG	600	1.767.600.000	1	1.621	4.872.615.000	Gd Baru
17	PA PURWAKARTA	3.432	6.180.312.000	5	1.581	5.660.430.000	Gd Baru
18	PA SUBANG	3.000	11.000.000.000	2	1.400	5.356.447.000	Gd Baru

19	PA CIBADAK	21.801	12.465.868.760	6	3.900	8.068.564.000	Gd Baru
20	PA SUMBER	4.817	8.399.173.000	2	1.826	5.468.838.000	Gd Baru
21	PA CIBINONG	1.732	682.408.000	1	1.440	5.504.367.000	Gd Baru
22	PA CIKARANG	2.700	1.252.800.000	1	671	2.551.446.000	Gd Baru
23	PA DEPOK	2.639	10.450.440.000	2	1.125	3.195.259.000	Gd Baru
24	PA KOTA TASIKMALAYA	4.228	7.905.607.000	1	1.200	12.993.059.350	Gd Baru
25	PA KOTA BANJAR	7.763	2.629.677.000	1	1.200	10.327.040.400	Gd Baru
26	PA SOREANG	3.621	23.370.753.000	3	2.649	9.271.041.000	Gd Baru
27	PA NGAMPRAH	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>130.456</b>	<b>335.481.427.210</b>	<b>75</b>	<b>47.064</b>	<b>169.438.629.828</b>	

Sarana dan prasarana gedung/bangunan maupun fasilitas perkantoran pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama di bawahnya, secara umum sudah memenuhi walaupun masih ada beberapa satuan kerja belum proto type, akan tetapi sarana gedung sudah cukup memenuhi standar sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Sedangkan sarana prasarana fasilitas perkantoran belum memenuhi secara maksimal, karena dengan kondisi dan tuntutan Teknologi informasi sekarang ini masih banyak fasilitas perkantoran yang belum sesuai dengan spesifikasi yang di butuhkan, walaupun demikian kondisi ini tidak mengganggu jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak mengganggu terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun matrik sarana dan prasarana gedung dan bangunan serta fasilitas perkantoran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :



**TABEL 4.15**  
**MATRIK SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DAN FASILITAS**  
**PERKANTORAN TAHUN 2019**

NO	UNIT KERJA	SARANA / PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN		
1	PTA JAWA BARAT	Ruang Ketua	1			
		Ruang Wakil Ketua	1			
		Ruang Hakim	12			
		Ruang Panitera	1			
		Ruang Sekretaris	1			
		Ruang Sidang	2			
		Ruang Kepaniteraan	2			
		Ruang Panitera Pengganti	3			
		Ruang Tunggu	0			
		Ruang Pelayanan	1			
		Ruang Mediasi	0			
		Ruang Menyusui	0			
		Ruang Perpustakaan	1			
		Ruang Kesekretariatan	3			
		Kantin	1			
		Mushola	1			
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>				
		Komputer	85			
		Laptop	51			
		Infokus	7			
		PABX	0			
		Mesin Photo Copy	1			
		AC	54			
		Faximile	1			
		Server	7			
		Genset	1			
		Printer	55			
Scanner	7					
Mesin Absensi	2					
CCTV	27					
Brandkas	5					
2	PA BANDUNG	Ruang Ketua	1			
		Ruang Wakil Ketua	1			
		Ruang Hakim	3			
		Ruang Panitera	1			
		Ruang Sekretaris	1			
		Ruang Sidang	5			
		Ruang Kepaniteraan	1			
		Ruang Panitera Pengganti	1			
		Ruang Tunggu	1			
		Ruang Jurusita Pengganti	1			
		Ruang Pelayanan	1			
		Ruang Mediasi	1			
		Ruang Menyusui	1			
		Ruang Perpustakaan	1			
		Ruang Kesekretariatan	1			
		Kantin	1			

		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	58	
		Laptop	35	
		Infokus	1	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	1	
		AC	39	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	31	
		Scanner	4	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	5	
		Brandkas	2	
3	PA SUMEDANG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	49	
		Laptop	34	
		Infokus	2	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	4	
		Faximile	1	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	31	
		Scanner	5	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	1	
		Brandkas	1	
4	PA KOTA CIMAHI	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	38	
		Laptop	16	
		Infokus	1	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	1	
		AC	36	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	32	
		Scanner	1	

		Mesin Absensi	2	
		CCTV	0	
		Brandkas	3	
5	PA CIAMIS	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	3	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	5	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	0	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	56	
		Laptop	16	
		Infokus	2	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	37	
		Faximile	1	
		Server	6	
		Genset	2	
		Printer	30	
		Scanner	3	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	2	
6	PA TASIKMALAYA	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	50	
		Laptop	17	
		Infokus	0	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	1	
		AC	26	
		Faximile	1	
		Server	4	
		Genset	2	
		Printer	45	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	0	
		Brandkas	4	

7	PA GARUT	Ruang Ketua	1			
		Ruang Wakil Ketua	1			
		Ruang Hakim	2			
		Ruang Panitera	1			
		Ruang Sekretaris	1			
		Ruang Sidang	4			
		Ruang Kepaniteraan	1			
		Ruang Panitera Pengganti	2			
		Ruang Tunggu	1			
		Ruang Jurusita Pengganti	1			
		Ruang Pelayanan	1			
		Ruang Mediasi	2			
		Ruang Menyusui	1			
		Ruang Perpustakaan	1			
		Ruang Kesekretariatan	1			
		Kantin	1			
		Mushola	1			
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>				
		Komputer	48			
		Laptop	21			
		Infokus	1			
		PABX	0			
		Mesin Photo Copy	0			
		AC	25			
		Faximile	1			
		Server	7			
		Genset	1			
		Printer	49			
		Scanner	2			
Mesin Absensi	0					
CCTV	0					
Brandkas	3					
8	PA BOGOR	Ruang Ketua	1			
		Ruang Wakil Ketua	1			
		Ruang Hakim	2			
		Ruang Panitera	1			
		Ruang Sekretaris	1			
		Ruang Sidang	3			
		Ruang Kepaniteraan	1			
		Ruang Panitera Pengganti	1			
		Ruang Tunggu	1			
		Ruang Jurusita Pengganti	1			
		Ruang Pelayanan	1			
		Ruang Mediasi	1			
		Ruang Menyusui	1			
		Ruang Perpustakaan	1			
		Ruang Kesekretariatan	1			
		Kantin	1			
		Mushola	1			
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>				
		Komputer	38			
		Laptop	21			
		Infokus	1			
		PABX	1			
		Mesin Photo Copy	0			
		AC	24			
		Faximile	1			
		Server	1			
		Genset	0			
		Printer	45			
		Scanner	4			
Mesin Absensi	1					
CCTV	18					
Brandkas	2					
9	PA SUKABUMI	Ruang Ketua	1			
		Ruang Wakil Ketua	1			
		Ruang Hakim	1			

		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	2	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	26	
		Laptop	21	
		Infokus	1	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	4	
		Faximile	3	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	22	
		Scanner	4	
		Mesin Absensi	2	
		CCTV	2	
		Brandkas	2	
10	PA CIANJUR	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	34	
		Laptop	16	
		Infokus	2	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	11	
		Faximile	0	
		Server	1	
		Genset	0	
		Printer	22	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	1	
		Brandkas	2	
11	PA CIREBON	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	2	



		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	0	
		Rumah Genset	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	29	
		Laptop	9	
		Infokus	0	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		TV	4	
		AC	27	
		LCD	2	
		Faximile	0	
		Server	3	
		Genset	1	
		Printer	21	
		Scanner	4	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	4	
		Brandkas	2	
12	PA INDRAMAYU	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	3	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	5	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	0	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	45	
		Laptop	22	
		Infokus	0	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	34	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	1	
		Printer	49	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	0	
		Brandkas	2	
13	PA MAJALENGKA	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	3	
		Ruang Panitera	1	

		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	5	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	2	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	2	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	29	
		Laptop	20	
		Infokus	0	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	39	
		Faximile	0	
		Server	3	
		Genset	1	
		Printer	24	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	14	
		Brandkas	3	
14	PA KUNINGAN	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	2	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	0	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	24	
		Laptop	10	
		Infokus	1	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	13	
		Faximile	0	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	8	
		Scanner	1	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	0	
		Brandkas	0	
15	PA BEKASI	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	4	
		Ruang Kepaniteraan	1	

		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	58	
		Laptop	18	
		Infokus	0	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	40	
		Faximile	1	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	47	
		Scanner	1	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	0	
		Brandkas	2	
16	PA KARAWANG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	3	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	47	
		Laptop	20	
		Infokus	2	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	47	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	27	
		Scanner	4	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	4	
		Brandkas	1	
17	PA PURWAKARTA	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	

		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	0	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	23	
		Laptop	25	
		Infokus	5	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	7	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	1	
		Printer	32	
		Scanner	3	
		Mesin Absensi	2	
		CCTV	0	
		Brandkas	2	
18	PA SUBANG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	25	
		Laptop	16	
		Infokus	0	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	20	
		Faximile	1	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	17	
		Scanner	1	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	2	
		Brandkas	2	
19	PA CIBADAK	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	5	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	

		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	39	
		Laptop	21	
		Infokus	1	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	47	
		Faximile	0	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	55	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	1	
20	PA SUMBER	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	4	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	35	
		Laptop	12	
		Infokus	1	
		PABX	2	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	30	
		Faximile	0	
		Server	3	
		Genset	1	
		Printer	30	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	4	
		Brandkas	2	
21	PA CIBINONG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	



		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	33	
		Laptop	35	
		Infokus	1	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	30	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	37	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	1	
		Brandkas	4	
22	PA CIKARANG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	2	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	0	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	0	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	40	
		Laptop	15	
		Infokus	0	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	20	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	27	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	4	
23	PA DEPOK	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	39	

		Laptop	20	
		Infokus	1	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	31	
		Faximile	1	
		Server	3	
		Genset	0	
		Printer	33	
		Scanner	1	
		Mesin Absensi	0	
		CCTV	0	
		Brandkas	2	
24	PA KOTA TASIKMALAYA	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	1	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	2	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	23	
		Laptop	11	
		Infokus	0	
		PABX	1	
		Mesin Photo Copy	1	
		AC	31	
		Faximile	1	
		Server	2	
		Genset	1	
		Printer	21	
		Scanner	3	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	2	
25	PA KOTA BANJAR	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	2	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	3	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	1	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	1	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	0	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	24	
		Laptop	13	

		Infokus	1	
		PABX	2	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	33	
		Faximile	1	
		Server	2	
		Genset	1	
		Printer	23	
		Scanner	5	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	15	
		Brandkas	2	
26	PA SOREANG	Ruang Ketua	1	
		Ruang Wakil Ketua	1	
		Ruang Hakim	3	
		Ruang Panitera	1	
		Ruang Sekretaris	1	
		Ruang Sidang	4	
		Ruang Kepaniteraan	1	
		Ruang Panitera Pengganti	2	
		Ruang Tunggu	1	
		Ruang Jurusita Pengganti	2	
		Ruang Pelayanan	1	
		Ruang Mediasi	1	
		Ruang Menyusui	1	
		Ruang Perpustakaan	1	
		Ruang Kesekretariatan	1	
		Kantin	1	
		Mushola	1	
		<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	33	
		Laptop	10	
		Infokus	0	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	2	
		AC	22	
		Faximile	0	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	6	
		Scanner	2	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	2	
27	PA NGAMPRAH	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
		Komputer	20	
		Laptop	10	
		Infokus	0	
		PABX	0	
		Mesin Photo Copy	0	
		AC	11	
		Faximile	0	
		Server	2	
		Genset	0	
		Printer	13	
		Scanner	3	
		Mesin Absensi	1	
		CCTV	1	
		Brandkas	2	

b. Rumah Dinas

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang fasilitas dan gaji tunjangan pejabat negara, mulai

bulan Agustus 2019, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sewa rumah dinas bagi pejabat negara, karena rumah dinas pejabat negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat khususnya belum memadai, bahkan masih banyak satuan kerja yang belum mempunyai rumah dinas, kalau pun ada masing-masing satuan kerja hanya mempunyai satu rumah dinas dengan kondisi rusak ringan dan tidak di tempati karena kurang layak untuk di huni serta jarak rumah dinas dengan kantor sangat jauh ditambah kondisi jalan yang macet.

Seperti halnya rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, mempunyai rumah dinas hanya 1 hibah dari yayasan Ar-Rahman pada tahun 2016 yang tertelat di Komplek Perumahan Koprime Cibabat Cimahi utara dengan luas bangunan 180 m<sup>2</sup>, rumah dinas ini tidak di tempati karena kondisi jauh dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 714 Gedebage Bandung, di samping itu pula jalan akses dari rumah dinas ke kantor atau sebaliknya waktu pagi dan sore sangat macet, sehingga rumah dinas tersebut kosong sampai sekarang.

Saat ini belum ada perhatian khusus dari Mahkamah Agung RI untuk memperbaiki / merehabilitasi rumah dinas. Adapun daftar rumah dinas masing-masing satuan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sampai dengan 31 Desember 2020, sebagaimana di tuangkan dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 4.16**  
**DAFTAR RUMAH DINAS SATUAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2019**

No	Satuan Kerja	Uraian	Jumlah	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1.	PTA Jawa Barat	Rumah Dinas Ketua	1	✓		Isi
2.	PA Bandung	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
3.	PA Sumedang	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
4.	PA Cimahi	Rumah Dinas Ketua	1	✓		Kosong
5.	PA Ciamis	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
6.	PA Tasikmalaya	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
7.	PA Garut	Rumah Dinas Ketua	1	✓		
8.	PA Bogor	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
9.	PA Sukabumi					
10.	PA Cianjur					
11.	PA Cirebon	Rumah Dinas Ketua	1	✓		
12.	PA Indramayu	Rumah Dinas Ketua	1	✓		
13.	PA Majalengka					
14.	PA Kuningan					
15.	PA Bekasi					
16.	PA Karawang					
17.	PA Purwakarta	Rumah Dinas Ketua	1		✓	Kosong
18.	PA Subang					
19.	PA Cibadak	Rumah Dinas	2	✓		
20.	PA Sumber					
21.	PA Cikarang					
22.	PA Depok					
23.	PA Tasikmalaya					
24.	PA Kota Tasikmalaya					
25.	PA Kota Banjar					
26.	PA Ngamprah					
27.	PA Soreang					



## **C. Pengelolaan Teknologi Informasi.**

### **1. Implementasi e-Court.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut dan sesuai dengan perkembangan zaman perlu dilakukan pembaruan dalam hal pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara efektif dan efisien guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik ini merupakan langkah awal Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan Peradilan Modern yang berbasis Teknologi Informasi.

Implementasi e-Court di Pengadilan merupakan cara dalam meningkatkan pelayanan peradilan dengan menyederhanakan acara peradilan guna mewujudkan asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Implementasi penerimaan perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat sudah dilaksanaka dan perkara yang masuk melalui e-Court sudah signifikan jumlahnya. Hal ini disebabkan karena Sosialisasi e-Court yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dapat memberikan gambaran kemudahan proses berperkara (sederhana, cepat dan biaya ringan) sehingga masyarakat pencari keadilan tertarik untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-Court tersebut. Berikut jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat melalui e-Court sebagaimana daftar tabel dibawah ini :

**TABEL 4.17**  
**DAFTAR PENERIMAAN PERKARA MELALUI e-COURT**  
**DI PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT**  
**TAHUN 2020**

NO	PENGADILAN AGAMA	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	BEBAN PERKARA	PERKARA DICABUT	PERKARA DIPUTUS	SISA TAHUN INI
1	PA BANDUNG	78	1750	1828	188	1323	274
2	PA INDRAMAYU	3	274	277	32	222	19
3	PA MAJALENGKA	5	154	159	7	133	15
4	PA SUMBER	16	960	976	121	759	68
5	PA CIAMIS	131	1390	1521	62	1403	43
6	PA TASIKMALAYA	18	1145	1163	34	1122	6
7	PA KARAWANG	6	896	902	62	770	58
8	PA KOTA CIMAHI	5	231	236	36	166	28
9	PA SUBANG	5	235	240	32	177	23
10	PA SUMEDANG	0	2137	2137	74	1966	91
11	PA PURWAKARTA	2	756	758	81	604	54
12	PA SUKABUMI	10	203	213	21	180	8
13	PA CIANJUR	10	118	128	12	111	5
14	PA KUNINGAN	0	105	105	10	93	2
15	PA CIBADAK	28	435	463	22	402	28
16	PA CIREBON	3	84	87	11	67	7
17	PA GARUT	2	433	435	41	371	19
18	PA BOGOR	21	301	322	34	235	43
19	PA BEKASI	32	556	588	77	415	92
20	PA CIBINONG	34	1266	1300	136	923	218
21	PA CIKARANG	71	1189	1260	95	1048	109

22	PA DEPOK	62	792	854	97	671	82
23	PA KOTA TASIKMALAYA	10	872	882	44	830	8
24	PA KOTA BANJAR	44	304	348	18	324	5
25	PA SOREANG	101	1795	1896	129	1563	204
26	PA NGAMPRAH	26	753	779	38	682	46
<b>J U M L A H</b>		<b>723</b>	<b>19134</b>	<b>19857</b>	<b>1514</b>	<b>16560</b>	<b>1555</b>

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 203/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Uji Coba Aplikasi Implementasi e court Fitur Upaya Hukum Banding, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawahnya ditunjuk sebagai **pengadilan uji coba implementasi e court Fitur** Upaya Hukum Banding.

Pada bulan Oktober 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah melakukan sosialisasi Implementasi Fitur Upaya Hukum Banding kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/3584/PP.00.3/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Adapun yang menjadi peserta Sosialisasi adalah:

1. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama
2. Satu orang hakim yang memahami SIPP dan e court
3. Panitera/Panitera Muda Gugatan yang memahami SIPP dan e cort
4. Satu orang Tenaga Admin

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah menerima 2 (dua) perkara banding melalui e cort, perkara banding tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 4.18**  
**PERKARA BANDING e - COURT**

NO	NOMOR		TANGGAL	
	PERKARA TK I	PERKARA TK BANDING	REGISTER	PUTUS
1	1981/Pdt.G/2020/PA.Badg	271/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	11-11-2020	03-12-2020
2	2336/Pdt.G/2020/PA.Cbn	272/Pdt.G/2020/PTA.Bdg	11-11-2020	30-11-2020

## 2. Implementasi SIPP.

Pada awalnya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bernama lain *CTS (Case Tracking System)* yang dibuat untuk lebih memudahkan publik mengakses riwayat perkara. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung RI tentang transparansi lembaga peradilan dan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja peradilan maka dibuatlah aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk Mahkamah Agung RI. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah karena selain data-data yang terkait dengan perkara, juga dapat dilihat data jumlah hakim dan penyebarannya, data panitera, kepatuhan pengisian perkara baru, kepatuhan pengisian jadwal sidang, statistik jumlah perkara masuk dan putus, statistik perkara yang terlambat penyelesaiannya, keberhasilan proses mediasi, demikian juga performance atau kinerja setiap pengadilan akan dapat dilihat.

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien. Monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan



berbiaya murah. Layanan Informasi Berbasis Teknologi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis.

Apabila selama ini, pendokumentasikan administrasi perkara secara manual, maka akses untuk pengawasan juga hanya bisa dilakukan secara manual. Dengan adanya SIPP, maka sebagai sebuah aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi, membawa konsekuensi akan dapat dihubungkan kepada aplikasi lainnya dan dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan Pengadilan, sebagai konsekuensi sistem peradilan bertingkat, maka SIPP pada Pengadilan Agama, akan terhubung dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI.

Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara *realtime*. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web. Aplikasi SIPP Tingkat Banding telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur-fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasikan keadaan perkaranya.

Sistem administrasi peradilan harus selalu berjalan dengan baik. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi harus terus dilakukan di bawah koridor kebijakan Mahkamah Agung. Sistem evaluasi harus dilaksanakan secara periodik untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kinerja setiap satuan kerja. Hambatan dan permasalahan harus terus dicarikan solusinya agar gerak organisasi pengadilan bisa terus berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin



mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.

Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).**

Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terus dilakukan dengan berbagai upaya dalam peningkatan mutu dan kinerja pelayanan antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama. Dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina Pengadilan Agama, peran tersebut adalah sebagai penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dan peran pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai regulator.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi tahapan Asessmen APM dan tahapan penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan dan penerbitan Sertifikat.

Saat ini sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2081.b / DJA / OT.01.3 / SK / 10 / 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan

Agama yang kompeten untuk melakukan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu secara obyektif guna menilai kesesuaiannya terhadap kriteria asesmen sesuai standar dan poin penilaian yang telah ditetapkan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama agar terwujudnya performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul (*Indonesian Court Performance – Excellent (ICP-E)*) dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian, yaitu :

- a. Kepemimpinan (*Leadership*);
- b. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
- c. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
- d. Sistem Dokumen (*Document System*);
- e. Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
- f. Manajemen Proses (*Process Management*);
- g. Hasil Kinerja (*Performance Result*).

Untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Program Akreditasi Penjaminan Mutu seluruh satuan kerja sebanyak 26 (duapuluh enam) Pengadilan Agama telah terakreditasi dengan predikat 'A' Excellent dan di tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah berhasil melakukan asesmen surveilliance ke seluruh satuan kerja, namun untuk tahun 2020 metode asesmen telusur dokumen seluruhnya oleh Asessor Eksternal dan pendamping Asessor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan untuk Asessmen Observasi Implementasi sebanyak 13 satuan kerja oleh Tim Asessor Badilag dan 13 satuan kerja oleh Tim asessor Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Adapun hasil dari Surveilliance tersebut sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor : 3951/DjA/HM-00/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang penetapan Hasil Asessmen Surveilliance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020 dan seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tetap

berpredikat “A” Excellent. Secara rinci pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**TABEL 5.1**  
**MATRIKS PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT DAN**  
**PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	S A T K E R	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)				PREDIKAT
		ASSESMEN EKSTERNAL	SURVEILLANCE I	SURVEILLANCE II	SURVEILLANCE III	
1	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	November 2020	A Excellent
2	Pengadilan Agama Bandung	November 2017	November 2018	November 2019	Desember 2020	A Excellent
3	Pengadilan Agama Karawang	November 2017	November 2018	November 2019	Desember 2020	A Excellent
4	Pengadilan Agama Ciamis	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
5	Pengadilan Agama Tasikmalaya	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
6	Pengadilan Agama Sumber	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
7	Pengadilan Agama Garut	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
8	Pengadilan Agama Bekasi	November 2017	November 2018	November 2019	Desember 2020	A Excellent
9	Pengadilan Agama Bogor	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
10	Pengadilan Agama Depok	November 2017	November 2018	November 2019	November 2020	A Excellent
11	Pengadilan Agama Cibinong	November 2017	November 2018	November 2019	Desember 2020	A Excellent



NO	S A T K E R	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)				PREDIKAT
		ASESMEN EKSTERNAL	SURVEILLANCE I	SURVEILLANCE II	SURVEILLANCE III	
12	Pengadilan Agama Purwakarta	November 2017	November 2018	November 2019	Desember 2020	A Excellent
13	Pengadilan Agama Kota Banjar	November 2017	November 2018	November 2029	November 2020	A Excellent
14	Pengadilan Agama Indramayu	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
15	Pengadilan Agama Majalengka	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
16	Pengadilan Agama Sumedang	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
17	Pengadilan Agama Subang	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
18	Pengadilan Agama Cimahi	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
19	Pengadilan Agama Kuningan	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
20	Pengadilan Agama Cibadak	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
21	Pengadilan Agama Cirebon	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent

NO	S A T K E R	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)				PREDIKAT
		ASSESMEN EKSTERNAL	SURVEILLANCE I	SURVEILLANCE II	SURVEILLANCE III	
22	Pengadilan Agama Sukabumi	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
23	Pengadilan Agama Cianjur	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
24	Pengadilan Agama Cikarang	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
25	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Juni 2018	Juni 2019	November 2020	Juni 2021	A Excellent
26	Pengadilan Agama Soreang	November 2019	November 2020	November 2020	Juni 2021	A Excellent
27	Pengadilan Agama Ngamprah	November 2019	November 2020	November 2020	Juni 2021	A Excellent

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama, hal ini di buktikan dengan kesungguhannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Tujuan PTSP adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP ini dibentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP tersebut diatas. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*front office*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mengintruksikan untuk mengidentifikasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di setiap satuan kerja pengadilan dengan surat nomor : 0843/DjA/HM.00/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal

Himbauan untuk mengidentifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya pelayanan Peradilan Agama yang prima dan berkinerja baik.

Atas dasar himbauan tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membuat surat edaran dengan surat nomor : W10.A/1057/HM.00/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Identifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Berdasarkan himbauan Dirjen Badan Peradilan Agama dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maka seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mulai berbenah dan melaksanakannya bahkan hampir seluruh satuan kerja di Jawa Barat sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan merenovasi sistem pelayanan dan sarana pelayanan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan di masing-masing satuan kerja.

Di samping itu pula PTSP ini merupakan salah satu penilaian yang sangat menunjang dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan hampir seluruh satuan kerja di Jawa Barat sudah mendapatkan sertifikat APM bahkan satuan kerja yang baru yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah sudah dilakukan Assesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu, namun ada pengumuman hasil assesmen tersebut.

Dengan diberlakukannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini setidaknya sudah mengurangi praktek percaloan dalam proses pendaftaran perkara yang dilakukan oleh oknum pegawai, karena dalam proses pelayanan PTSP ini pintu pengguna layanan dengan pegawai dipisah dan pegawai tidak boleh berada di area PTSP kecuali petugas.

Disamping itu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu penilaian Pelayanan Publik dalam Penilaian Prestasi



Kinerja Pengadilan Agama di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan bobot penilaian sebesar 5% sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4102/DJA/KP.02.1/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perbaikan Penilaian Dalam Prestasi Kinerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2020 dengan urutan sebagai berikut :

**TABEL 5.2**  
**PENILAIAN PRESTASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A**  
**TRIWULAN III TAHUN 2020**

NO.	NAMA SATKER	PERINGKAT	NILAI PTSP	KETERANGAN
1.	PA BANDUNG	13	5,00	
2.	PA BEKASI	21	5,00	
3.	PA BOGOR	24	5,00	
4.	PA TASIKMALAYA	31	4,50	
5.	PA CIAMIS	41	5,00	
6.	PA SUMEDANG	34	4,40	
7.	PA KOTA CIMAHI	50	4,75	
8.	PA MAJALENGKA	54	5,00	
9.	PA KARAWANG	60	5,00	
10.	PA SUMBER	63	5,00	
11.	PA DEPOK	68	4,90	
12.	PA SUBANG	76	5,00	
13.	PA KUNINGAN	78	4,90	
14.	PA CIBINONG	79	4,80	
15.	PA INDRAMAYU	80	4,95	
16.	PA GARUT	81	4,95	



**TABEL 5,3**  
**PENILAIAN PRESTASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B**  
**TERIWULAN III TAHUN 2020**

NO.	NAMA SATKER	PERINGKAT	NILAI PTSP	KETERANGAN
1.	PA CIKARANG	63	5,00	
2.	PA PURWAKARTA	68	4,65	
3.	PA SUKABUMI	71	4,90	
4.	PA CIANJUR	93	4,90	
5.	PA CIBADAK	99	4,90	
6.	PA CIREBON	103	4,50	

**TABEL 5.4**  
**PENILAIAN PRESTASI PENGADILAN AGAMA KELAS II**  
**TERIWULAN III TAHUN 2020**

NO.	NAMA SATKER	PERINGKAT	NILAI PTSP	KETERANGAN
1.	PA KOTA TASIKMALAYA	115	5,00	
2.	PA KOTA BANJAR	143	4,75	
3.	PA SOREANG	193	5,00	
4.	PA NGAMPRAH	210	4,40	

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat PTSP sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, berdasarkan hasil survey pada saat surveillan sarana prasarana pada PTSP ebagian besar Satker sudah memadai baik itu CCTV, brosur, komputer, telepon, alat tulis kantor dan kursi pengguna layanan sudah tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Adapun untuk lebih jelasnya kami sampaikan keadaan sarana prasarana pendukung PTSP

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai berikut :

**TABEL 5.5.**  
**DAFTAR SARANA PRASARANA PTSP**  
**SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PTA JAWA BARAT**

NO	NAMA SATKER	Meja Terintegrasi	Kursi Petugas Dan Pengguna Layanan	Komputer Yang Terhubung Dengan SIPP	Printer 3 in 1 (cetak dan scan)	Alat Tulis Kantor	Telepon/Faksimili	Buku Register, Jurna, Ekspedisi dll	Brosur / Banner	Nama Dan Foto Petugas PTSP	Mesin Antrian	TV Media Center	C CTV
1.	PTA Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
2.	PA Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	PA Sumedang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	PA Cimahi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	PA Ciamis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	PA Tasikmalaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	PA Garut	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	PA Bogor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	PA Sukabumi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	PA Cianjur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	PA Cirebon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	PA Indramayu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	PA Majalengka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	PA Kuningan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.	PA Bekasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16.	PA Karawang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17.	PA Purwakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
18.	PA Subang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19.	PA Cibadak	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20.	PA Sumber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

21.	PA Cibinong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22.	PA Cikarang	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
23.	PA Depok	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24.	PA Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25.	PA Kota Banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26.	PA Soreang	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
27.	PA Ngamprah	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	√

### C. Inovasi Pelayanan Publik.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah membuat terobosan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor : 3342/DJA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah melakukan uji coba implementasi terhadap 9 (Sembilan) aplikasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama, ke Sembilan aplikasi tersebut yaitu antara lain :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara;
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;
3. Aplikasi Antrian Sidang;
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;
5. Commad Center;
6. Aplikasi PNBPFungsional;
7. Aplikasi e-Eksaminasi;
8. Aplikasi e-Register, dan
9. Aplikasi e-Kuangan.

Peluncuran Aplikasi tersebut merupakan wujud nyata Ditjen Badan Peradilan Agama dalam mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : B126/PP.00.05/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai pelopor dan kawal depan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik telah meluncurkan beberapa aplikasi yang menunjang dalam pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, salah satunya adalah aplikasi SIKABAYAN Sistem Informasi Tabayun Dan Pengawasan. Sikabayan merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat guna mempermudah monitoring dan evaluasi di Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun aplikasi tersebut antara lain :

1. Kepaniteraan :

- 1.1 Monitoring SIPP
- 1.2 Monitoring Tabayun
- 1.3 Monitoring e-court
- 1.4 e-Buku Induk Keuangan Perkara
- 1.5 e-Laporan Perkara
- 1.6 e-Register
- 1.7 Statistik Perkara

2. Kesekretariatan :

- 2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Manual
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan
- 2.3 Penilaian Database Pegawai (PDP)
- 2.4 Sikembar (Sistem Informasi kepegawaian PTA Jawa Barat)



## Profil Aplikasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat



Disamping Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat juga berlomba dalam peningkatan pelayanan publik dengan membuat beberapa inovasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

Berikut daftar beberapa satker Pengadilan Agama yang telah berhasil membuat inovasi dan telah dilakukan launching, diantaranya :

**TABEL 5.6**  
**INOVASI PELAYANAN PUBLIK**  
**PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA**  
**BARAT TAHUN 2020**

NO	SATKER	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT
1	PA BANDUNG	1. Sistem Informasi Perkara dan Penelusuran Akta Cerai (SIPACAR)	Aplikasi mobile berbasis Android yang bisa di download di playstore; Digunakan untuk mengetahui informasi perkara yang meliputi jadwal sidang, keuangan perkara dan pengecekan produk (Akta Cerai)



		2.	SIANDU (Sistem Antrian Pelayanan Terpadu)	Aplikasi berbasis desktop yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, yang dapat digunakan pada : 1. Layanan Informasi; 2. Layanan Pendaftaran; 3. Layanan Pengambilan Produk; 4. Kasir; 5. BRI; 6. POS; 7. E-Court 8. Posbakum 9. Anjungan Gugatan Mandiri.
		3.	SIANDANG (Sistem Antrian Sidang)	Aplikasi berbasis WEB yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, yang dapat digunakan untuk mengatur antrian sidang dan telah terintegrasi dengan sistem SIPP
		4.	Sistem Persidangan untuk menyelesaikan perkara di ruang sidang (SIPERiang)	Sebuah sistem terintegrasi dan transparan yang digunakan secara sistematis di ruang sidang untuk percepatan penyelesaian perkara, mulai dari pembuatan Berita Acara Sidang, Instrumen dan Putusan secara otomatis dan dapat di print di ruang sidang tersebut
		5.	Aplikasi Pelayanan (APEL) PA Bandung	Aplikasi Pelayanan yang berbasis Android dan Web yang dapat di download melalui playstore. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana pemberian layanan terhadap : 1. Informasi jalannya perkara; 2. Penelusuran Prodfuk/AC; 3. Pelayanan Informasi pengajuan perkara; 4. Media Pengawasan Kinerja Aparatur PA Bandung; 5. Buku Tamu; 6. Survey Kepuasan Pelayanan;

			<p>7. Statistik kepuasan terhadap pelayanan;</p> <p>8. Tanda terima pengambilan produk secara digital.</p>
		6.	<p>Aplikasi Auto Court e-presence (ACEP PA Bandung)</p> <p>Aplikasi mobile dan web yang dikembangkan oleh PA Bandung guna mendukung sistem pengawasan penegakan disiplin kerja masa COVID-19. Aplikasi ini dapat digunakan untuk pegawai yang sedang melakukan WFH (Work From Home). Dimana fitur aplikasi ini dapat melakukan absensi dengan mengambil lokasi dan foto Aparatur Pengadilan pada saat WFH dan memiliki kemampuan untuk mengunggah pekerjaan apa yang telah dikerjakan pada saat WFH</p>
		7.	<p>SIFORPAT (Sistem Pelayanan Informasi Cepat)</p> <p>Sistem yang mengarahkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan online melalui whatsapp dan live chat. Aplikasi chat langsung kepada petugas layanan informasi yang embedded/ditambahkan pada web PA Bandung yang dikembangkan guna mendukung pelayanan informasi bagi masyarakat pencari keadilan secara cepat dan online</p>
		8.	<p>SIPECAT (Sistem Pengambilan Akta Cerai Cepat)</p> <p>Sistem yang dikembangkan guna mendukung pelayanan informasi produk/Akta Cerai bagi masyarakat pencari keadilan secara online</p>
		9.	<p>SISUYANIK (Sistem Survei Pelayanan Elektronik)</p> <p>Aplikasi berbasis Android yang dikembangkan untuk mendukung sistem pelayanan, yang berorientasi pada perhitungan terhadap survei kepuasan pelayanan PTSP secara elektronik, dengan cara menscan barcode pada kartu antrian</p>

			yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan
		10.	SKM Online Aplikasi berbasis WEB yang dikembangkan untuk mendukung sistem pelayanan, yang berorientasi pada perhitungan terhadap survei kepuasan masyarakat
		11.	SIPANON (Sistem Hitung Panjar Online) Sebuah sistem yang dikembangkan oleh PA Bandung guna mendukung sistem pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang digunakan untuk menghitung taksiran panjar biaya perkara secara online yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara kepada Bank dalam mengajukan sebuah perkara
		12.	Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Tersedianya sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan kaum rentan untuk mengakses informasi dan mobilitas serta kenyamanan dalam rangka mendapatkan layanan publik di PA Bandung
		13.	Aplikasi Penyandang Disabilitas/Tuna Rungu (SRT) Aplikasi ini menggunakan metode speech recognition teknologi berbasis Android
		14.	Sarana Pelayanan Anjungan Gugatan Mandiri Dibangun sebagai optimalisasi sarana pelayanan dari PA Bandung terhadap masyarakat pencari keadilan
2	PA TASIKMALAYA	1.	SIPATAS (Aplikasi Informasi Perkara PA Tasikmalaya) Aplikasi ini digunakan sebagai sumber informasi sederhana bagi para pihak mengenai perkara
3	PA KOTA CIMAHI	1	SILINCAH Sistem layanan informasi cepat dan hemat (SILINCAH) merupakan aplikasi berbasis web dan android (WhatsApp) yang bertujuan untuk memberikan informasi secara otomatis dan realtime kepada para pihak pencari keadilan di

				PA Kota Cimahi
4	PA SUMBER	1.	SINARA PA Sumber (Sistem Informasi dan Administrasi Perkara PA Sumber)	Digunakan oleh masyarakat umum untuk mengetahui informasi perkara, jadwal sidang, kalkulator panjar biaya perkara, dsb.
		2.	SIDARA (Sistem Informasi Validasi Akta Cerai)	Aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk melakukan validasi akta cerai menggunakan Barcode ataupun dengan manual.
		3.	Drive Thru	Digunakan oleh pihak yang ingin mengambil produk pengadilan seperti akta cerai dan salinan putusan secara drive thru.
5	PA KUNINGAN	1.	Sisa Elektronik	Sisa Elektronik, ini merupakan sistem aplikasi yang terdiri dari menu agenda surat masuk dan keluar, pembuatan konsep naskah dinas, disposisi surat, surat online dan arsip surat
		2.	WhatsApp	Untuk inovasi WhatsApp sistem ini merupakan sistem aplikasi notifikasi perkara yang dikirim melalui media Whats App yang terintegrasi dengan SIPP
6	PA INDRAMAYU	1.	SIMANGGAYU (Sistem Informasi Manajemen Pengadilan Agama Indramayu)	Sistem Informasi Manajemen PA Indramayu (SI-MANGGAYU) adalah merupakan himpunan inovasi berbasis Teknologi Informasi yang dirancang dan dibuat untuk menunjang kinerja di PA Indramayu. Aplikasi ini berbasis web programmin, dengan mengakomodir kinerja baik dibidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan
		2.	MEJIKA	MEJIKA(Mesin Jawab Informasi Perkara) Via Whatsapp. Aplikasi auto notifikasi dan auto menjawab informasi sesuai format yang



				ada.
7	PA KARAWANG	1.	Sistem Persuratan PA Kawarang (SISUKA)	Sebuah aplikasi berbasis web yang memudahkan untuk menregister/mendata surat
		2.	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat Harian adalah sebuah survey berbasis IT yang digunakan oleh PA Karwang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan PA Karawang. Masyarakat dapat langsung memilih penilaiannya melalui touchscreen yang telah disediakan di PTSP.
		3.	Inovasi Layanan Prioritas	Layanan Prioritas bagi kelompok rentan yakni wanita hamil, lansia, ibu membawa anak, dan penyandang disabilitas. Kartu antrian prioritas diberikan agar para pencari keadilan yang berkebutuhan khusus tidak perlu antri dan dapat langsung menerima layanan di PA Karawang
		4.	Sistem Informasi Pengimplementasian Arsip Elektronik Dokumen Data Perkara PA Karawang (SIPAED)	SIPAED merupakan aplikasi yang digunakan sebagai transfer data perkara di Pengadilan Agama Karawang. Dengan menggunakan SIPAED, pertukaran data perkara antar satu elektronik dan resiko hilangnya berkas perkara menjadi lebih kecil
		5.	SIPEKA	SIPEKA (Sistem Informasi Pegawai Pengadilan Agama Karawang) adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang memudahkan Aparatur Pengadilan Agama Karawang dalam melihat hak-hak Kepegawaian dan melakukan Pengajuan Cuti



8	PA SUBANG	1.	SIPAS	Sebagai Fungsi Akses Akta Cerai melalui HP Android
9	PA BEKASI	1.	SIAMAT (Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat)	Sistem Administrasi Surat Menyurat, aplikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Bekasi untuk membantu staf bagian umum dalam mengelola surat masuk dan keluar
		2.	BAN-SEREP (Aplikasi bantuan berita acara sidang dan putusan/penetapan)	Aplikasi ini bersifat internal dibuat untuk mempermudah para Hakim dan Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugasnya mendukung program ODM (One Day Minut) Aplikasi ini berisi template-template yang dibutuhkan dalam BAS dan Putusan yang sudah terkoneksi ke SIPP tanpa mengganggu data lainnya.
		3.	AKU-SI (Aplikasi Kebutuhan User PA Bekasi)	Aplikasi kebutuhan pegawai seperti CPAR Online
		4.	Notifikasi Perkara	Informasi perkara berupa panggilan sidang, pemberitahuan akta cerai, dan biaya panjar perkara yang dikirim melalui sms
		5.	SIAPE (Sistem Antrian Pelayanan PA Bekasi)	Mesin Antrian untuk layanan PTSP Pengadilan Agama Bekasi yang meliputi pendaftaran, pengambilan akta cerai, kasir, informasi, posbakum, dan anjungan e-court
		6.	SIPUKAT (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat)	Indeks keputusan harian masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bekasi
		7.	Antrian Sidang	Mesin antrian untuk layanan persidangan Pengadilan Agama Bekasi

		8.	AKIP (Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik)	Aplikasi Mandiri yang berisikan berbagai informasi yang dibutuhkan publik seperti cara pendaftaran, keadaan perkara, dll untuk memberikan kemudahan para pencari informasi tanpa harus antri
		9	SIMONEPP (Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara)	Aplikasi yang berisikan monitoring dan evaluasi dalam implementasi SIPP di Pengadilan Agama Bekasi
		10.	SIASAN (Sistem Antrian Sidang Online)	Aplikasi antrian sidang secara online yang bisa diakses oleh seluruh para pencari keadilan melalui website PA Bekasi
		11	PERJAKIM (Aplikasi Penilaian Kerja Hakim)	Aplikasi yang berisikan monitoring terhadap kinerja para hakim terhadap capaian putusan dan minutas yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Bekasi
10	PA GARUT	1.	SIPAGAR	Digunakan untuk melihat jadwal sidang, informasi akta cerai, penetapan atau putusan berbasis android
		2.	SIPAGAR PLUS	Digunakan untuk melihat Perkara Gugatan/Permohonan (jadwal sidang, informasi akta cerai, salinan putusan), Gugatan sederhana dan Eksekusi
11	PA CIAMIS	1.	SIMANIS (Sistem Manajemen Notifikasi dan SMS Perkara Ciamis )	Sistem Manajemen Notifikasi dan SMS Perkara Ciamis yang memberikan informasi tentang jadwal sidang, tanggal putusan dan pemberitahuan pengambilan akta cerai serta informasi penggunaan keuangan perkara

		2.	SIMKIPA (Sistem Manajemen Kinerja SIPP Pengadilan Agama)	Aplikasi yang dibangun pada tahun 2018 merupakan aplikasi yang digunakan untuk memonitoring kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita berdasarkan data yang diambil (terintegrasi) dengan SIPP
		3.	Sistem Informasi Litigasi Whatsapp Terpadu (SILIWANGI 4.0)	Pengembangan dari aplikasi SIMANIS yang memanfaatkan SIPP Mahkamah Agung
		4.	Aplikasi Pengambilan akta cerai dengan foto pihak	Aplikasi pengambilan akta cerai beserta foto pihak yang mengambil sebagai bukti pengambilan dan arsip akta cerai untuk mempercepat proses legislasi akta tanpa perlu mencari arsip.
		3.	PAC-TV Channel	Memberikan Inforamasi liputan baik online maupun offline kepada steakholder Pengadilan Agama Ciamis
		5.	Aplikasi Antrian sidang Terintegrasi SIPP	Aplikasi antrian sidang dan ptsp terintegrasi dengan pengumuman suara anti gratifikasi
12	PA CIBINONG	1.	SIANTER	Aplikasi Antrian Berbasis Web bisa digunakan untuk antrian sidang, PTSP, dan Aplikasi Panjar Perkara
		2.	SITAPAD	Aplikasi Tata Persuratan Digital Pengadilan Agama Cibinong
		3.	SIWANO	Aplikasi Layanan Informasi Perkara Berbasis WhatsApp Pengadilan Agama Cibinong
		4.	DIMATA	DIMATA (Digitalisasi Manajemen Pelayanan Penerimaan Tamu) Aplikasi ini merupakan layanan pengelolaan tamu yang berkunjung ke pengadilan Agama Cibinong secara digital

13	PA BOGOR	1.	SEMPUR (Sistem Pelayanan Terukur)	Sempur adalah aplikasi berbasis web merupakan layanan terpadu di Pengadilan Agama Bogor. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Para Pihak Pencari Keadilan. Aplikasi ini meliputi antrian pelayanan informasi & pengaduan, antrian pendaftaran, antrian kasir, antrian pengambilan produk, antrian posbakum, antrian gugatan mandiri, antrian bank dan pos, antrian persidangan. Dengan sempur ini pemanggilan pihak untuk antrian pelayanan di PTSP maupun pemanggilan pihak dan saksi dalam antrian persidangan secara otomatis. Antrian pelayanan di PTSP maupun antrian persidangan di tampilkan di monitor untuk transparasi dan kejelasan urutan antrian. Untuk lebih memudahkan antrian Sempur juga mencetak nama pihak, nomor perkara serta QR kode yang nantinya ditempel dikartu yang disebut Kartu Sempur Elektronik yang digunakan untuk antrian yang telah disebutkan di atas dengan cara scan QR Kode.
		2.	Aplikasi Sempur Mobile	Aplikasi Sempur Mobile merupakan aplikasi berbasis android yang memudahkan Para Pencari Keadilan untuk mengetahui Informasi Seputar Pengadilan, Scan Kartu Perkara, Jadwal Sidang, Link SIPP, Link SIWAS MA, Pengumuman, Artikel, dan Kontak Informasi Aplikasi.
		3.	Aplikasi Data Centre	Data center merupakan aplikasi berbasis web yang menampilkan data perceraian di Kota Bogor berupa data statistik mengenai jumlah perceraian berdasarkan lokasi sampai dengan tingkat



				Kelurahan maupun faktor perceraian
		4.	SITALAS (Sistem Telusur Digital Berkas)	Sitalas merupakan aplikasi berbasis web, yang digunakan untuk menelusuri berkas perkara secara digital dari perkara lama mulai tahun 1932 sampai perkara tahun berjalan, atau merupakan arsip digital. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat dalam pencarian berkas perkara untuk keperluan internal maupun survei.
		5.	Aplikasi Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Online	Aplikasi Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Online merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah responden berpartisipasi dalam Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Online. Aplikasi ini menjawab permasalahan kurangnya minat responden dalam mengisi secara manual.
		6.	Anjungan Gugatan Mandiri	Anjungan Gugatan Mandiri merupakan fasilitas yang di sediakan Pengadilan Agama Bogor bagi pencari keadilan dalam membuat gugatan. Anjungan ini didukung aplikasi Gugatan Mandiri yang berbasis web. Aplikasi ini disediakan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
14	PA DEPOK	1.	Aplikasi Antrian Terpadu (Antrian Pelayanan Sidang)	PA Depok telah memiliki sistem antrian sidang yang terintegrasi dengan SIPP, namun demikian belum memiliki antrian untuk meja pelayanan. Tetapi kini PA Depok telah memiliki sistem antrian pelayanan yang menyediakan antrian untuk layanan posbakum, layanan pendaftaran, layanan akta cerai, dan layanan kasir.



				antrian ini disebut terpadu karena juga terintegrasi dengan antrian sidang, dimana antrian sidang ini juga terintegrasi dengan SIPP.
		2.	Aplikasi Pengembalian Sisa Panjar	Aplikasi Pengembalian Sisa Panjar digunakan untuk menghitung sisapanjar dan rincian biaya perkara, dan mencetak bukti pengembalian sisa panjar kepada pihak
		3.	Kartu Prioritas	Kartu prioritas pelayanan yang diberikan kepada Lansia, Ibu menyusui, Penyandang disabilitas dan ibu hamil agar bisa mendapatkan pelayanan langsung tanpa mengantri.
		4.	Persidangan sistem ganjil-genap	Persidangan nomor perkara ganjil dimulai pada pukul 09.00-11.00 sedangkan perkara genap dimulai pukul 11.00 sampai dengan selesai.
		5.	Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP	Digunakan untuk menunjang One Day One Minute dimana pihak dapat menerima salinan putusan hari itu juga.
15	PA MAJALENGKA	1.	Sistem Informasi Antrian PTSP	Agar Pelayanan PTSP lebih tertib dan nyaman
		2.	KOSASIH (Komando Sapu Bersih)	Tim KOSASIH membuat jadwal dan pembangian tugas untuk mengontrol dan mengawasi kebersihan, keindahan dan kerapihan lingkungan kantor.
		3.	SIPELEM (SISTEM PELAYANAN LEMBUT)	Sistem Pelayanan Lembut sehingga petugas dapat melayani dengan maksimal
		4.	SISUSIE (Sistem Surat Elektronik)	Optimaliasasi pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan meningkatkan mutu layanan administrasi
		5.	PEPELING (Pelayanan Pengadilan Keliling)	Untuk menghindari penumpukan akta cerai yang tidak diambil para pihak.

		6.	SIBATUPANG (Sistem Bantuan Tuntas Panggilan)	Tujuan dari adanya SIBATUPANG ini adalah tidak ada relas panggilan bantuan yang terlambat baik ke pihak maupun ke majelis.
		7.	SIBETET (Sistem Beres-beres PBT)	Untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pemberitahuan putusan
		8.	SIPERIANG (Sistem Pelayanan di Ruang Sidang)	Penunjang One day minute dan One Day Publish
		9.	SIMONTOK (Sistem Monitoring Kearsipan)	Sebagai kendali untuk berkas perkara yang akan diarsipkan, serta buku yang digunakan untuk mengontrol berkas yang sudah masuk atau belum
		10.	GERTAK (Gerakan Anti Korupsi)	Bertujuan untuk Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan Agung
		11.	GOSSIP (Gerakan Optimaliasasi SIPP)	Bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan administrasi perkara
16	PA CIBADAK	1.	Sistem Antrian Sidang (SISAS)	SISAS ini digunakan untuk mendapatkan nomor antrian sidang
		2.	Status Akta Cerai di Website	Akta cerai yang sudah bisa diambil, bisa dicek statusnya pada laman website PA Cibadak dimenu "AKTA CERAI SIAP DIAMBIL"
		3.	Sistem Antrian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Sistem Antrian PTSP ini digunakan untuk mendapatkan nomor antrian di PTSP
		4.	WBS PAC (Whistle Blowing System PA Cibadak)	WBS digunakan untuk pengawasan

		5.	SISPAC (Sistem Informasi Survey Pengadilan Agama Cibadak)	SISPAC ini digunakan untuk Survey Kepuasan Masyarakat
		6.	SICPAC (Sistem Informasi Cuti Pengadilan Agama Cibadak)	SICPAC digunakan untuk informasi cuti
		7.	Sistem Informasi Aplikasi Persediaan Pengadilan Agama Cibadak	Sistem ini digunakan untuk persediaan
		8.	Sistem Informasi Arsip Pengadilan Agama Cibadak	Sistem ini digunakan untuk retensi arsip
		9.	Mobil Court	Sistem ini digunakan untuk pengambilan produk
17	PA CIREBON	1.	SIEMPAL (Sarana Informasi Pengadilan Agama Cirebon)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para pihak bisa melihat informasi profil Pengadilan Agama Cirebon</li> <li>2. Para pihak bisa mengetahui prosedur berperkara, statistik perkara, biaya perkara, produk pengadilan, E-Court, Siwas, Gugatan Mandiri, Jadwal Sidang</li> <li>3. Para pegawai bisa melakukan absensi online melalui SIKEP</li> </ol>
		2.	SISUNAN (Sistem Susunan Antrian Pelayanan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para pihak bisa manajemen waktu jika ingin mengantri paling depan datang lebih awal dan persiapan lebih awal</li> <li>2. Para pihak bersabar menunggu gilirannya tiba terutama jika ia di antrian paling belakang</li> <li>3. Para pihak bisa menghormati hak orang lain, yang datang lebih dapat giliran lebih awal dan tidak saling serobot merasa diri penting, berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain</li> </ol>

		3.	SIKALIJAGA (Sistem Keamanan Lingkungan dan Penjajaan)	1. Aplikasi CCTV keamanan kantor 2. Dapat dipantau online darimana saja
		4.	SIMACAN (Sistem Informasi Berbasis Android)	1. Sistem penelusuran perkara pada android 2. Untuk menjalankan SIPP pada aplikasi android
		5.	SILADU (Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan)	Sistem Informasi dan pengaduan berbasis visual
		6.	SUKAPURA (Survey Kepuasan Masyarakat)	1. Sistem SKL (Survei Kepuasan Layanan) 2. Sumber data harian mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pengadilan agama Cirebon
		7.	SINOKIRA (Sistem Notifikasi Informasi Perkara)	SMS Notifikasi Informasi Perkara
18	PA PURWAKARTA	1.	SIANSIDI (Sistem Antrian Sidang Terintegrasi)	Sistem Antrian Terintegrasi, mencakup antrian daftar, antrian sidang dan antrian pengambilan produk Pengadilan
		2.	SIANSIDI MOBILE	Sistem aplikasi berbasis android untuk melihat semua informasi proses persidangan dan pengambilan antrian sidang secara online
		3.	SILARU	Layanan tanpa antrian bagi para manula dan disabilitas
19	PA CIKARANG	1.	POJOK E-COURT	Pojok E-Court adalah Inovasi berupa Sarana & Prasarana penunjang layanan e-Court, bermanfaat bagi pengguna layanan e-court yang mengalami hambatan atas implementasi e-court



		2.	Whatsapp Gateway	Melalui aplikasi ini para pihak dapat mengetahui keadaan perkara melalui notifikasi otomatis sesuai dengan query tanpa menggunakan operator dan tanpa harus datang ke pengadilan
		3.	Aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Implementasi SIPP)	Melalui aplikasi ini Tim Penilai kinerja pada Pengadilan Agama Cikarang dapat mengontrol secara langsung sejauh mana kinerja tiap – tiap user atau pengguna SIPP.
		4.	SIPARANG	SIPARANG singkatan Sistem Administrasi Pengadilan Agama Cikarang yang merupakan suatu sistem aplikasi yang menghasilkan Laporan Keperkarahan yang digunakan untuk internal sebagai pengendalian internal.
		5.	Buku Tamu Elektronik PA Cikarang (BUMERANG)	Buku Tamu Elektronik merupakan aplikasi untuk data tamu yang berkunjung ke PA Cikarang pengganti buku tamu manual.
20	PA CIANJUR	1.	Aplikasi PTSP	Pelayanan PTSP
		2.	SIPANCAR	Aplikasi Penelusuran Perkara/Aplikasi Pendukung SIPP
21	PA KOTA BANJAR	1.	Aplikasi Antrian Sidang Online	Sistem Informasi Administrasi Perkara dibuat untuk memberikan informasi mengenai antrian sidang, jadwal sidang, akta cerai secara online
		2.	Mobil Jangkauan (MOJANG)	Layanan Mojang bertujuan untuk antar jemput pihak disabilitas yang membutuhkan layanan pengambilan akta cerai atau produk peradilan layanan informasi di lokasi para pihak Pengadilan Agama Kota Banjar



		3.	Drive Thru Akta Cerai/Salinan Putusan	Layanan pengambilan produk (akta cerai/salinan putusan) secara cepat tanpa harus turun kendaraan atau masuk ke ruang PTSP
22	PA KOTA TASIKMALAYA	1.	Aplikasi SAKEDAP (SMS Keadaan Perkara)	Aplikasi Notifikasi SMS untuk mengetahui berbagai informasi seputar perkara, seperti jadwal sidang, informasi akta cerai, dsb.
		2.	Aplikasi WANCI (Whatsapp Application for Case Information)	Aplikasi Notifikasi melalui aplikasi Whatsapp untuk mengetahui berbagai informasi seputar perkara, seperti jadwal sidang, informasi akta cerai, dsb.
		3	Layanan Gugatan Mandiri (LAGAS)	Para pihak bisa melakukan/membuat gugatan secara mandiri dengan menggunakan komputer yang telah disediakan oleh PA Kota Tasikmalaya.
		4	E- Surat	Aplikasi surat menyurat yang mempermudah dan mempercepat proses perjalanan surat dan pelaksanaannya
		5	Mesin Antrian Layanan	Untuk ketertiban dan kenyamanan semua layanan (Pendaftaran, sidang, penyerahan produk) para pihak wajib mengambil nomor antrian
		6	Aplikasi Pendukung SIPP (APS)	Aplikasi ini menyediakan semua formulir dan instrument kepaniteraan, template BAS, dan putusan. Template Putusan dan BAS PA Kota Tasikmalaya banyataj digunakan oleh PA Lain diantaranya PA Soreang, PA Pandeglang, PA Banyumas, PA Kepahiang, dll.

		7	PA Kots TV	Inovasi dari PA Kota Tasikmalaya, berbentuk media informasi audio visual dengan menggunakan saluran Youtube. Media ini diharapkan dapat menasar masyarakat pengguna media sosial khususnya mereka yang membutuhkan informasi seputar dunia peradilan, terutama informasi tentang kegiatan, wewenang, tugas dan fungsi serta produk Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
		8	Satu Desktop Satu Aplikasi (SDSA)	Shortcut aplikasi berbasis Web HTML yang disediakan untuk memudahkan para pengguna dalam menentukan aplikasi yang sering digunakan.
23	PA SOREANG	1.	Aplikasi Pelayanan untuk PTSP (A-PEL)	Aplikasi Antrian Pelayanan yang meliputi Antrian Posbakum, Antrian Pendaftaran, Antrian Informasi dan Pengaduan, Antrian Kasir dan Antrian Pengambilan Akta Cerai dan Salinan Putusan
		2.	Aplikasi Antrian Sidang Terintegrasi SIPP (SANTRI)	Antrian Sidang, antrian ini dibuat untuk menghindari calo perkara, karena sistem antrian sudah menggunakan pendeteksi wajah jadi harus diambil sendiri oleh pihak langsung yang akan sidang.
		3.	Aplikasi Notifikasi SMS	Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para pihak yang telah mendaftarkan perkara di PA Soreang mendapat informasi
		4.	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	Aplikasi yang dibuat untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh PA Soreang.

		5.	Aplikasi Buku Tamu	Aplikasi yang mencatat buku tamu, yang disertai dengan capture kamera, diantaranya: 1. Buku Tamu; 2. Register Informasi dan Pengaduan; 3. Register Pengambilan Akta Cerai
		6	Aplikasi Pengelolaan Surat	Aplikasi yang mencatat buku tamu, yang disertai dengan capture kamera, diantaranya: 1. Buku tamu; 2. Register Informasi dan Pengaduan
		7	Sistem Aplikasi Presensi (SiAP) menggunakan ID Card dan Pindai Wajah	Aplikasi presensi yang menggunakan ID Card dan dilengkapi dengan capture camera, dipergunakan oleh seluruh pegawai pengadilan untuk melakukan presensi sebagai bukti kehadiran.
		8	Aplikasi Vallidasi Akta Cerai PA Soreang	Aplikasi yang dipergunakan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Soreang untuk mengetahui keaslian produk pengadilan dan untuk memudahkan petugas meja pengambilan produk mengecek apakah akta cerai atau salinan putusan/penetapan sudah dapat diambil atau belum
		9	Aplikasi PTSP Online	Aplikasi PTSP Online dibuat sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh informasi mengenai Pengadilan Agama Soreang. Selain itu masyarakat pencari keadilan dapat menggunakan fasilitas Gugatan mandiri.
		10.	Aplikasi Pengawasan SIPP	Aplikasi yang dibuat sebagai sarana pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai pengadilan agama soreang, diantaranya dapat mengetahui kinerja hakim dan

				panitera pengganti dalam proses penyelesaian perkara
24	PA NGAMPRAH	1.	Portal Info Perkara	Portal Informasi Persidangan, Biaya Perkara dan Akta Cerai
		2.	Aplikasi SISIGIT	Aplikasi Pengelolaan Arsip Digital



## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. Internal.

##### 1. Tujuan

Untuk dapat mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung”**, maka diperlukan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, hal tersebut dituangkan dalam rumusan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan

Bahwa Pembinaan dan Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, maka oleh karena itu Pengawasan dan Pembinaan harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sesuai dengan fungsi manajemen yaitu fungsi Pengawasan atau controlling Pengadilan Tingkat Banding Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayahnya. Adapun tujuan Pengawasan yang ingin dicapai adalah :

- Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik dan benar,
- Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.
- Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Untuk menyusun langkah-langkah pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## **2. Objek Pembinaan dan Pengawasan.**

Pada dasarnya Pembinaan dan Pengawasan. dilaksanakan secara menyeluruh baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan yaitu:

- a. Manajemen Peradilan,
- b. Administrasi Persidangan,
- c. Administrasi perkara;
- d. Administrasi Umum,
- e. SIPP dan Kinerja Pelayanan Publik.

## **3. Bahan-bahan Pembinaan dan Pengawasan**

- a. Buku-buku Register Penyelenggaraan Perkara.
- b. Buku-buku Pengelolaan Keuangan Perkara.
- c. Berkas Perkara.
- d. Data-data terkait lainnya.

## **4. Waktu dan Tempat Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terhadap 26 (dua puluh enam) Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat dimulai dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020.

## **5. Tim Pembinaan dan Pengawasan .**

Untuk mewujudkan fungsi pembinaan dan pengawasan, ketua pengadilan tinggi agama jawa barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W10-A/2507/KP..03/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan Jadwal Pembinaan dan Pengawasan Reguler Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020, sebagai berikut :



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
NOMOR : W10-A/2507/KP.03/VII/2020  
T E N T A N G  
PERUBAHAN JADWAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REGULER  
PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa oleh karena pada pertengahan bulan Agustus 2020 akan dilaksanakan kegiatan pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, maka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Reguler tahun 2020 yang telah dijadwalkan perlu dilakukan perubahan jadwal kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah jadwal kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Reguler Tahun 2020 sebagaimana jadwal dalam lampiran keputusan ini;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Reguler Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/III/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN JADWAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REGULER PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2020;

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Reguler Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020;

Kedua : Tim Pembinaan dan Pengawasan tersebut bertugas :

- Mempersiapkan, merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan rencana pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sesuai jadwal terlampir;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;


Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 Juli 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

  
Drs. M. Taufiq H.Z., M.H.I.  
NIP. 19550219.198302.1.001

LAMPIRAN II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat  
 NOMOR : W10-A/2507/KP.03/VII/2020  
 TANGGAL : 21 Juli 2020

**DAFTAR TIM DAN PERUBAHAN JADWAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
 TAHUN 2020**

NO	PENGADILAN AGAMA	BIDANG PENGAWASAN			PENGEMUDI	WAKTU
		MANAJEMEN PERADILAN & ADMINISTRASI PERSIDANGAN	ADMINISTRASI			
			PERKARA & PELAKSANAAN PUTUSAN	KESEKRETARIATAN & PELAYANAN PUBLIK		
1	2	3	4	5	6	7
1	PA Kota Tasikmalaya	Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H	Drs. Mohammad Taufik.,M.H	Nurmansyah, S.Ag	Herda Budi Pramono, S.Sy	20-7-2020 s.d 21-7/2020
2	PA Ciamis	Drs. H. Arief Saefudin,S.H.,M.H	Drs. Ahmad Sodikin	Ofiq Taofiqurahman, S.E		
3	PA Kota Banjar	Drs. H. Ma'mur, M.H	Pipih, S.H	Syarif Bastaman, S.E.		
4	PA Bandung	Drs. H. Muslih Munawar, S.H	R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum	Rustandi, S.Ag.	Rama	23-7-2020 s.d 24-7-2020
5	PA Ngamprah	Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN	Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.	Rini Iriani, S.E	Kusmara, Sip	
6	PA Cibadak	Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.	Dadan Satya P, S.H.,M.H	Syarif Bastaman, S.E.	Sandi Priyadi, S.Sy	
7	PA Kota Cimahi	Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.,M.H.	Defrialdi, S.H	Rini Iriani, S.E	Adhi Padmayuda, A.Md	



8	PA Soreang	Drs H. Sutardi	R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum	Widiawaty, SE., MH.	Sandi Priyadi, S.Sy	27-7-2020 s.d 28-7-2020
9	PA Cibinong	Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.,M.H.	M. Hasan Shodiq A., S.H.I	Nurmansyah, S.Ag	Farhan Septiansyah, S.Sos.	
10	PA Cirebon	Drs. Muhyidin, M.H	Setyarini, S.H	Rustandi, S.Ag.	Herda Budi Pramono, S.Sy	
11	PA Sumber	Drs. H. Ma'mur, M.H.	Defrialdi, S.H	Ofiq Taofiqurahman, S.E		
12	PA Kuningan	Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H	Drs. Ahmad Sodikin	Rini Iriani, S.E		
13	PA BEKASI	Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.	Ahmad Majid, SH.,M.H	Rustandi, S.Ag.	Kusmara, Sip	29-7-2020 s.d 30-7-2020
14	PA DEPOK	Drs. H. Mahbub Tobri,S.H.,M.H	M. Hasan Shodiq A., S.H.I	Nurmansyah, S.Ag	Farhan Septiansyah, S.Sos.	
15	PA INDRAMAYU	Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H	Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.	Syarif Bastaman, S.E.	Sandi Priyadi, S.Sy	
16	PA MAJALENGKA	Drs. H. Muslih Munawar, S.H.	Pipih, S.H.	Widiawaty, SE., MH.	Adhi Padmayuda, A.Md	
17	PA GARUT	Drs. H. Sutardi	Suharti, S.H.	Ofiq Taofiqurahman, S.E	Rama	
18	PA CIANJUR	Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN	Dadan Satya P, S.H.,M.H	Rini Iriani, S.E	Adhi Padmayuda, A.Md	3-8-2020 s.d 4-8-2020
19	PA TASIKMALAYA	Drs.H. Mukhlis ,S.H.,M.Hum	M. Hasan Shodiq A., S.H.I	Syarif Bastaman, S.E.	Farhan Septiansyah, S.Sos.	
20	PA PURWAKARTA	Drs. H. D. Abdullah,S.H., M.H.	Suharti, S.H.	Rustandi, S.Ag.	Herda Budi Pramono, S.Sy	
21	PA KARAWANG	Drs. Muhyidin, M.H	R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum	Widiawaty, SE., MH.		
22	PA CIKARANG	Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.	Ahmad Majid, SH.,M.H	Ofiq Taofiqurahman, S.E		
23	PA SUBANG	Drs.H. Mukhlis ,S.H.,M.Hum	Drs. Mohammad Taufik.,M.H	Syarif Bastaman, S.E.	Sandi Priyadi, S.Sy	6-8-2020 s.d 7-8-2020
24	PA BOGOR	Drs. H. Mahbub Tobri,S.H.,M.H	Ahmad Majid, SH.,M.H	Widiawaty, SE., MH.	Adhi Padmayuda, A.Md	



25	PA SUKABUMI	Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.	Setyarini, S.H	Rustandi, S.Ag.	Kusmara, Sip	
26	PA SUMEDANG	Drs. H. Sutardi	M. Hasan Shodiq A., S.H.I	Ofiq Taofiqurahman, S.E	Rama	

Masing-masing Tim Pemeriksa diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus sudah membuat dan melaporkan hasil dari Pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan untuk ditelaah secara seksama. Hasil telaah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat disusun dalam bentuk kesimpulan hasil pemeriksaan dan selanjutnya di laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Secara Umum hasil temuan Tim Pengawas :

A. Bidang Manajemen Peradilan

Pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama di bidang Manajemen Peradilan secara umum temuan yang didapatkan antara lain :

1. Website Pengadilan Agama masih ditemukan pengisian menu-menunya tidak update, sehingga informasi yang disajikan tidak dapat memberikan informasi terkini;
2. Program kerja sudah dibuat, namun monitoring dan evaluasi Program Kerja belum dilakukan secara berkala, paling tidak setiap semester;
3. SOP satker sudah dibuat, namun implementasinya relatif masih lemah, dan pegawai kebanyakan tidak mengetahui dan memahami SOP tugasnya, sehingga bekerja hanya berdasarkan rutinitas melanjutkan yang sudah berjalan sebelumnya, tidak berupaya konsisten terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam SOP;
4. Hakim Pengawas Bidang sudah dibentuk oleh Pengadilan Agama, namun pelaksanaannya belum efektif termasuk evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan Hawasbid;

## B. Bidang Administrasi Persidangan

1. Adanya kekuarangtelitian dalam pembuatan BAP dan Putusan, sehingga memunculkan BAP dan Putusan yang isinya janggal;
2. Masih ditemukan BAP yang tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti atau Ketua Majelisnya;
3. Penyampaian Relas Panggilan yang disampaikan melalui Kepala Desa masih banyak ditemukan tidak dibubuhi stempel dinas desa tersebut.
4. Masih ditemukan adanya pemeriksaan perkara yang tidak sesuai dengan prosedur;
5. Minutasi berkas perkara belum sesuai dengan peraturan.

## C. Bidang Administrasi Perkara

Di bidang administrasi perkara secara umum yang sering menjadi temuan di Pengadilan Agama antara lain :

1. Temuan secara umum di hampir setiap satker
  - a. Pengisian Register Induk Perkara Tahun 2020 kebawah banyak kolom yang tidak di isi;
  - b. Akta cerai (P) dan (T) banyak yang tidak diambil, Penerbitan AC tidak urut seri/inkracht/ikrar;
  - c. One day minut tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta;
  - d. Uang titipan pihak ketiga tidak dicatat dalam pembukuan konsinyasi;
  - e. Penyetoran PPn dan PPh melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - f. Laporan perkara LIPA1, LIPA6, dan LIPA7a tidak sinkron pada laporan putus hal itu disebabkan data dari Panmud Gugatan/Permohonan, Panmud Hukum dan Kasir tidak divalidasi;

- g. Berdasarkan hasil pengawasan, Panitera tidak melakukan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan/pemberitahuan;
  - h. Arsip :
  - i. Pada umumnya arsip perkara tahun 2010 ke belakang tidak ada daftarnya;
  - j. Kondisi arsip tahun 2010 ke belakang tidak tersimpan dengan tertib;
  - k. Berkas perkara yang sedang dilakukan upaya hukum banding/kasasi/PK/Eksekusi tidak tersimpan dan dicatat dengan baik sesuai dengan ketentuan;
  - l. Berkas perkara yang sudah diarsipkan, PMH, Penunjukan PP, PHS, dan BAS belum ditandatangani;
  - m. Sisa panjar biaya belum dikembalikan karena kasir tidak memegang buku control;
  - n. Tanggal Penetapan majelis baru pada aplikasi SIPP merubah tanggal penetapan majelis yang lama sehingga dalam laporan tanggal sidang mendahului tanggal PMH;
2. Temuan Khusus hanya di beberapa satker
- a. Laporan perkara LIPA 5 tentang Eksekusi, didalam LIPA 7.b tidak terdapat laporan keuangannya;
  - b. Pelaksanaan PERMA No. 1 tahun. 2014 Jo SE Dirjen Badilag No. 508a/DjA/HK.00/3/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  - c. Implementasi dalam berkas perkara tidak sesuai dengan juklak juknis antara lain :
    - 1) Tidak ada SKUM nihil
    - 2) Kwitansi pembayaran biaya perkara dari bendahara pengeluaran tidak ada
    - 3) Tidak ada alokasi materai

d. Kondisi Buku Register Eksekusi:

Pengisian Buku Register Eksekusi masih banyak yang tidak lengkap;

e. Kondisi Register Konsinyasi.

1) Terdapat beberapa Pengadilan Agama yang tidak menyaipkan Register Konsinyasi ;

2) Selanjutnya ada penutupan Buku Induk Keuangan Konsinyasi yang tidak jelas;

3) Pengisian Buku Induk Keuangan Konsinyasi tidak akurat;

D. Bidang Administrasi Kesekretariatan

Hasil Pembinaan dan Pengawasan PTA Jawa Barat ke Pengadilan Agama di bidang Kesekretariatan pada umumnya temuan yang banyak ditemui antara lain :

1. Kepegawaian :

a. Masih ditemukan pengisian absensi pegawai yang tidak sesuai antara data manual dengan finger scan;

b. Kurangnya SDM baik di bagian Teknis maupun Kesekretariatan;

c. Pengisian SKP belum sesuai dengan petunjuk PP 46 Tahun 2011 tentang Pembuatan SKP dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013;

d. Mekanisme pemberian cuti pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Pengisian Data SIKEP masih belum mencapai 100%;

2. Umum dan Keuangan

a. Pengelolaan Barang Inventaris belum maksimal;

b. Penghapusan barang inventaris belum maksimal dilaksanakan;

c. Pemeliharaan Barang Inventaris Negara belum maksimal;



- d. Administrasi pertanggungjawaban keuangan masih belum maksimal, terutama dalam hal kelengkapan dokumen pendukung dan tanda tangan pejabat terkait;
  - e. Adanya pembebanan belanja kepada kegiatan atau akun yang tidak sesuai;
  - f. Capaian realisasi anggaran belanja DIPA tidak sesuai dengan progres yang seharusnya pada triwulan tertentu;
  - g. Belum dibuatnya rencana realisasi anggaran yang lebih detail selain dari Halaman III DIPA.
3. Perencanaan, IT dan Pelaporan
- a. Pengisian website satker masih banyak yang belum update;
  - b. Penyusunan SAKIP termasuk LKjIP masih belum maksimal;
  - c. Akses internet masih belum merata ke semua ruangan yang memerlukan akses internet.
  - d. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran masih banyak satker yang tidak melibatkan semua unsur lembaga.

## **6. Pelaksanaan Pengawasan.**

Anggaran untuk kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan ke Satker tingkat pertama yang tersedia di dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 hanya untuk 1 (satu) kali kegiatan. Mengingat anggaran yang terbatas, maka Pengawasan reguler tahun 2020 terhadap Pengadilan Agama Se Jawa Barat hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, namun sebelumnya pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah melakukan pengawasan non reguler. Pengawasan non reguler diantaranya berupa Sidak (pemeriksaan mendadak) terhadap Pengadilan Agama dan Pengawasan online melalui aplikasi Penunjang Kinerja.

Pengawasan non reguler berupa sidak dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya tentang disiplin waktu dan disiplin kerja pegawai, sidak dilakukan pada hari-hari tertentu dan ternyata menghasilkan kesadaran para pegawai untuk berdisiplin waktu dan berdisiplin kerja sedangkan Pengawasan online melalui aplikasi Penunjang Kinerja, terdiri dari :

- ✓ Aplikasi Buku Induk Keuangan Perkara (BIKP)
- ✓ Aplikasi Pengawasan terhadap SIPP
- ✓ Aplikasi Pengawasan bantuan delegasi Panggilan / Tabayun.
- ✓ Aplikasi e-monev e-court
- ✓ Aplikasi e-laporan
- ✓ Aplikasi Sikabayan (e-Realisasi Anggaran, e-SAKIP dan PDP);

## **B. Evaluasi.**

### **1. Hasil Pengawasan.**

Pengawasan pada tahun 2020 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali, namun tujuan dari pengawasan tersebut telah tercapai cukup signifikan, karena kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama di Jawa Barat telah banyak teridentifikasi dan dijadikan sebagai temuan pengawasan. Temuan hasil pengawasan pada Pengadilan Agama se Jawa Barat tahun 2020 telah diinventarisir

### **2. Hasil pembinaan.**

Setelah selesai melakukan pengawasan, tim menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) dan hasil temuan tersebut diekspose dihadapan seluruh pejabat dan staf Pengadilan Agama yang diawasi. Ternyata hasil temuan tersebut mendapat sambutan positif dan ada kesanggupan untuk menindak lanjuti temuan Tim.

### 3. Analisa.

Mengingat anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2020 sangat terbatas yang hanya cukup untuk 1 kali pengawasan reguler untuk seluruh Pengadilan Agama Se Jawa Barat, tentu berimplikasi pada jumlah hari yang disediakan untuk pengawasan, namun demikian pengawasan tersebut telah banyak menghasilkan temuan yang perlu ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama di Jawa Barat.

Keterbatasan waktu pengawasan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak terkoreksi, maka diperlukan adanya kebijakan Pimpinan untuk melakukan pengawasan jarak jauh yang dapat dilakukan setiap saat, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan IT. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terus berinovasi dalam membuat aplikasi Penunjang Kinerja yang dapat mengontrol setiap saat pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama.

### 4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengawasan

#### 1. Faktor Pendukung

- a. Komitmen dari Tim Pengawas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sesuai jadwal yang ditetapkan Ketua PTA Jawa Barat.
- b. Tersedianya kendaraan operasional Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- c. Tersedianya anggaran DIPA;

#### 2. Faktor penghambat.

- Minimnya anggaran pengawasan yang tersedia dalam DIPA.
- Data yang diberikan oleh Satker tidak sesuai;
- Waktu pelaksanaan pengawasan yang terlalu sempit.

## **BAB VII P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan.**

#### 1. Sektor Pelayanan Publik

Penerapan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Setelah diberlakukannya penilaian terhadap kinerja Pengadilan Agama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang bermutu, melalui Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2020 telah berhasil melakukan assessmen surveilliance untuk Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan seluruh satuan kerja Pengadilan Agama dimulai sejak bulan Oktober sampai November 2020 dengan hasil seluruhnya mendapat predikat “A” Excellent.

#### 2. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

##### a. Bidang Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan internal Tahun 2020 dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terhadap kinerja PTA dan PA se-wilayah Jawa Barat sebanyak 1 kali dalam setahun, yang dilakukan oleh beberapa tim yang beranggotakan Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan obyek pengawasan meliputi : Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, SIPP dan Kinerja Pelayanan Publik.
- 2) Tim Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PTA Jawa Barat Tahun 2020 walaupun hanya 1 kali dilaksanakan, namun telah berfungsi dengan baik dan menghasilkan temuan dan tindak lanjut yang sangat berarti dalam menunjang peningkatan kinerja PTA dan PA se-wilayah Jawa Barat, antara lain tindak lanjut hasil temuan :
  - Diberlakukannya rasionalisasi majelis hakim;



- Dilaksanakannya diskusi hukum di setiap wilayah;
  - Pembinaan dan sosialisasi kesekretariatan dan Kepaniteraan yang dilaksanakan di PTA Jawa Barat.
- b. Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkareraan
- 1) Pengadilan Tinggi Agama Jawa barat pada tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan 316 perkara dari perkara yang masuk sebanyak 321 perkara, atau sebanyak 98% perkara yang diselesaikan dari jumlah perkara yang masuk, dengan sisa 5 perkara yang belum diputus. Kondisi keberhasilan penyelesaian perkara tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 PTA Jawa Barat berhasil menyelesaikan 326 perkara dari perkara yang masuk sebanyak 337 perkara, atau sebanyak 97% perkara yang diselesaikan dari jumlah perkara yang masuk, dengan sisa 11 perkara yang belum diputus.
  - 2) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/ SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

### 3. Sektor Administrasi Kesekretariatan

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan IT
- 1) Setelah dilakukan *analisis staffing assesment* dan pemetaan jabatan kesenjangan jabatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan banyaknya perangkapan jabatan, pada tahun 2017 sudah terkikis habis, terutama didukung dengan lahirnya Perma 7 Tahun 2015 dan larangan rangkap jabatan struktural dan fungsional, serta adanya tambahan pengangkatan



Panitera Pengganti dan Jusurita/Jurusita Pengganti pada tahun 2018 dan 2019. Namun tetap kesenjangan tetap terjadi antara kuantitas SDM antara Formasi dan Realitas, Formasi Sesuai dengan Kebutuhan dan terlebih lagi dengan Formasi sesuai Standar KMA 143/2007. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat masih sangat jauh dari jumlah ideal.

- 2) Pelaksanaan Diklat/Bimtek pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan relatif masih sedikit baik untuk Diklat Tenaga Teknis maupun Administrasi Umum sehingga menjadi hambatan dalam peningkatan Kompetensi SDM yang sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Peradilan Agama.
- 3) Pengelolaan dan Pengembangan teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan tugas tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah banyak mengapresiasi dan menindaklanjuti kebutuhan sarana prasarana IT dan *software* Satker PTA dan Pengadilan Agama, hal ini terbukti sudah dibangun dan digunakannya update Website dan beberapa aplikasi penunjang kinerja, antara lain :
  - Website yang sesuai dengan standar MA-RI dan seragam seluruh Pengadilan Agama;
  - Aplikasi si Kabayan, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja SIPP, Realisasi Anggaran, Panggilan Delegasi, monitoring SIKEP/SIMPEG dan e-Monev PKT seluruh satker PA se Jawa Barat dan Aplikasi SIKEMBAR;

- Aplikasi BIKP (Buku Induk Keuangan Perkara) yang dapat mendukung petugas keuangan perkara secara otomatis, tanpa harus menulis secara manual;
- b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 1) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama tahun 2020 telah melakukan berbagai kinerja peradilan, ditandai dengan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama tahun 2020 eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah dalam hal pelaporan keuangan dan barang milik Negara.
  - 2) Pengelolaan sarana dan prasarana tahun 2020 dapat berjalan dengan tertib, baik pengelolaan di PTA maupun di satker Pengadilan Agama se Jawa Barat, termasuk pelaksanaan pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui Pokja PTA Jawa Barat maupun yang langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan masing-masing satker;
- c. Bidang Pengelolaan Keuangan
- 1) Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu;
  - 2) Dalam hal pelaksanaan anggaran masih terdapat sedikit kendala, yakni pencairan anggaran bertumpuk di akhir tahun anggaran, sedangkan di awal tahun anggaran realisasi minim sekali, hal ini diantaranya juga disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki

Sertifikasi Barang dan Jasa yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ikut melambat, selain itu adanya Pandemi Covid-19 hampir sepanjang tahun 2020 turut menyebabkan lambatnya peyerapan anggaran.;

d. Bidang Rencana Program dan Anggaran

- 1) Rencana anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan DIPA TA 2020 terutama belanja operasional dan non operasional relatif sesuai dengan usulan, akan tetapi dalam hal belanja modal masih belum sesuai dengan kebutuhan prioritas satker, karena belanja modal masih ditentukan oleh BUA Mahkamah Agung RI, baik jenis barang maupun harga/pagu anggarannya.
- 2) Terjadi pemotongan anggaran dan Refocussing Kegiatan Non-Operasional pada Tahun Anggaran 2020 yaitu pada anggaran Bimbingan Teknis dalam rangkan Penanggulangan Pandemi Covid-19.
- 3) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah melakukan evaluasi terhadap SAKIP satuan kerja Pengadilan Agama Tahun 2020, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya namun hasilnya masih belum memuaskan, sehingga PTA Jawa Barat telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM dalam hal penyusunan dokumen SAKIP, berikut tabel Rekapitulasi Nilai SAKIP Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

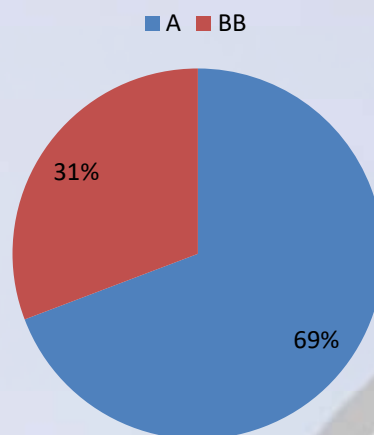
**Tabel 7.1**  
**REKAPITULASI NILAI SAKIP PENGADILAN AGAMA**  
**WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2019**

No	Satker	Nilai	Kategori	Keterangan
1	PA MAJALENGKA	86,30	A	
2	PA CIKARANG	85,67	A	
3	PA CIANJUR	82,90	A	
4	PA GARUT	82,65	A	
5	PA CIAMIS	82,35	A	
6	PA BEKASI	81,75	A	
7	PA DEPOK	81,43	A	
8	PA BANDUNG	81,39	A	
9	PA KUNINGAN	81,10	A	
10	PA SUMBER	81,07	A	
11	PA TASIKMALAYA	80,93	A	
12	PA SUBANG	80,75	A	
13	PA KARAWANG	80,71	A	
14	PA CIBINONG	80,65	A	
15	PA CIBADAK	80,61	A	
16	PA KOTA BANJAR	80,43	A	
17	PA CIREBON	80,12	A	
18	PA KOTA CIMAHI	80,10	A	
19	PA SOREANG	79,86	BB	
20	PA PURWAKARTA	79,85	BB	
21	PA NGAMPRAH	79,83	BB	
22	PA SUMEDANG	79,70	BB	
23	PA INDRAMAYU	79,27	BB	
24	PA KOTA TASIKMALAYA	76,80	BB	
25	PA SUKABUMI	74,76	BB	
26	PA BOGOR	73,70	BB	

Berdasarkan data diatas, berikut diagram yang menunjukkan statistik nilai SAKIP Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat :



## Grafik 7.1 Nilai SAKIP Tahun 2019 Pengadilan Agama Se-Jawa Barat



- 4) Dalam hal penilaian SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sendiri yang dilakukan oleh Bawas MA-RI nilainya sangat baik dengan nilai 77,34 BB (Sangat Baik).

### **B. Rekomendasi.**

1. Sektor Pelayanan Publik

Untuk kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik, baik untuk Pengadilan Agama baru khususnya maupun untuk Pengadilan Agama lama agar dipenuhi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan satker;

2. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

a. Bidang Pengawasan Internal

Untuk meningkatkan epektifitas pelaksanaan pengawasan internal, agar Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti temuan yang bersipat pelanggaran disiplin secara khirarkis sesuai PP 53 Tahun 2010, tidak selalu semua tindakan



pengaduan selalu harus diarahkan kepada Badan Pengawasan MA-RI

- b. Bidang Administrasi Keperkerajaan
  - 1) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun yang belum diputus.
  - 2) Penilaian Capaian Kinerja penyelesaian perkara dipokuskan pada penyelesaian perkara yang tepat waktu, bukan pada sisa perkara yang belum diselesaikan.
  - 3) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang Pola Bindalmin yang telah direvisi.
  - 4) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengawasan ke daerah.

### 3. Sektor Administrasi Kesekretariatan

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - 1) Mohon kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan memperhatikan hasil *Analysis Staffing Assessment* dan Pemetaan Jabatan serta *Beezeting Formation*;
  - 2) Mohon kepada Balitbang Diklat Kumdil untuk dapat meningkatkan formasi Diklat bagi Tenaga Teknis dan Administrasi Umum dilingkungan Peradilan Agama khususnya Wilayah Jawa Barat.
- b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
  - 1) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan ke daerah tentang buku-buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan,

Kearsipan, dan Humas, Keprotokolan serta Standarisasi Sistem Keamanan dan Ketertiban Kantor.

- 2) Perlu adanya penganggaran belanja modal guna meremajakan sarana prasarana yang ada agar tetap up-to date dan layak pakai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.

c. Bidang Pengelolaan Keuangan

- 1) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk lebih meningkatkan pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari Perencanaan, sampai dengan Pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan ke daerah secara Integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada;
- 2) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk memacu prestasi realisasi anggaran dan kinerja di Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama agar diberikan reward kepada Pengadilan yang berprestasi, baik dalam bentuk Sertifikat penghargaan ataupun dalam bentuk lain, seperti Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kanwil DJPB atau KPPN.
- 3) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I untuk membuat suatu aturan atau edaran yang menekankan kepada daerah untuk lebih aktif membuat rencana penarikan dana DIPA secara periodik sesuai dengan aturan yang berlaku.